

# PRINSIP-PRINSIP EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM

(Studi Komparatif tentang Distribusi Pendapatan)



Oleh :

**Wulpiah, S. Ag**  
Nim : 980020

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister dalam Ilmu Agama Islam  
Yogyakarta  
2000

**PRINSIP-PRINSIP EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM**  
(Studi Komparatif tentang Distribusi Pendapatan)

**Wulpiah**

**Nim: 980020**

**Abstraksi**

Salah satu masalah ekonomi yang sangat sulit untuk diwujudkan tingkat keadilannya adalah Distribusi. Dan dalam penelitian ini penulis membicarakan tentang perbandingan *Prinsip-prinsip Distribusi Pendapatan menurut Ekonomi Kapitalisme dan Islam*, sehingga diharapkan akan menemukan kelebihan/kekurangan dan persamaan/perbedaan, yang selanjutnya memunculkan *paradigma baru* yang lebih relevan dalam menjawab persoalan-persoalan distribusi yang berkembang.

Adapun penelitian ini adalah studi literatur/konsep, yang pembahasannya dengan menggunakan: *Metode Deskriptif, Komparatif* dan *Analitik*. Metode *Deskriptif* dipakai untuk mendiskripsikan kedua prinsip ekonomi (kapitalisme dan Islam) dengan apa adanya (sesuai dengan kenyataan). Sedangkan Metode *Komparatif* dipakai untuk membandingkan kedua prinsip ekonomi diatas, sehingga ditemukan perbedaan/persamaannya. Terakhir, Metode *Analisis-Simetris* yang digunakan untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan prinsip keduanya, sehingga akan menemukan formula yang lebih valid untuk mengantisipasi persoalan yang ada.

Setelah dilakukan penelitian secara *komprehensif*, ternyata penulis mendapatkan kelebihan/kekurangan dari masing-masing sistem. **Pertama** pada asumsi/prinsip kedua ekonomi, **Kedua**, Tujuan/orientasinya dan **Ketiga** pada perilaku manusianya. Hal itu tercermin dalam mengartikan "harta", yang jika dihubungkan dengan prinsip distribusi pendapatan, bahwa dalam ekonomi kapitalis: "Harta hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja", sehingga pendistribusiannya dilakukan pasca produksi atau 'mengsampingkan' distribusi pendapatan. Sementara dalam ekonomi Islam: "Harta pada dasarnya milik Allah", jadi setiap orang 'berhak' atas harta yang dimiliki dengan mendistribusikannya (dalam bentuk zakat, pajak, warisan, infaq dan sadaqah) sebelum produksi tanpa menafikan laba yang didapat dari produksi tersebut. Implikasinya distribusi dalam ekonomi Islam lebih adil dibandingkan yang ada dalam ekonomi Kapitalisme, sebab distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam selalu mengacu pada *sistem nilai/etika* yang ada dalam Islam.

Yogyakarta: 8 Mei 2000

## Principles of Capitalism and Islamic Economics (A Comparative Study of Income Distribution)

### Abstract

One of the economic problems which is difficult to achieve is equality in income distribution. And in this research, the writer makes a comparison between the principles of income distribution in capitalism and those in Islam. The aim is to uncover and elucidate the strengths and weaknesses and the similarities and differences, that may reveal a new paradigm which is more relevant to addressing the current problem of income distribution.

Significantly, there is though, in this study, a review of literature and concepts, which are explained using *descriptive, comparative* and *analytical methodologies*. Descriptive methodology is used to describe the two economic principles (capitalism and Islam). While comparative methodology is used to compare the principles of the economic schools of thought (Islam and capitalism) in order to reveal the similarities and differences. Finally, simetritical analysis is used to explain the strengths and weaknesses of the two principles, in order to create a more robust formula to anticipate future problem.

The writer uses the result of her comprehensive research to illustrate the strengths and weaknesses of the two economic paradigms in three key areas: an assessment of the principles which underlie the two paradigms; an examination of the goals and orientations of capitalism and Islamic economics; finally, to evaluate the behaviour of the economic actors in the two system. This is reflected in the way in which the concept of property is defined, which bears relation to the principles of income distribution in a capitalism economy: Property is seen as a possession solely of the individual, hence the distribution of income occurs after the process of production or is neglected. Whereas in Islamic economics, property is the possession of Allah (God), so that every person has a right to that property and a fair distribution of its wealth (through zakat, taxes, inheritance and gifts) even before the process of production in regard to consideration of profit and production output. The distributive implication of this outlook in Islamic economics is more equitable compared to that in capitalism economic, because the distribution of income in an Islamic economic system is always made by reference to the Islamic system of *values* and *ethics*.



Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam (S-2)  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## NOTA DINAS

TESIS berjudul : PRINSIP-PRINSIP EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM  
(Studi Komparatif tentang Distribusi Pendapatan)

Ditulis oleh : WULPIAH, S.Ag.

NIM : 980020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Yogyakarta, 9 Mei 2000  
Ketua Program  
u.b. Kabid. Akademik,  
Drs. Yusdani, M.Ag.



PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. (0274) 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

N a m a : WULPIAH, S.Ag.

NPP dan Nimko : 980020/99/UJII/III/00579

Judul Tesis : Prinsip-Prinsip Ekonomi Kapitalisme dan Islam (Studi  
Komparatif Tentang Distribusi Pendapatan)

Ketua Sidang : Dr. Imam Syafii'ie, MA

Sekretaris Sidang, : Drs. Yusdani, M.Ag.

Penguji : 1. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

2. Drs. M. Akhyar Adnan, MBA., AK., Ph.D.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2000

Pukul : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 3,60

Predikat : Sangat Memuaskan

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Lap-Uji/b-acara-t/0/7/8/2000



Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam (S-2)  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## PERSETUJUAN

TESIS berjudul : PRINSIP-PRINSIP EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM  
(Studi Komparatif tentang Distribusi Pendapatan)

Ditulis oleh : WULPIAH, S.Ag.

NIM : 980020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam  
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 9 Mei 2000  
Pembimbing,

Drs. Achmad Tohirin, MA.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamua'laikum wr. wb*

Atas segala rakhmat, nikmat dan karunia dari Allah SWT., tesis yang berjudul **Prinsip-Prinsip Ekonomi Kapitalisme dan Islam (Studi Komparatif tentang Distribusi Pendapatan)** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan tesis ini, tentu saja dukungan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sangat berarti, sehingga akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada:



1. Bapak Prof. Dr.Zaini Dahlan selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Imam Syafie'i selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam yang telah menyetujui pembahasan tesis ini.
3. Bapak Drs. Ahmad Tohirin, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah mengoreksi, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini bisa selesai.
4. Ayahda, Ibunda (H. Saat dan Hj. Maimunah) terima kasih atas segala yang telah kalian berikan kepada saya selama ini, semoga akan diberikan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

5. Saudara-saudaraku, Aziyah, Ir. Tarmizi, M. Damyati, Drs. Admi, Sopiah dan Khoiriyah, khususnya kakakku Ir. Tarmizi terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.

6. Dosen pengajar, staf akademik dan perpustakaan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga penelitian dapat diselesaikan.

7. Teman-teman seperjuangan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mengingatkan, dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 24 Mei 2000

Penulis,

**Wulpiah, S. Ag**

**Nim : 980020**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
TIM PENGUJI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II. DISKRIPSI UMUM TENTANG EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM	
A. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Kapitalisme .....	19
B. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Islam .....	50

### BAB III. PRINSIP EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM TENTANG

#### DISTRIBUSI PENDAPATAN

A. Menurut Ekonomi Kapitalisme.....	71
B. Menurut Ekonomi Islam .....	89
C. Persamaan dan Perbedaan Ekonomi Kapitalisme dan Islam tentang Distribusi Pendapatan.....	97
D. Mekanisme Kerja Ekonomi Kapitalisme dan Islam tentang Distribusi Pendapatan	
A. Menurut Ekonomi Kapitalisme.....	104
B. Menurut Ekonomi Islam.....	114

### BAB IV ANALISIS TERHADAP EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN

A. Analisis terhadap Prinsip Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Kapitalisme.....	133
B. Analisis terhadap Prinsip Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam.....	145

### BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	182
B. Saran-saran.....	183

DAFTAR PUSTAKA.....	184
---------------------	-----

LAMPIRAN TABEL.....	191
---------------------	-----

## BAB II PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat baik individu maupun kolektif. Hal itu terlihat dengan adanya berbagai penelitian untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut, sebab kebanyakan penelitian yang dihasilkan sudah menyimpang dari motivasi semula sehingga mengaburkan tujuan sebenarnya. Disatu pihak ada pendapat yang menyarankan untuk mementingkan hak individu sementara itu di pihak lain menolak keistimewaan individu.<sup>1</sup>

Dewasa ini terdapat dua kubu teori ekonomi yang saling bertentangan yaitu sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Meskipun dalam masing-masing kategori besar ini sangat variatif, namun sebenarnya mereka memegang asumsi-asumsi yang sama tentang manusia, masyarakat, dan kegiatan ekonomi.<sup>2</sup> Keduanya yakin bahwa manusia mampu dan harus mengatur kehidupannya tanpa kendala-kendala moral apa pun dan ini sangat menyimpang dari Islam.

Lebih jauh lagi Al-'Assal dan Karim dalam kitab *An-Nidzamu Al-Iqtishasy fi Al-Islam Mabadiuhu Wahdafuhu* telah mengeritik ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme. Kapitalisme dianggap terlalu banyak menonjolkan pada kepentingan khusus (individu) daripada kepentingan

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1.

<sup>2</sup> Nyang Sulaiman, *The Islamic State and Economic Development; a Theoretical Analysis* (Islamic Culture; It, 1976), hal. 10.

umum yang ternyata telah banyak menimbulkan berbagai krisis dan meratanya pengangguran. Hal itu disebabkan melimpahnya produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi, selanjutnya banyak industri tutup serta menyebabkan banyaknya kaum buruh yang menganggur.<sup>3</sup>

Adapun sistem ekonomi sosialis merupakan pemberontakan terhadap sistem ekonomi kapitalis, dimulai oleh Karl Marx yang mengupas dan membahas Kapitalisme serta meramalkan keruntuhannya sekaligus naiknya sosialisme sebagai penggantinya. Menurut Marx, hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis telah sedemikian merajalela dan menimbulkan penderitaan dan kemelaratan buruh yang dihisap dan diperas serta adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial.<sup>4</sup>

Namun menurut kenyataannya, pertarungan kedua sistem ekonomi itu di dunia menunjukkan arah sebaliknya, yakni keuntungan sosialisme.<sup>5</sup> Dampaknya terhadap perkembangan ekonomi ialah gejala

---

<sup>3</sup> Al-'Assal, Ahmad Muhammad & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Imam Saefudin, (Bandung ; Pustaka Setia, 1999), hal. 33-35.

<sup>4</sup> Muchtar Akhmad, "*Kajian Ekonomi Islam*", Jurnal Ulumul Qur'an, (Vol. II, 1991/1411 H), hal. 4. Dalam analisis Marx tentang kapitalisme mengatakan walaupun pada akhirnya kapitalisme harus digulingkan melalui melalui suatu revolusi yang dipimpin klas pekerja yang teorinya tidak lapuk mengenai sejarah dan program politiknya yang praktis . Analisis tersebut menghasilkan dua hal, yaitu : *pertama*, meningkatnya krisis-krisis ekonomi dan *kedua*, menajamnya polarisasi klas, dengan menyusun suatu tingkat baru revolusi yang akan datang. (Selanjutnya lihat dalam Anthony Brewer, *Kajian Kritis DAS Kapital Karl Marx*, (Jakarta ; Teplok Press, 1999), hal. 4.

<sup>5</sup> Sistem ekonomi *Sosialis* yang didasarkan pada materialisme dan kolektivisme, ia bersifat materialisme yang sama dengan kapitalisme karena percaya pada faktor ekonomi sebagai faktor tunggal yang menentukan nasib manusia. Kolektivisme sebagai suatu pandangan terhadap organisasi ekonomi yang segala sesuatunya milik negara dan negara akan mengkoordinasi aktivitas ekonomi. Hal ini secara pasti bertentangan dengan sifat dasar organisasi sosial manusia. Ia tidak hanya gagal menjalankan secara keras tapi juga menghadapi bencana dan pada akhirnya harus roboh (gagal). (Lebih lanjut lihat dalam Islam and Justice, Nik Musthafa Hj. Nik Hassan, pada bab *Implementation Justice in Economic and Business*, (Malaysia; Institute Of Islamic Understanding, 1993), hal. 62.

semakin diyakininya kapitalisme sebagai dasar pembangunan beberapa negara. Tetapi beberapa pakar ekonomi<sup>6</sup> masih meragukan setelah melihat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang melanda kehidupan manusia di seluruh dunia serta guncangan ekonomi yang tidak teramalkan, termasuk di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis itu sendiri.<sup>7</sup>

Sebagai contoh di Indonesia, dalam bidang ekspor yang semenjak nilai tukar rupiah anjlok (pada tahun 1998) sampai level Rp17.000, idealnya depresiasi yang demikian besar ini secara teoritis mendorong ekspor Indonesia. Dengan kemerosotan nilai tukar, daya saing produk dari Indonesia meningkat, sehingga akan terjadi peningkatan permintaan produk barang dan jasa dari negara kita. Atas dasar pandangan teoritis demikian, maka tidak jarang secara sengaja suatu negara mendepresiasi mata uangnya yang dikenal dengan kebijakan devaluasi, guna mempertinggi daya saing produknya, atau untuk memperbaiki posisi neraca perdagangannya (*balance of trade*) maupun transaksi berjalannya (*current account*). Melalui devaluasi harga produk

---

<sup>6</sup> Sistem ekonomi *Kapitalis* dalam pelaksanaannya terjadi hampir di setiap negara di seluruh dunia saat ini, dan kerangka kerja teoritis aslinya telah disesuaikan selama berkali-kali. Revolusi Keynesian yang menempatkan peran penting pemerintah sebagai pengganti naturalisme. Kenyataannya peran penting pemerintah dalam organisasi ekonomi telah diberikan kebenaran ekonomi, yang mana sistem yang menegakkan individualisme tidak dapat tidak (harus) secara terus-menerus memungkinkan eksploitasi untuk berperan dalam ekonomi meskipun ada campur tangan pemerintah. Namun kenyataannya, semakin banyak campur tangan pemerintah dalam kerangka kerja ekonomi kapitalisme semakin memperburuk kondisi ekonomi. (Selanjutnya baca dalam *Islam and Justice*, Nik. Musthafa Hj. Nik Hassan, pada bab *Implementation Justice in Economic and Business*, (Malaysia; Institute Of Islamic Understanding, 1993), hal. 61.

<sup>7</sup> Muchtar Akhmad, *Op. Cit.*, hal. 4. Dalam bukunya yang berjudul "*Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*", pada hal. v, Anthony Brewer secara ringkas mengatakan bahwa sesungguhnya kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi benar-benar

barang dan jasa suatu negara menjadi lebih murah dilihat dari sisi konsumen di negara lain, dan harga barang impor menjadi lebih mahal di mata masyarakat negara yang melakukan devaluasi.<sup>8</sup>

Namun kenyataan yang terjadi di negara kita tidaklah demikian. Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 1998 mengalami penurunan dibandingkan tahun 1997. Nilai ekspor tahun 1997 mencapai US\$ 53,4 milyar, turun 8,6 persen menjadi US\$ 48,8 milyar pada tahun 1998. Demikian juga nilai ekspor Januari 1999, lebih kecil dibandingkan nilai ekspor 1998. Angka-angka ini menunjukkan gambaran yang memprihatinkan, karena bisa mengindikasikan rapuhnya struktur ekspor kita sehingga tidak dapat memanfaatkan peluang emas yang tercipta akibat depresiasi yang terjadi.

Lebih lanjut lahirnya sistem kehidupan kapitalis di satu pihak dan sosialisme di pihak lain merupakan bukti yang tak terbantah tentang akibat penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sosial. Jika masing-masing sistem tersebut sampai kini masih memperoleh dukungan dari pejuang-pejuangnya, maka kepentingan apa lagikah yang lebih logis untuk diterima selain daripada untuk menjaga nilai-nilai moral/etika tersebut, yang mana filsafat ekonomi Kapitalisme berbasas pada *Laissez*

---

mengeksploitasi buruh/karyawan agar mereka bisa memproduksi sesuatu dengan sebanyak-banyaknya tanpa menafikan eksistensi dan kesejahteraan buruh/tenaga kerja.

<sup>8</sup> Edi Suandi Hamid, *Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis, Restrukturisasi Industri dan Antisipasi Pelaku Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menangkap Peluang Bisnis Indonesia Pasca Krisis; Prospek Ekonomi Indonesia Pasca

*faire* (bebas, liberal) dan filsafat ekonomi Sosialisme/Marxisme adalah *konsep pertarungan kelas*. Sedangkan filsafat ekonomi Islam yaitu *Tauhid* (QS; 39:38) selanjutnya bagaimana implikasi-implikasi yang dapat ditimbulkan dari penerapan ilmu ekonomi yang diajarkan di lembaga pendidikan?<sup>9</sup>

Adalah pola kehidupan Kapitalisme merupakan implementasi dari sistem kehidupan kita saat ini. Maka tak heran jika dewasa ini semakin banyak kita menyaksikan pudarnya nilai moral kehidupan bangsa yang sarat dengan nilai gotong-royong dan suasana religius akhirnya bermuara pada budaya permissive, hedonistik, kemiskinan di tengah kemakmuran yang tentu bertentangan dengan nilai kemanusiaan/moral agama.

Jika diilustrasikan akibat dari penerapan sistem ekonomi ini memunculkan krisis ekonomi seperti di Indonesia, di mana lebih dari 100 juta rakyat Indonesia terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dan hampir 20 juta orang menganggur. Lebih parah lagi tak kurang dari 5 juta anak putus sekolah. Adapun di sektor kehutanan misalnya, ada satu

---

Krisis, diselenggarakan oleh Magister Manajemen dengan ISEI Cabang. Yogyakarta, Yogyakarta, 19 April 1999, hal. 3-4.

<sup>9</sup> M. Rusli Karim (Ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogyakarta, bekerjasama dengan P3EI UII, 1992), hal.1. Selanjutnya ekonomi yang berbasis Syari'ah yang diturunkan oleh Allah SWT, harus diyakini sebagai sistem terbaik yang diharapkan akan membawa masyarakat kepada tatanan ekonomi yang adil, sebab jika kita melihat kembali sistem ekonomi yang berlaku pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dijelaskan bahwa sistem ekonomi Syari'ah terbukti telah membawa masyarakat dalam tatanan yang Islami, hidup sejahtera, damai lahir maupun bathin. Berangkat dari masalah ini, maka penerapan sistem ekonomi Islami untuk saat ini sangat signifikan sebagai langkah/tindakan preventif terhadap tumbuh dan berkembangnya sistem ekonomi kapitalis yang jelas sekali "sangat tidak menguntungkan". (Silakan baca Iskandar Zulkarnen dalam *Republika*, yang berjudul *Perlunya Sistem Ekonomi Islam*, hal. 3.)

konglemerat yang dibiarkan menguasai lebih dari 5,5 juta ha atau lebih luas dari negara Inggris Raya. Selanjutnya ketidakadilan di sektor perbankan di mana dari total kredit pemerintah per September 1999 sebesar 536 triliun, 80% di antaranya dikucurkan untuk usaha besar yang didominasi oleh 228 pengusaha. Anehnya lagi lebih dari 60% kredit itu macet, sementara 20% sisanya untuk jutaan rakyat lainnya dan itu pun 10% saja belum telampaui.<sup>10</sup>

Maka jika pada abad 21 nanti seluruh negara di dunia ini harus memasuki apa yang mereka (kapitalisme) katakan sebagai “Tata Ekonomi Dunia Baru” melalui World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia, padahal organisasi ini akan menguasai secara sempurna seluruh sektor perdagangan, perekonomian, moneter, perburuhan, pertanian, jasa, keimigrasian dan perundang-undangan yang berkaitan dan semua itu yang ada di dunia ini. Dan seluruh negara-negara di dunia dipaksa untuk membuka seluruh pasarnya serta harus siap berkompetisi secara bebas dan terbuka, tidak peduli apakah itu negara maju atau negara melarat. Keadaan ini akan memberi peluang yang lebih besar kepada golongan ekonomi kuat, sehingga ketimpangan dengan golongan ekonomi lemah akan semakin meningkat.<sup>11</sup>

Di tengah krisisnya umat manusia saat ini yang memulai sejarah paling kritis tetapi kreatif, yaitu sistem kontemporer yang bebas nilai

---

<sup>10</sup> Iskandar Zulkarnaen, “Perlunya Sistem Ekonomi Islam, Dalam *Republika*, 24 Desember 1999, hal. 3.

<sup>11</sup> Adi Sasono, *Liberalisasi Ekonomi; Pemerataan dan Kemiskinan*, (Ed. Lukman Soetrisno & Faraz Umay, (Yogyakarta: P3PK UGM dan Tiara Wacana, 1995), hal. xi.

(baca: paham kapitalis dan sosialis) ditemukan Islam sebagai alternatif sistem yang penuh dan lengkap memuat *nilai moral* kehidupan. Keunikannya terletak pada pendekatan Islam terhadap *sistem moral* yang mewarnai tingkah laku ekonomi/kehidupan yang memuat nilai-nilai *instrumental* dan norma-norma *operasional* untuk diterapkan dalam lembaga ekonomi masyarakat.<sup>12</sup>

Hal ini dikarenakan Islam mempunyai konsep yang berbeda dari konsep ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme, di mana baik hak individu maupun hak umum (kolektif) tidak mutlak tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya dengan membuat hak milik menjadi tugas masyarakat berdasarkan syari'at. Islam memberi pengakuan terhadap hak milik individu, memberi kebebasan, mendorong, mengatur dan melindunginya namun tidak membebaskan tanpa kendali seperti dalam ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Sebaliknya Islam juga mengakui hak milik umum berupa harta yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat seperti : jalan, sungai, tanah suka, barang tambang dan petroleum. Pemilikan umum tersebut, khususnya barang tambang dan petroleum

---

<sup>12</sup> M. Nejatullah Siddiqie, *Pemikiran Ekonomi Islam*, terj. A.M. Saefuddin, (Jakarta; LiPPM kerjasama dengan Media Dakwah, 1986), hal xx. Keaslian dalam ekonomi Islam terletak pada upaya untuk menjadikan moral sebagai titik tolaknya mengenai ekonomi. Hal ini sangat bertentangan dengan moral negara kesejahteraan yang pada umumnya sekuler, yang tidak berorientasi untuk memadukan secara "vertikal" aspirasi material dan spritual manusia. Lihat dalam Syed Nawab Haidar Naqvi, dalam *Ekonomi dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami*, (Bandung; Mizan, 1985), hal. 113.

semata-mata harus menjadi milik negara atau baitul mal dan pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan syari'at.<sup>13</sup>

Maka sangat relevan kiranya jika penulis mengangkat persoalan ini ke permukaan sehingga akan nampak signifikansi yang diharapkan dalam rangka menyikapi permasalahan ekonomi Kapitalisme dan Islam. Namun dalam penelitian ini, penulis menspesifikasi permasalahan pada distribusi pendapatan, yang jika dilihat pada masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat urgen dan rumit dilihat dari keadilan dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusinya, sebab jika tidak maka sebagian besar kekayaan ini akan jatuh ketangan para kapitalis, implikasinya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kekayaan negara tidak mereka nikmati.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Kapitalisme tentang distribusi pendapatan, bahwa seorang individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya agar bisa menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimal dengan menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya, sembari mengingatkan agar tidak membatasi hak individu atas hartanya dengan memberikan (pembagian) harta yang tidak adil.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Al-'Assal, Ahmad Muhammad & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Op. Cit.*, hal. 64-74.

<sup>14</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 92.

Selanjutnya ekonomi Islam dalam hal ini merupakan alternatif (maksud penulis, adalah sistem “terbaik”) cara dalam menerapkan keadilan dalam distribusi, tanpa harus mengganggu jalannya produksi, dan tidak mengorbankan kebebasan individu.<sup>15</sup> Dalam Islam pemeluknya diajarkan untuk hidup kaya, namun memiliki batasan, artinya diseimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif (baca : keadilan ekonomi) sebab al-Qur’an telah memberikan statemen agar “Harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya saja diantara kamu”.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu cukup beralasan kiranya jika dalam penelitian ini, penulis membandingkan prinsip-prinsip ekonomi Kapitalisme dan Islam tentang distribusi pendapatan sehingga diharapkan akan menemukan nuansa baru pemikiran yang komprehensif tentang persoalan tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Bagaimana perbandingan prinsip-prinsip ekonomi Kapitalisme dan Islam tentang distribusi pendapatan?

- a. Bagaimana pembagian distribusi pendapatan dalam ekonomi kapitalisme dan Islam?
- b. Bagaimana pengaruh distribusi pendapatan dalam ekonomi Kapitalisme dan Islam?

---

<sup>15</sup> Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Bandung; PT. Al-Ma’arif, 1985), hal. 304.

<sup>16</sup> QS, Al-Hasyr (59) : 7.

## C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui model pembagian distribusi pendapatan dalam ekonomi kapitalisme dan Islam, juga untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan para pakar terdahulu yang telah membahasnya.
- b. Untuk mengkaji sejauhmana pengaruh distribusi pendapatan dalam ekonomi kapitalisme dan Islam, khususnya pada aspek zakat, infaq, sadaqah dan warisan.

### 2. Signifikansi Penelitian adalah :

- a. Secara teoritis yaitu memberikan kontribusi teoritik tentang distribusi pendapatan dalam ekonomi kapitalisme dan Islam, sehingga diharapkan dapat menemukan sintesa baru pemikiran khususnya dalam aspek ekonomi Islam.
- b. Secara praktis yaitu : mengembangkan ilmu dan proses “Islamisasi” (penerapan nilai-nilai Islam) dalam ilmu dan amal ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemikiran tentang prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme dan Islam tentang distribusi pendapatan dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembagian pendapatan dapat bersifat adil dan merata.

#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, pokok masalah tersebut di atas belum dikaji secara spesifik terutama dengan pendekatan *historis-filosofis*, walaupun dalam beberapa buku telah disinggung akan tetapi dalam tataran global. Seperti dalam buku "*Economic of Islam*" (Comparative Studi), yang ditulis oleh Syaikh Akhmad Mahmud beliau menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Kapitalisme dan Islam tentang distribusi pendapatan, akan tetapi beliau belum menjelaskan latar belakang lahirnya kedua sistem tersebut, dan lebih jauh lagi beliau membahas tentang *kepemilikan*.<sup>17</sup>

Sementara Abdul Mannan dalam bukunya "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*" mengatakan bahwa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan dalam ekonomi Kapitalisme adalah distribusi *perseorangan*, dan hal ini berhubungan dengan faktor-faktor produksi (berupa modal, tenaga kerja, tanah, teknologi dan sumber daya manusia) tetapi dalam ekonomi Islam ada konsep *keadilan*, seterusnya dalam distribusi pendapatan, ada kepemilikan individu dan juga kolektif.<sup>18</sup>

Afzalur Rahman dalam bukunya "*Doktrin Ekonomi Islam*", menjelaskan bahwa distribusi pendapatan dalam ekonomi Kapitalisme adalah seorang individu memiliki hak sepenuhnya atas hartanya juga dalam pendistribusiannya harus dengan adil. Sementara dalam ekonomi

<sup>17</sup> Syaikh Mahmud Ahkmad, *Economic of Islam*, (Comparative Studi), Edisi I, (Lahore, Pakistan; Ashraf Press, 1947), hal. 46.

<sup>18</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 113.

Islam mengambil jalan tengah (dan menurut penulis pengertian *jalan tengah* adalah ekonomi Islam memiliki konsep yang *mandiri* dan mempunyai perbedaan yang esensial dari sistem ekonomi yang lainnya) untuk menegakkan keadilan, di mana memberikan kebebasan atas *milik pribadi* secara individual, prinsip utama dari sistem ini adalah *peningkatan dan pembagian hasil* (mudharabah) kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan.<sup>19</sup>

Adapun Taqyuddin An Nabhani<sup>20</sup> dalam bukunya “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*”, menyatakan bahwa menurut ekonomi kapitalisme, cara (metode) yang paling ideal untuk mendistribusikan kekayaan kepada anggota masyarakat adalah cara yang harus bisa menjamin tercapainya tingkat produksi setinggi-tingginya. Dan untuk menjadikan harga sebagai penentu distribusi, sistem ini mengukuhkan bahwa orang berhak hidup hanyalah orang yang mampu memberikan andil (saham) untuk menghasilkan barang dan jasa.

Namun jika pada konsep ekonomi Islam, di mana kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah di alam dan manusia menguasainya sebagai amanat-Nya, yang berarti mengindikasikan pada kepemilikan kekayaan secara kolektif. Karenanya, dukungan tak bersyarat kepada pranata kekayaan pribadi, yang menjadi tolak ukur ekonomi kapitalisme, tak bergema dalam pemikiran Islami. Sebab kebebasan tanpa batas atas

---

<sup>19</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 93.

<sup>20</sup> Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), hal. 25-26.

kekayaan pribadi hanya menyisakan ruangan yang sempit bagi kebebasan manusia dengan membebankan tanggung jawab sosial yang sangat ringan kepada kaum kaya dengan mengorbankan kaum miskin. Berangkat dari persoalan inilah sebenarnya merupakan asas (dasar) dalam memanfaatkan barang-barang tersebut (yang diciptakan Allah). Sehingga anggapan bahwa manfaat tersebut semata-mata sebagai hasil jerih payah tertentu adalah keliru dan juga bertentangan dengan kekayaan.

Walaupun di antara buku-buku tersebut sudah ada yang membahas tentang prinsip ekonomi Kapitalisme dan Islam tentang distribusi pendapatan, tetapi masih terdapat sisi yang perlu dipertegas sehingga pemahaman kita tidak parsial dalam mencari landasan kedua sistem tersebut.

Kendatipun harus disadari bahwa minimnya literatur yang berkenaan dengan distribusi pendapatan (baca: dalam ekonomi kapitalisme), maka diskripsi dalam penelitian ini tentu saja masih terbatas pada tataran *filosofis-normatif* dan *diskriptif-ilustratif*. Sebab untuk dapat menemukan bentuk atau sampai pada tataran *empirik-induktif* masih perlu dilakukan pengkajian secara mendalam tentang berbagai teori yang terkait. Melalui kajian *filosofis-normatif* inilah agar dapat menggugah kita untuk membentuk “teori baru” atau minimal mengembang teori yang sudah ada atau mungkin “mengevaluasi” kebijakan teori yang ada.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian naskah yang diperoleh melalui sumber literatur (library research) yaitu kajian literatur yang melalui riset kepustakaan. Oleh sebab itu ada dua sumber pokok yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun *sumber primer* yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber yang fungsinya menunjang data/sumber primer yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul tersebut.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan data-data kepustakaan ini, yaitu mencari prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dan Islam tentang distribusi pendapatan, maka pendekatannya adalah *historis-filosofis*. Pada hakikatnya pendekatan ini terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep. Yang dimaksud dengan *analisis linguistik* yaitu untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan *analisis konsep* untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan ; Sistem dan Metode*, (Yogyakarta; FK-FKIP, 1987), hal. 85.

### 3. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :*diskriptif, komparatif dan analitis.*

Dengan **metode diskriptif** dimaksudkan untuk menemukan prinsip/pandangan kedua sistem tersebut (ekonomi kapitalisme dan Islam) yang berkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan. Dalam hal ini kedua sistem ekonomi di atas dipaparkan sebagaimana adanya, untuk memahami jalan pikiran kedua sistem itu secara komprehensif.

Sedangkan dengan **metode komparatif** dimaksudkan untuk membandingkan prinsip-prinsip ekonomi Kapitalisme dan Islam tentang distribusi pendapatan, sehingga dapat diketahui ada/tidaknya persamaan dan perbedaan prinsip-prinsip ekonomi Kapitalisme dan Islam tersebut dalam distribusi pendapatan. Adapun bentuk komparasi yang akan digunakan di sini adalah **komparasi simetris** yaitu perbandingan dilakukan setelah masing-masing pandangan (prinsip-prinsip) diuraikan secara lengkap, dan masalah-masalah yang dibandingkan menyangkut perumusan masalah, cara pendekatan dan argumentasi yang digunakan.

Selanjutnya dengan metode **analisis-sintesis**, penulis berusaha mencari kelebihan dan kekurangan prinsip-prinsip ekonomi Kapitalisme dan Islam untuk menemukan rumusan-rumusan baru yang lebih

sempurna/valid dan relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian (khususnya pemikiran tentang prinsip ekonomi kapitalis dan Islam tentang distribusi pendapatan). Untuk itu tentunya akan digunakan bentuk *penalaran induktif "aposteriori"*, yaitu masalah yang diketahui (dilihat, diselidiki) keadaan yang sebenarnya, dan bentuk penalaran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah umum

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini menurut Bogdan dan Biklen dimaksudkan sebagai pengambilan sampel internal (*internal sampling*) yang berarti keputusan yang diambil pada saat peneliti mempunyai suatu pemikiran umum tentang jumlah dokumen serta variasinya yang akan direview, dengan siapa akan berbicara dan kapan akan melakukan observasi.<sup>22</sup>

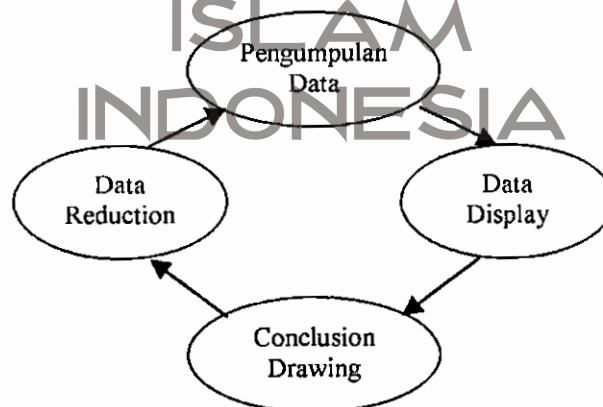
Selanjutnya data primer tersebut dilakukan dengan mengumpulkan pokok pikiran yang ada pada ekonomi Kapitalisme dan ekonomi Islam yang bisa dikategorikan berkaitan langsung dengan ide dasar (bernuansa filosofis), ide cabang (dalam kerangka sistem ekonomi). Untuk mengumpulkan data-data skunder dilakukan dengan mencari pokok pikiran yang ditulis oleh para pemikir (tokoh ekonomi

Kapitalisme dan Islam) dalam buku-buku, majalah, surat kabar, dan lain-lainnya terutama yang berkaitan dengan model penerapan ekonomi Kapitalisme dan ekonomi Islam tentang distribusi pendapatan.

#### 5. Teknik dan Model Analisis

Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis setidaknya-tidaknya ada tiga komponen pokok yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu: ***data reduction, data display dan conclusion drawing***. Tiga komponen analisis ini ber'aku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut model analisis mengalir (***flow model analysis***).

Tiga komponen analisis tersebut dapat dilakukan adanya interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Untuk lebih jelasnya model ini dapat dilihat pada gambar:



Gambar: Model Analisis Data<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Robert. C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research For Education; An Introduction to Theory and Methods*, (Boston; Alhan and Bacon, 1982), hal. 30.

<sup>23</sup> Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Praktis*, (Surakarta; Pusat Penelitian UNS, 1988), hal. 22.

Selanjutnya penelitian tentang atau bersifat pemikiran pada dasarnya tidak terlepas dari pendekatan filosofis. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pendekatan filosofis pada hakikatnya terdiri dari *analisis linguistik* dan *analisis konsep*.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### DISKRIPSI UMUM TENTANG EKONOMI KAPITALISME

#### DAN ISLAM

##### A. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Kapitalisme

###### 1. Lahirnya Istilah Kapitalisme dan Ekonomi Kapitalisme

Dalam *Encyclopedia Britannica*, Kapitalisme dapat dideskripsikan secara paling ringkas sebagai kekayaan yang digunakan dalam memproduksi lebih banyak kekayaan dan Kapitalisme itu sendiri adalah sistem yang mengarahkan “proses itu”. Istilah tersebut berasal-usul

---

<sup>1</sup> Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic Of Islam*, (Comparative Study), Edisi I, (Lahore, Pakistan; Ashraf Press, 1947), hal.1. Lebih lanjut menurut Drs. H. Munrahim Misanam, MA., Ec., Ph. D. dalam Mata Kuliah *Filsafat Ekonomi Islam*, pada tanggal: 24-9-1999, dikatakan bahwa sejarah lahirnya *Kapitalisme* adalah berawal dari adanya reaksi terhadap gereja dan penolakan terhadap semua yang berbau agama, sehingga memunculkan paham *materialisme dan determinisme* selanjutnya hilangnya kontrol moral dan pada akhirnya menimbulkan nilai-nilai *hedonisme* dalam bentuk *utility maximization* dalam konsumsi dan *profit maximization* dalam berproduksi dan faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah *harga barang dan anggaran* dan puncaknya tetap tidak adanya *moral remedial* (atau jika diistilahkan dengan bahasa Islam ketiadaan *norma, etika ataupun akhlak*). Namun untuk mengetahui lebih lanjut cikal bakal lahirnya ilmu ekonomi serta sinkronisasinya dengan istilah kapitalisme dan ekonomi kapitalisme, ada baiknya diingat bahwa ilmu ekonomi dianggap lahir pada tahun 1776 ketika terbit buku *The Wealth of Nation*. Akan tetapi benih-benih ilmu ini-berupa pikiran-pikiran yang tertuang dalam karangan-karangan lain sebelum terbitnya karya Adam Smith itu – sudah bermunculan sebelumnya, yakni pada penghujung “abad pencerahan” (renaissance age). Moral ilmu ini tak pelak lagi adalah moral masa pencerahan, manakala para pemikir barat sedang gigit-gigitnya menganut sekularisme untuk memisahkan kehidupan kenegaraan (pemerintah) dari kehidupan keagamaan (gereja). Catatan sejarah filsafat menunjukkan bahwa sekularisme itu muncul karena pihak gereja terlalu dogmatis, bersamaan dengan itu juga *hipokrit*. Masyarakat merasa terjajah oleh agama sehingga lantas melakukan penentangan dalam bentuk pemisahan kehidupan keduniaan dari kehidupan keakhiratan. Tetapi terlepas dari masalah siapa sumber kesalahan sehingga masyarakat barat ketika itu terpaksa harus pencerahkan diri, adalah jelas bahwa ilmu ekonomi yang cikal bakalnya sudah ada sejak penghujung abad pencerahan itu tidak bebas nilai. Teori-teori dan konsep-konsepnya niscaya sarat akan nilai-nilai moral masa pencerahan. Oleh karenanya tidaklah berlebihan untuk mempertanyakan relevansi ilmu ekonomi yang tersusupi nilai moral masa pencerahan itu pada masyarakat yang tidak pernah terjajah oleh agama.

sosialistik, yang mulai timbul pada paruh kedua abad ke-19 dan juga menunjukkan proses pengorganisasian produksi atau perdagangan di seluruh dunia dengan basis *individualistik*, *sekularistik* dan *materialistik*. Orang-orang dengan bantuan kekayaan yang terakumulasi sebelumnya, tetapi lebih sering dengan menggunakan uang yang dipinjam dengan bunga, memburu laba dan kekayaan bagi diri mereka sendiri dengan mempergunakan sejumlah besar tenaga manusia dengan imbalan upah.<sup>2</sup>

Lebih jauh lagi kegiatan usaha (enterprise) individual adalah **napas dari Kapitalisme**. Ia memungkinkan kebebasan mutlak untuk memilih salah satu dari ribuan lowongan sebagai upaya produktif atau komersial, untuk memilih lokasi guna mempekerjakan kualitas agen-agen produksi dan pasar bagi hasil produksinya, juga metode (sistem) untuk menjualnya seperti yang diinginkan. Elemen Kapitalisme ini telah dikritik secara tajam oleh para *sosialis* dan *fasis* dari sudut pandang mereka masing-masing. Kaum sosialis terganggu oleh eksploitasi besar-besaran yang dimungkinkan oleh kapitalisme individualistik. Kaum fasis mencemooh pemborosan dan ketiadaan perencanaannya.

---

(Selanjutnya baca dalam Dumairy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, disampaikan pada Kuliah Umum Peserta Baru Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta, 22 September 1998, hal. 8-9.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Akan tetapi, eksperimen-eksperimen sosialis dan fasis mengungkapkan bahwa baik nasionalisasi dan perencanaan menimbulkan sejumlah besar penindasan manusia. Kelemahan riil dari sistem kapitalis tidak ditunjukkan oleh keduanya. Penekanan keduanya pada eksploitasi dan ketiadaan perencanaan telah mendorong penghapusan keduanya ini dalam bentuk-bentuk kapitalisme selanjutnya, yang dicontohkan oleh New Deal dan Beveridge Scheme. Namun cacat dasar Kapitalisme tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda tersembuhkan dan serangan itu tidak diarahkan pada titik lemah Kapitalisme.

Maka sesungguhnya secara historis perkembangan Kapitalisme merupakan bagian dari gerakan *individualisme*.<sup>3</sup> Gerakan itu juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain, seperti dalam bidang keagamaan yang menimbulkan reformasi; dalam bidang penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam; dan dalam hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial; serta dalam ilmu ekonomi melahirkan

---

<sup>3</sup> *Individualisme* sebagai suatu strategi filosofis pada organisasi ekonomi sesungguhnya tidak dapat memimpin pada suatu masyarakat ekonomi yang maju dan harmonis, malahan ia dapat berkontribusi sejumlah problem-problem ekonomi antara lain : *Pertama*, ia dapat menggiring pada praktek-praktek eksploitasi oleh mereka yang ada pada posisi kuat dalam masyarakat dan ini akan menyebabkan konflik di masyarakat. *Kedua*, ia akan berkontribusi alokasi yang salah terhadap sumber-sumber ekonomi di negara tersebut. *Ketiga*, penggunaan sumber-sumber ini dengan unit-unit pabrik dapat menimbulkan problem pada ekologi. Karena pada dasarnya individualisme tidak mempertimbangkan sifat dasar manusia, dimana manusia bukan hanya makhluk *individu* tapi juga *kolektif* sehingga seharusnya saling bergantung dan saling membutuhkan demi penyempurnaan makna hidup. Selanjutnya baca pada buku *Islam And Justice*, pada tulisan Nik Mustapha Hj. Nik Hassan, halaman. 60.

sistem *Kapitalisme*.<sup>4</sup> Karena itu peradaban Kapitalisme sah (legitimate) adanya. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa Kapitalisme merupakan *sistem sosial dan ekonomi yang komprehensif*, lebih dari hanya sekedar tipe tertentu dari perekonomian. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad ke-18 dan selanjutnya menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara.<sup>5</sup> Selanjutnya di Amerika lahirnya kapitalisme berhubungan dengan banyaknya/melimpahnya material terhadap kemajuan peradaban industri dengan tingginya sistem dinamika kelas dalam demokrasi politik dengan pola/aturan-aturan kultural, (contohnya: individualisme); di mana masing-masing bisa dilihat sebagai perbedaan dalam perencanaan ekonomi.<sup>6</sup>

Sementara sebagian orang mengatakan bahwa semangat Kapitalisme sering disalahtafsirkan dengan pengertian: “hasrat untuk

<sup>4</sup> William Eberstein, Edwin Focelma dan Alex Jemadu, (dkk), Alih Bahasa Alex Jemadu, *Isme-isme Dewasa Ini*, Edisi IX, ( Jakarta, Erlangga Press, 1994), hal. 148.

<sup>5</sup> *Ibid*. Dalam bukunya *Mitos Pribumi Mālas, Citra Orang Jawa , Melayu dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial*, S.H. Alatas menyatakan bahwa tahapan kapitalisme menurut pandangan Eropa diperoleh melalui sejarah Eropa : Tahap *pertama*, kapitalisme komersial di hubungkan dengan penemuan geografis, kolonisasi dan peningkatan dalam perdagangan luar negeri. Saat ini kapitalis-kapitalis pemula dilindungi oleh pemerintah, yang dimulai pada tahun 1750. Tahap *kedua*, kapitalisme industri terwujud karena pemakaian sumber-sumber energi bagi mesin - mesin untuk pengolahan dan pertumbuhan kekayaan yang cepat. Esensi dari Kapitalisme ini menghasilkan profit (keuntungan) dari proses pengolahan tersebut. Di pertengahan abad ke- 19 mencapai puncaknya, dengan pabrik-pabrik yang besar dan pemusatan modal ditangan kelas menengah. Namun pada akhir dasawarsa abad ke-19, tatkala pengawasan akhir dan arah industri beralih ketangan pemodal, kapitalisme menjadi *Kapitalisme finansial* sebagai tahapan *ketiga*, pembentukan perusahaan-perusahaan industri raksasa dan pemilikan serta menejemen kekayaan oleh kelompok yang benar-benar terpisah dari produksi, merupakan ciri pokok dari tahapan ini.

<sup>6</sup> Peter. L. Berger, *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition a bout Prosperitty, Equality and Liberty*, (United States of America, 1986), hal. 3.

memiliki sebanyak-banyaknya, khususnya uang”. Werner Sombart dalam bukunya *Des Moderne Kapitalismus*,<sup>7</sup> yang versi pertamanya telah diterbitkan pada tahun 1902, mengatakan bahwa Kapitalisme mempunyai tiga aspek yaitu: semangat, bentuk dan teknologi. Semangat itu diimplementasikan pada hasrat memiliki, persaingan dan rasionalitas. Bagi Weber, semangat “keserakahan tidak terbatas” tidak ada sama sekali kaitannya dengan Kapitalisme, bahkan Kapitalisme sering identik dengan sikap menahan diri dan sikap atau tempramen yang terkendali. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kapitalisme identik dengan upaya mencari keuntungan melalui kegiatan usaha kapitalistis yang rasional dan berkelanjutan. Lebih lanjut dia mendefinisikan “tindakan kapitalistis” sebagai usaha yang bertumpu pada harapan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan pertukaran atau perdagangan.<sup>8</sup> Menurut Weber keadaannya haruslah demikian, sebab dalam suatu tata masyarakat yang sama sekali kapitalistis, perusahaan kapitalis individual yang tidak dapat memanfaatkan kesempatannya untuk menciptakan keuntungan, akan membentur kematian.<sup>9</sup>

Adanya keyakinan kita akan eksistensi Kapitalisme seperti itu diarahkan tidak hanya oleh keabsahannya tetapi juga oleh kepentingan

---

<sup>7</sup> Robert W. Green, *Protestantism and Capitalism*, The Weber Thesis and His Critics (D. C. Heat And Company, New York) hal. VII.

<sup>8</sup> Werner Sombart, “Capitalism”, dimuat dalam *Encyclopedia of the Sosial Sciences*, vol. 3-4. hal. 196.

historis. Maka di mana pun tidak ada kenyataan sejarah dan kultural diungkapkan dengan lebih jelas, dibandingkan konsep lompatan Barat tentang sejarah Kapitalisme. Adapun konsep *Fanfani* mengenai ciri-ciri pokok Kapitalisme berasal dari sejarah Eropa; dan ini muncul di kota-kota Italia pada abad ke-14, jika tidak lebih awal, dan tempat-tempat lain di Eropa. Maka G.G. Well berkata bahwa Kapitalisme adalah “sesuatu yang tidak dapat didefinisikan (selanjutnya mengalami dinamisasi tersendiri dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dan sejarah dan perdebatan dalam memahaminya dan menginterpretasikannya terus berlangsung hingga sekarang) tetapi pada umumnya kita menyebutnya sebagai sistem Kapitalisme yang berarti suatu kompleks kebiasaan tradisional, perolehan energi yang tak terkendalikan dan kesempatan jahat serta pemborosan hidup”.<sup>10</sup> Pernyataan ini diperkuat oleh Syed Nawab Haidar Naqvi yang penulis kutip dari bukunya *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islam*<sup>11</sup> menjelaskan bahwa Kapitalisme diartikan “suatu pencarian kekayaan yang ngotot dan tak terbatas melalui industrilisasi yang tak kenal lelah, pembatasan yang kaku atas pembelanjaan untuk konsumsi pribadi atau sosial, pemusatan waktu untuk mengurus usaha pribadi, eksploitasi yang sistematis dan tanpa

---

<sup>9</sup> Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (Tr. Talcott Parson, Charles Scribner, New York; 1958), hal. 17.

<sup>10</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.310.

ampun terhadap buruh. Namun dalam memberikan batasan tentang *Kapitalisme*, para sosiolog dan sejarawan mengatakan: "Pada hakikatnya semua orang sepakat (dari sekian banyak definisi tentang Kapitalisme) bahwa Kapitalisme adalah suatu sistem yang menganggap *modal* adalah *utama, tenaga kerja bebas, disertai dengan persaingan yang tidak terkendalikan (persaingan bebas), kredit yang meluas, bank-bank makmur, industri besar dan pasaran dunia menjadi satu.*"<sup>12</sup>

Berangkat dari masalah di atas, maka Kapitalisme bukanlah hanya sekedar *instrumen/alat*; tetapi juga konsep terhadap alasan historis dan tidak sulit untuk merekonstruksinya sehingga kapitalisme didefinisikan sebagai cara yang sudah termasuk penilaian tentang sistem ekonomi di mana beberapa tenaga kerja dieksploitasi terhadap yang lain dan sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme<sup>13</sup>

Pada bagian lain Max Weber mendefinisikan *Kapitalisme* sebagai aktifitas ekonomi yang diorientasikan terhadap pasar dan perlengkapan untuk menghasilkan keuntungan dari pasar. Jelasnya semua aktifitas

<sup>11</sup> Syed Nawab Baqir Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, Alih Bahasa Husin Anis, (Bandung; Mizan, 1985), hal. 13.

<sup>12</sup> Amintore Fanfani, *Catholicism, Protestantism and Capitalism*, (Sheed and Ward, London; 1938) hal. 30-31.

<sup>13</sup> Peter.L.Berger, *Op. Cit*, hal.3. Bandingkan dengan Hendro Basuki, "Kapitalisme dan Hati Nurani", *Suara Merdeka* (No. 340/XLI/VI) hal-9. Dan Syed Nawab Haidar Naqvi mengungkapkan bahwa istilah Kapitalisme merupakan suatu istilah yang luas meliputi : (1) cara produksi kapitalistis, (2) kerangka sosio-ekonomi kapitalistis, dan (3) mentalitas kapitalistis. Sebab lanjutnya bahwa pada pokoknya, kesemuanya ini hanyalah merupakan tiga segi dari gejala yang sama. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan bahwa salah satu atau dua anasir ini juga dapat ditemui

hanya merupakan bagian kecil dari ekonomi secara keseluruhan. Lebih jauh lagi Weber berpendapat bahwa kata-kata kapitalisme diaplikasikan pada situasi di mana persyaratan-persyaratan ekonomi masyarakat/kelompok sangat menonjol.<sup>14</sup>

## 2. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kapitalisme

Pada dasarnya perjalanan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari bumi Eropa, tempat lahir dan berkembangnya kapitalisme tahun 1648 (tahun perjanjian *Westphalia*) dipandang sebagai tahun lahirnya negara modern. Perjanjian tersebut mengakhiri perang tiga puluh tahun (antara Katholik dan Protestan di Eropa) dan menetapkan negara mereka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan gereja Katholik Roma. Inilah awal munculnya *sekularisme*, sejak itu aturan main kehidupan dipisahkan dari gereja (yang menurut mereka wakil Tuhan), dengan anggapan bahwa negara itu sendiri yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan rakyatnya sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupan, sementara Tuhan (agama) diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja (hubungan manusia dengan Tuhan). Sehingga prinsip dasar sekuler tersebut adalah menempatkan manusia (negara/kerajaan) sebagai pembuat

---

dalam sistem non kapitalistis. Selanjutnya baca dalam Syed Nawab Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1985), hal. 113.

peraturan/hukum. Permasalahan berikutnya adalah siapa yang wewenang pembuat aturan yang menjamin terciptanya kehidupan yang damai, tentram dan stabil. Kenyataannya Eropa sampai abad ke-19 merupakan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh kaisar, raja dan para bangsawan (aristokrat). Sampai pada masa itu, peran politik rakyat sangatlah minim bahkan tidak ada. Rakyat secara prinsip patuh pada raja dan undang-undang yang dibuat oleh raja, tanpa melibatkan diri dalam proses politik (*decesion making*), dan ternyata raja selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya secara adil dan menyeluruh.

Sedangkan An-Nabhani dalam bukunya *Nidzom Al-Islam* menerangkan bahwa penamaan ideologi ini dengan nama Kapitalisme, berawal pada kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia yang menjadikan agama sebagai alat pemereras, penganiaya dan penghisap darah rakyat. Sementara para pemuka agama pada waktu itu dijadikan sebagai perisai untuk memenuhi keinginan mereka. Dari kondisi seperti itu, maka selanjutnya menimbulkan pergolakan sengit, yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan yang mana sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak sedangkan sebagian lagi mengakui adanya agama tetapi menyerukan agar agama dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan lebih cenderung memilih ide yang memisahkan

agama dari kehidupan, yang selanjutnya menghasilkan usaha pemisahan agama dan dunia. Disepakati juga pendapat untuk tidak mempersoalkan agama, dilihat dari apakah diakui/ditolak, sebab yang menjadi masalah adalah agama harus dipisahkan dari kehidupan dunia.<sup>15</sup>

Walaupun demikian, Kapitalisme saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai hanya sebuah “isme” biasa atau sebuah pemikiran filsafat belaka, bahkan tidak bisa juga hanya dikatakan sebuah teori ekonomi, akan tetapi Kapitalisme telah menjadi sebuah ideologi dunia yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh dan sistemik.<sup>16</sup> Lebih lanjut Lester C. Thurow dalam bukunya :<sup>17</sup>

“Since the omzet of industrial revolution, when success come to be difined as rising material standards of living, no economic system other than capitalism has been made to work any where. No one know how to run successful economics on any other principles. The market, and the market alone, rules and no one doubts it. Capitalism alone taps into modern beliefs about individuality and exploits what some would consider the basic human motives, greed and self-interest, to produce rising standards of living. When it comes to creating to the wants, and desires of every individual, no matter”.

---

<sup>15</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Nidzom Al-Islam*, (Beirut; Libanon: Daarul Ummah, 1953), Cet. V), hal. 25.

<sup>16</sup> Para ilmuwan sepakat bahwa Kapitalisme merupakan sebuah “revolusi” yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini Kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi; Kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi yang muncul pada bagian terakhir abad pertengahan dan kemudian mencerminkan suatu “gaya hidup”. Selanjutnya baca dalam Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme; Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, (Bandung; Remaja Karya, 1986), hal. 33.

<sup>17</sup> Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, (London: Nicholas Brearley Publishing, 1996), hal. 17.

Pada dasarnya memperoleh ilustrasi tentang manifestasi Kapitalisme sangatlah diperlukan menurut interpretasi berbagai pengamat, walaupun mereka berbeda dalam teori. Seperti : *Mandel* yang melihat kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi. Hal ini berbeda dengan pandangan lain yang membagi tahapan kapitalisme dari “Kapitalisme Kompetitif” menuju “Kapitalisme Monopoli” dan selanjutnya memasuki tahapan “Kapitalisme Negara Monopoli”, maka *Mandel* melihat perubahan-perubahan dalam sistem Kapitalisme dari gerak kapital dan perwujudan akumulasi kapital yang kini, pada tahap Kapitalisme murah, menurutnya dikendalikan melalui sistem perusahaan multinasional.<sup>18</sup>

Namun pada dasarnya sejarah kapitalisme itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Michel Beand, tidak hanya mengandung kapasitas destruktif tetapi juga sebagaimana yang terjadi di Indonesia *selama lima belas tahun terakhir*, di Eropa dan Amerika Utara, di Jepang dan Korea Selatan atau Singapura telah mendemonstrasikan kapasitas kreatifnya, tidak saja dalam menyediakan kebutuhan material dan kenyamanan, tetapi juga dalam mendinamisasikan kondisi kebudayaan dan spiritual.

Sebagai contoh di Indonesia, setelah diterapkan kebijakan pemerintah dengan paket regulasi perbankan yang telah berlangsung sejak

---

<sup>18</sup> M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (Jakarta ; LP3ES, 1987), hal. XI.

tahun 1983 dan dilanjutkan dengan lebih intens lagi dari tahun 1988 sampai 1991, telah menghasilkan apa yang disebut pendalaman finansial. Pendalaman finansial ini biasanya dihitung secara kuantitatif dengan membagi uang yang beredar dalam arti luas dengan PDB dari tahun 1978-1991 telah terjadi peningkatan pendalaman finansial yaitu dari tahun 1978 rasio antara uang beredar (dalam arti luas) terhadap PDB hanya 15,7%, sedangkan pada tahun 1991 meningkat menjadi 43,6%.<sup>19</sup>

Gambaran besarnya peningkatan jumlah uang yang beredar di Indonesia akibat deregulasi tersebut, pada tahun 1983 yaitu sebanyak Rp 7.569 Milyar, tahun 1995 meningkat menjadi Rp 52.677 Milyar, sehingga rata-rata tiap tahun dalam periode tersebut telah terjadi peningkatan uang yang beredar sebesar Rp 17,55%. Adapun pengaruh kebijakan deregulasi di sektor perbankan yang paling dominan terhadap jumlah uang yang beredar pada tahun 1989, meningkat sebesar 39,52%, pada tahun 1992 sebanyak 28.779 Milyar, sehingga dalam tiga tahun terakhir sejak 1992-1995 telah terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar sebesar 23.848 Milyar atau 83.04%. Maka secara institusional lembaga perbankan tersebut juga meningkat menjadi 5.739 kantor bank pada pertengahan tahun 1993.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sjahrir, *Persoalan Ekonomi Indonesia, Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran*, (Jakarta; Sinar Harapan, 1995), Cet. V, hal. 95.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 96-97.

Andre Gunder Frank dalam *Journal of International Study* mendiskripsikan bahwa 30 negara maju di Barat yang berpenduduk kurang dari 20% penduduk dunia pada tahun 2000 akan menguasai 90 pendapatan dunia, sumber keuangan, produksi baja, produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan 8 negara di antaranya menguasai 80% produk manufaktur dunia. Rinciannya adalah Jerman 21%, AS 17%, Jepang 14%, Inggris, Prancis, Itali masing-masing 8% dan Kanada 40%. Menurut prediksi Bank Dunia, total pendapatan dunia tahun 2002 mencapai 45 triliun US Dollar, dengan kenaikan rata-rata 213 Milyar US Dollar. Dari jumlah itu 66% diraih oleh negara maju Blok Utara, sementara Blok Selatan malah akan merugi 1,9 Milyar US Dollar.<sup>21</sup>

Sesungguhnya jika suatu paham ingin dikatakan memiliki ciri Kapitalisme adalah<sup>22</sup> : a) menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat, produksi maksimum dan pemuasan “keinginan” individu sebagai sesuatu yang penting untuk kesejahteraan manusia; b) menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi, memiliki dan mengatur kepemilikan pribadi sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu;<sup>23</sup> c) mengasumsikan inisiatif individu

---

<sup>21</sup> Ismail Yusanto, *Islam Ideologi – Refleksi Cendekiawan Muda*, (Alizzah, Bangil, 1998), Cet. I, hal. 175.

<sup>22</sup> M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, (Surabaya ; Risalah Gusti, 1999 ), hal. 18.

<sup>23</sup> Oleh sebab itu *kapitalisme* menjadi sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan setiap individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan

bersama dengan *face decision* (pengambilan keputusan) yang terdesentralisasi dalam operasi pasar bebas sebagai syarat untuk mewujudkan efisiensi optimum pengalokasian sumberdaya; d) tidak mengakui perlunya peranan penting pemerintah atau pertimbangan – pertimbangan nilai kolektif baik dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi dan e) mengklaim bahwa pemenuhan kepentingan pribadi oleh *semua individu* secara otomatis memenuhi *kepentingan sosial*.

Hal ini berarti pencarian keuntungan sendiri tersebut secara alamiah, akan selalu mendorongnya untuk lebih memilih lapangan kerja yang paling “menguntungkan bagi masyarakat”, tetapi dengan mengarahkan industri seperti ini mungkin hasilnya memiliki nilai terbesar; seperti dalam banyak hal lain sistem ini dikendalikan oleh suatu tangan tak terlihat untuk mendorong tujuan yang bukan merupakan bagian dari maksudnya, namun tidak juga selalu merupakan keburukan bagi masyarakat karena masyarakat bukan bagian dari maksudnya itu. Jadi dengan memburu kepentingannya sendiri berarti mendukung kepentingan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan bila sungguh-sungguh bermaksud mendorongnya.

---

keinginannya. Ini diakibatkan karena “hukum-hukum” ekonomi pasar seperti hukum-hukum fisika yang absah secara obyektif, maka keberhasilan atau kegagalannya tidak seyogyanya dinilai dengan kekurangan dan kemiskinan bagi mereka yang ketinggalan dalam perjuangan demi kebelangsungan hidup. Lebih jauh setiap orang adalah hakim yang terbaik untuk kepentingannya sendiri dan jika dibiarkan sendirian, tidak hanya akan menjadikan dirinya baik tetapi juga dalam jangka panjang akan menjadikan baik

Walaupun kemudian istilah itu oleh para ahli teori sosial dianggap sebagai *isme* atau *sistem pemikiran*, namun kapitalisme<sup>24</sup> bukanlah suatu paham yang dipropagandakan oleh orang-orang yang dianggap pendukungnya. Bahkan pada awal abad XX, ketika Kapitalisme - sebagai suatu tahapan perkembangan, namun ekonom terkemuka seperti : Charles Gide, Canvas, Marshall, Seligman atau Cassel – boleh dikatakan mengutuk/menganggapnya sebagai istilah terlarang, yang tidak boleh dipakai dalam pembahasan ilmu ekonomi.<sup>25</sup> Sebab istilah “Kapitalisme” mengandung arti yang berbeda dan bersumber dari berbagai teori, antara lain diartikan sebagai sistem pemikiran yang berpretensi netral; sebagai tahapan sejarah yang dialami oleh masyarakat; juga sebagai suatu paham yang diperjuangkan atau ditentang.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap keberadaan Kapitalisme sebagai sistem ekonomi, maka penulis ingin mengkaji langsung aplikasi praktis tentang penerapan Kapitalisme dengan mencontohkan penerapannya di Amerika. Banyak ekonom menyebutkan bahwa puncak sentral pelaksanaan Kapitalisme ada di Amerika, hal itu nampak pada

---

semua orang. Untuk lebih jelasnya baca dalam Umer Chapra, dalam *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, hal. 37.

<sup>24</sup> Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri ,dimana Kapitalisme mempunyai keagalannya pada masa lampau dan kita harus mencegah hal tersebut terulang kembali, namun terlepas dari kekurangan-kekurangan itu bahwa Kapitalisme telah menjadi sistem perekonomian “unggulan”. Untuk lebih jelasnya baca bukunya Rich Devos, dalam *Compassionate Capitalism*, (Kapitalisme Dengan Kepedulian Sosial), (Jakarta ;PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 6.

<sup>25</sup> M. Dawam Raharjo, (Ed), *Op . Cit*, hal. IX.

perusahaan yang bebas, persaingan dalam bisnis, menganggap gelar/derajat kebebasan adalah hak azazi dan meminimalisir campur tangan pemerintah dalam bisnis pribadi, kemajuan mereka dalam hal ini karena mengacu pada teori dan kebijakan *laissez faire/laissez passer*.<sup>26</sup>

Adam Smith sebagai pelopor/tokoh aliran Kapitalisme ini, dalam bukunya “*An Inquiry Into the Nature and Causes of Wealth of Nation*” beranggapan bahwa segala sesuatu merupakan perintah alam, kaitannya dengan konsep *laissez faire* Kapitalisme, di mana pemerintah seharusnya menerapkan hukum yang netral yaitu dengan memiliki rasa hormat terhadap alam dalam menjalankan produksi dan bisnis. Bisnis seharusnya diikuti dengan aturan itu sendiri, menurut *hukum alam*.<sup>27</sup> Walaupun telah

<sup>26</sup> James Harvey Dodd, C. W. Hasek, *Economic Principles and Application*, South Western, (New York Publishing Company, 1948), hal. 41. Menurut J. Barkley Rosser, Jr., Marina V. Rosser, dalam bukunya *Comparative Economics In A Transforming World Economy*, pada hal. 14, mengatakan yang di maksud dengan terminologi *laissez faire* adalah pandangan yang menyatakan minimnya intervensi pemerintah dan dalam istilah Francis diartikan dengan “biarkanlah mereka melakukan itu”.

<sup>27</sup> *Ibid* Selanjutnya tulis Adam Smith “Setiap individu”, secara kontinyu mendorong dirinya untuk mencari lapangan kerja yang paling menguntungkan untuk mendapatkan berapapun kapital yang dapat ia kuasai, yang dicari adalah keuntungan untuk diri sendiri bukan keuntungan masyarakat. Tetapi pencarian keuntungan sendiri tersebut secara alamiah, atau selalu menggiringnya untuk memilih lapangan kerja yang paling menguntungkan bagi masyarakat... Dan hal ini dikendalikan oleh suatu tangan tak terlihat yang mendorong suatu tujuan yang bukan bagian dari maksudnya. Tetapi tidak juga selalu merupakan keburukan bagi masyarakat bahwa masyarakat bukan bagian dari maksudnya itu. Dengan memburu kepentingannya sendiri ia seringkali mendukung kepentingan masyarakat secara lebih efektif ketimbang bila ia sungguh-sungguh bermaksud mendorongnya”. Lebih jauh lagi baca buku Shaikh Mahmud Ahmad dalam *Economics Of Islam*, hal. 4. Lebih lanjut Adam Smith dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa: “Bukan berkat kemurahan hati tukang daging, tukang pembuat bir atau tukang rorti kita dapat makan siang, akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Kita berbicara bukan kepada rasa kemanusiaan mereka melainkan cinta mereka kepada diri mereka sendiri, dan janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-

begitu banyak mengalami perubahan, ternyata teori Smit-lah yang sampai kini mendasari perkembangan ilmu ekonomi liberal yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya Kapitalisme yang telah mulai berjangkit sejak revolusi Industri, dan makin berkembang dengan penemuan-penemuan Smith pada suatu masa dalam sejarahnya telah melahirkan “anak haram”-nya yang kemudian memberontak. Meskipun benih nilai-nilai filsafatnya berasal dari masa pemunculan yang sezaman, “anak haram” yang memberontak dalam wujud komunisme itu dapat muncul setelah kapitalisme merajalela di mana-mana menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada masyarakat buruh yangnng diperas dan dihisap. Sementara Karl Marx, si bidan yang di “nabi”-kan oleh pengikutnya pada masa selanjutnya menulis tentang Kapitalisme, mengupas dan meramal keruntuhan sistem tersebut dalam bukunya “Das Kapital”. Namun Kapitalisme tidak segera mati seperti yang diramalkan Marx, tetapi justru pemikiran Marx sendiri tentang komunisme memunculkan kekuatan baru yang tidak kalah besarnya dari Kapitalisme.<sup>28</sup>

Tetapi sikap pemerintah Amerika terhadap bisnis tidak pernah pasif, yang mana selama kurang lebih tiga kwartal/abad setelah pembuatan

---

keuntungan mereka” (baca: dalam Robert L. Heilboner, *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, Jakarta, UI Press, 1982).

<sup>28</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Penikiran Ekonomi Islam*, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, diterjemahkan oleh A.M. Saefuddin, (Jakarta, Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986), hal. xii.

konstitusi (undang-undang) pemerintah harus aktif dalam mempromosikan perusahaan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi bantuan finansial yang bertujuan untuk membangun barak-barak, jalan kereta api, sambungan komunikasi dan mendirikan bank-bank; bantuan untuk pertanian dalam berbagai bentuk serta meningkatkan tarap industri maju, mereka mendorong penciptaan keuntungan dan itu juga berarti kemajuan bagi *kesejahteraan umum*.

Walaupun demikian, Amerika, Swedia, Prancis dan Jepang menurut penulis belum bisa dikatakan sebagai penganut Kapitalisme murni, sebab masih ada bagian-bagian yang kebijakannya diambil dengan ketentuan pemerintah, misalnya dalam hal pendapatan dari produksi dan distribusi, namun paling tidak Amerika bisa dikatakan negara yang paling dekat dan paling dominan dalam menerapkan ekonomi Kapitalisme murni tetapi tetap saja jauh dari model yang asli karena sangat besar tuntutan pemerintah terhadap barang dan jasa. Ekonomi Amerika juga memiliki kontrol melalui perusahaan raksasa yang ironisnya lebih banyak mengadakan kolusi dan koordinasi daripada berkompetisi.<sup>29</sup>

Lebih jauh lagi Amerika yang merupakan pendekar utama negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini, telah menjadi korban dari sistem ekonominya sendiri. Hal itu bisa dibuktikan, bahwa separo dari

kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan industri di Amerika telah dimiliki/dikuasai oleh hanya sebanyak 102 unit perusahaan industri raksasa saja (di mana kekayaan rata-rata tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dollar US).<sup>30</sup>

Kenyataan itu barangkali menggambarkan ketidaknyamanan masyarakat Amerika, yang kaya, diusik ketentramannya. Mereka mengkhawatirkan derasnya investasi asing yang menjadikannya dijajah secara ekonomis. Awal dari itu semua bisa dilihat pada kebijakan Reagan sebagai penganut paham "supply-side economics", dia berpendapat bahwa cara yang paling tepat menggairahkan ekonomi adalah merangsang sisi produksi dan agar rakyat tergerak untuk berproduksi, maka pajak dikurangi. Tarif pajak tertinggi untuk orang-orang kaya diturunkan dari 70% menjadi 28%. Tetapi tragisnya, sisi pengeluaran ternyata gagal dilaksanakan/disesuaikan dengan penurunan sisi pendapatan (akibat penurunan pajak). Anggaran militer membengkak dan – sebagai akibatnya - AS mengalami defisit terbesar sepanjang sejarah.<sup>31</sup>

Dan pada saat yang bersamaan, AS mengalami defisit perdagangan yang cukup parah, maka terjadilah kelangkaan dana dalam negeri untuk

---

<sup>29</sup> Zimbalist, Andrew, Howard j. Sherm; Stuart Brown, *Comparing Economics System A Political-Economic Approach*, 2 Edition, (Harcourt Brace Jovanovindi Sandiogo, 1989), hal. 3.

<sup>30</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), hal. 2.

<sup>31</sup> Hendro Basuki, "Ekonomi Amerika dalam Pembenahan", *Suara Merdeka*, (No. XLI/14/VI/24 Februari 1993), hal. 4-9.

memenuhi kebutuhan domestik. Padahal, tabungan yang berhasil dihimpun tidak mencukupi akibat gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Pada saat itulah, modal dari luar masuk secara tiba-tiba akibatnya selama 10 tahun (1978-1988) arus masuk modal internasional berlipat hingga mencapai total 1,8 triliun dollar. Sedangkan total investasi AS dalam periode yang sama hanya 1,3 triliun dollar.

Dalam mengantisipasi persoalan ini, maka Clinton mencoba untuk menawarkan beberapa program ekonominya seperti:<sup>32</sup> (1) peningkatan investasi, (2) disiplin dalam bidang moneter dan fiskal, (3) menciptakan daya saing yang tinggi dan liberalisasi, (4) kerja sama yang erat antara karyawan dan perusahaan serta (5) keterbukaan pasar dunia. Lebih lanjut Clinton mengimplementasikannya dalam 4 paket yaitu: *Pertama*, kebijakan jangka pendek yang memberikan rangsangan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi sekitar setengah juta orang dalam dua tahun berikutnya. *Kedua*, kebijakan pemotongan anggaran termasuk di dalamnya anggaran militer, subsidi pertanian, proyek ruang raksasa dan sejumlah program lainnya. *Ketiga*, kenaikan pajak sebesar 70% sebagai suatu kenaikan luar biasa yang ditujukan untuk kaum menengah dan atas yang berpendapatan Rp 60 juta keatas. Sedangkan paket kebijakan *keempat*, investasi baru yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Dan

program ini dinilai strategis untuk mempersiapkan AS menghadapi masa depan.<sup>33</sup>

Dari keempat paket tersebut, memang ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan naik, paling tidak bergerak sekitar 3 persen. GDP akan bergerak dari angka 2 persen (1992) menuju 3,1 persen (1993). Tetapi yang agak bisa dipastikan, pengangguran hanya mampu turun pada sekitar angka 1,5 persen menjadi 6,7 persen dari angka 2,5 juta penganggur. Selanjutnya dua masalah yang pasti akan muncul adalah inflasi, yang bisa mencapai 3,5 persen karena dorongan investasi yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Dan Fortune memprediksikan edisi Januari 1993, tingkat konsumsi masyarakat akan naik menjadi 3,2 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 3 persen.

Adapun yang terjadi sekarang, perekonomian AS terus berkinerja dengan baik, walaupun sangatlah penting bahwa kita terus membuat rencana dengan hati-hati; khususnya dengan menyisihkan pangsa terbesar dari surplus-surplus anggaran terproyeksikan untuk membayar hutang nasional. Dan untuk mengetahui gambaran tentang peranan perusahaan dalam perekonomian AS, kita dapat melihat bahwa 50 perusahaan industri terbesar mempunyai andil 80% dari total penjualan sektor industri, 75% penyediaan lapangan pekerjaan di antara semua perusahaan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 4-9.

<sup>33</sup> *Ibid.*

industri. Dalam dasawarsa terakhir kecenderungan ke arah skala yang besar ini telah meningkat. Dalam sektor ekonomi nonindustri yang penting seperti perbankan, asuransi jiwa, dan pelayanan jasa kepada masyarakat umum untuk konsentrasi pemilikan saham dan kontrol bahkan lebih besar daripada dalam bidang industri.<sup>34</sup>

Dan klimaksnya yang nampak sekarang adalah peranan negara industri maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan Belanda telah mencapai 63,37% terhadap GWP (Gross World Product) tahun 1984, sebesar 68,03% pada tahun 1990 dan sebesar 66,33% pada tahun 1992, di mana yang sebesar 56,44%, sebesar 61,39% dan sebesar 64,88% pada ketiga tahun tersebut dari GWP.<sup>35</sup> Ironisnya perkembangan ekonomi ketujuh Negara Industri Maju tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Untuk lebih sistematisnya penulis akan menjelaskan kronologis/urutan lahirnya istilah Kapitalisme dan sistem Kapitalisme itu sendiri sebagai berikut:<sup>36</sup>

<sup>34</sup> William Eberstein, Edwin Fogelma DAN Alex Jemadu, Alih Bahasa: Alex Jemadu, *Isme-Isme Dewasa Ini*, (Jakarta; Erlangga, 1994), Edisi IX, hal. 154.

<sup>35</sup> Suroso Imam Dzajuli, *Indonesian International Currency System*, (Surabaya; Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1998), hal.3.

<sup>36</sup> M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 17.

#### □ Kapitalisme Awal

Di Inggris industri sandang pedesaan terus tumbuh pesat selama abad ke-16, 17 dan 18. Jadi industri wool memelopori Kapitalisme sebagai sistem sosial dan ekonomi serta untuk pertama kali membuatnya berakar di tanah Inggris. Sehingga pendayagunaan “surplus sosial” secara produktif merupakan prestasi istimewa yang membuat Kapitalisme mampu mengungguli semua sistem ekonomi sebelumnya. Di antara berbagai kejadian dan lingkungan yang secara pasti mempengaruhi pembentukan modal di Eropa Barat pada tahap awal berkembangnya Kapitalisme, ada tiga hal yang patut diberi perhatian khusus yaitu: **Pertama;** dukungan agama bagi kerja keras dan sikap hemat. **Kedua;** pengaruh logam-logam mulia dari Dunia Baru terhadap pembagian relatif atas upah, laba dan sewa dan **Ketiga;** peranan negara-negara dalam membantu dan secara langsung melakukan pembentukan modal dalam bentuk modal yang multifungsi.

#### □ Kapitalisme Klasik

Di Inggris, mulai abad ke-18 fokus pembangunan Kapitalis bergeser dari perdagangan ke industri. Revolusi Industri dapat didefinisikan sebagai periode peralihan dari dominasi modal perdagangan atas modal industri ke dominasi modal industri atas modal perdagangan. Sehingga akumulasi modal yang terus-menerus selama dua atau tiga abad mulai menunjukkan hasil baik pada abad ke-

#### □ Kapitalisme Awal

Di Inggris industri sandang pedesaan terus tumbuh pesat selama abad ke-16, 17 dan 18. Jadi industri wool mempelopori Kapitalisme sebagai sistem sosial dan ekonomi serta untuk pertama kali membuatnya berakar di tanah Inggris. Sehingga pendayagunaan “surplus sosial” secara produktif merupakan prestasi istimewa yang membuat Kapitalisme mampu mengungguli semua sistem ekonomi sebelumnya. Di antara berbagai kejadian dan lingkungan yang secara



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

18. Dan Kapitalisme sebagai penggerak kuat bagi perubahan teknologi karena akumulasi modal memungkinkan upaya penemuan-penemuan baru yang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat miskin. Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa karya besarnya Adam Smith yaitu *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealt of Nation (1776)* mencerminkan ideologi kapitalisme klasik. Smith menganjurkan untuk membongkar birokrasi negara dan menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi kepada kekuatan pasar yang mengatur dirinya sendiri secara bebas. Dalam pandangan Smith, keuntungan pribadi dan kesejahteraan umum dapat diserasikan oleh kekuatan-kekuatan impersonal kompetisi pasar, sebab kebijaksanaan-kebijaksanaan *laissez faire* liberalisme politis abad ke-19 mencakup pula perdagangan bebas, keuangan yang kuat (dengan standar emas), anggaran belanja berimbang, bantuan kemiskinan minimum-singkatnya, prinsip yang mengembalikan individu-individu kepada diri mereka sendiri dan percaya bahwa interaksi-interaksi yang tidak diatur akan menghasilkan akibat-akibat sosial yang diinginkan. Sehingga sistem ini biarpun didefinisikan secara baik dan ditandai koherensi-logis, harus dipahami semata-mata sebagai sistem dari berbagai kecenderungan. Sebab secara lebih definitif dibanding dengan semua kurun historis lainnya, (maksudnya perkembangan yang terjadi pada fase sebelumnya dimana kaum bisnis

tidak berkuasa secara politis) perkembangan ini dapat diterangkan semata-mata secara ekonomis. Ia merupakan sukses dari usaha kapitalis mengangkat kaum borjuis ke posisi yang untuk sementara sangat berpengaruh, sukses ekonomis menghasilkan kekuatan politis, yang pada gilirannya melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan proses kapitalis. Jadi para industrialis Inggris memperoleh perdagangan bebas merupakan faktor utama dalam suatu periode ekspansi ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

□ Fase Lanjut (Sejak 1914)

Perang dunia I (Pertama) menandai titik balik perkembangan Kapitalisme pada umumnya dan kapitalisme Eropa khususnya. Sejak tahun 1914 menyaksikan adanya pembalikan minat publik kepada Kapitalisme dan terbaliknya hampir pada semua aspek yang dimulai dari kurun liberal sebelum perang, di mana Kapitalisme Eropa menjalankan kepemimpinan kuat dalam masyarakat ekonomi internasional. Pasar dunia saat itu berkembang pesat, standar emas hampir menjadi universal, Eropa bertindak selaku bank dunia, Afrika menjadi jajahan Eropa, sementara Asia dibagi-bagi menjadi berbagai wilayah dan pengaruh yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan Eropa dan Eropa tetap menjadi pusat peningkatan volume perdagangan internasional.

Namun sesudah Perang Dunia I, keberpihakan-keberpihakan itu berbalik arah, di mana pasar internasional surut, standar emas ditinggalkan dan alat pembayaran nasional yang terkendali lebih disukai, hegemoni perbankan berpindah dari Eropa ke Amerika Serikat, dan rakyat Asia dan Afrika berhasil bangkit melawan kolonialisme Eropa dan berbagai hambatan perdagangan bertambah banyak. Puncaknya Revolusi Rusia sebagai akibat perang, tidak hanya membongkar lembaga pokok kapitalis yang berupa pemilikan pribadi atas sarana produksi di wilayah yang luas tetapi lebih jauh lagi membongkar struktur kelas dan agama yang sudah mapan. Di atas segala-galanya *laissez faire*, kebijakan yang menjadi kesepakatan abad ke-19 telah dipermalukan oleh perang dan pengalaman sesudah perang.

Terlepas dari adanya keberhasilan yang dimiliki oleh ekonomi kapitalisme, namun tidak semua orang/negara yang bisa menerima atau setuju terhadap model kebijakan ekonomi Kapitalisme, maka muncul berbagai kritikan walaupun pada hakikatnya Kapitalisme hanyalah “hasil sampingan” dari filsafat politik yang bernama *liberalisme*, yang berkembang di zaman pencerahan (Enligtenment) pada abad ke-18. Semangat liberalisme itu mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia sama sekali tidak jahat, dan sejarah umat manusia dapat disimpulkan sebagai kemajuan (progress) yang menuju pada suatu tatanan rasional

dalam kehidupan, sehingga tuntutan spritual dari lembaga agama apa pun tidak lagi diperlukan.<sup>37</sup>

Perkembangan selanjutnya menunjukkan ternyata Kapitalisme tersebut justru menimbulkan suatu masyarakat yang tidak egalitarian dan menciptakan kesengsaraan bagi rakyat banyak, di samping munculnya keserakahan pendukung kapitalisme serta individualisme yang menyebabkan alienasi. Meskipun dalam dunia empiris tidak mungkin kita temukan Kapitalisme murni, di mana barang-barang ekonomi yang tersedia dalam masyarakat didistribusikan sepenuhnya melalui mekanisme pasar, tetapi setiap sistem ekonomi yang pada dasarnya bersifat kapitalistis mempunyai beberapa kelemahan yaitu :<sup>38</sup>

**Pertama**, Kapitalisme melahirkan ketidaksamaan (*inequality*), atau kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Umumnya orang mengakui bahwa Kapitalisme memang dapat mendorong produktifitas yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melipatgandakan kekayaan, tetapi tetap tidak dapat menghilangkan ketimpangan. **Kedua**, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bersifat internasional, jadi tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu negara tertentu. Kapitalisme internasional dapat mempertahankan hidupnya lewat eksploitasi yang dilakukan atas dunia ketiga. **Ketiga**, demi kepentingan ekonominya, kekuatan kapitalis selalu

---

<sup>37</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996 ), hal. 91.

bersikap “double-standard”. Kapitalisme langsung atau tidak, berkaitan dengan sistem operasi internasional demi kelangsungan kepentingan ekonominya. Sebagai contoh: Amerika Serikat yang sering menamakan dirinya benteng demokrasi lebih sering membantu kelangsungan regim-regim di dunia ketiga yang opresif terhadap rakyatnya. Jadi, di satu pihak Amerika sangat menghargai hak asasi manusia dan etika politik yang cukup tinggi (kasus jatuhnya Presiden Nixon karena skandal Watergate), tetapi di pihak lain prinsip-prinsip penting itu sama sekali tidak menjadi problem jika menyangkut negara lain. **Keempat**, Kapitalisme yang secara teoritis memberikan kesempatan sama (*equality of opportunity*) kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif, bahkan rasis. **Kelima**, Semboyan Kapitalisme yang berupa “berproduksi untuk dapat berproduksi lebih besar” menyebabkan keserakahan dan berkembangnya kehidupan yang materialistis. Jadi melimpahnya produksi tidak lagi menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan yang luhur, karena ia telah menjadi tujuan itu sendiri. **Keenam**, sebagai konsekuensi logis dari cara produksi seperti diatas, lahirnya pola kehidupan konsumerisme.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 92-93.

<sup>39</sup> Drs. Misenam Munrahim, MA., Ec., P.hD dalam *Kuliah Fik'at Ekonomi Islam*, pada tanggal : 8-10-1999, lebih ringkas lagi mengatakan bahwa berbagai konsep yang lemah dalam kapitalisme yaitu: 1) Hukum Ekonomi dianalogikan dengan Hukum Alam, 2) Prilaku rasional; *self interest*, 3) Positivisme Ekonomi : bahwa sesuatu yang terjadi dalam ekonomi itulah yang sesungguhnya terjadi; *no value*, dan 4) Hukum Say : *Supply creates it is own demand* (penawaran diciptakan oleh permintaan itu sendiri). Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa problema dasar ekonomi diakibatkan oleh kebutuhan manusia yang tak terbatas, sementara itu sarana

Dan kegagalan ekonomi Kapitalisme yang paling mencolok seperti yang dikatakan dan diakui oleh Hillary Clinton yaitu: munculnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara industri maju (Kapitalisme) dengan negara-negara miskin (selatan). Kesenjangan ekonomi telah menggejala sejak Perang Dunia II, saat itu Amerika Serikat memiliki 40% dari seluruh kekayaan dunia, padahal berpenduduk hanya 6% dari seluruh penduduk bumi.<sup>40</sup> Menurut World Bank Report pada tahun 1979, penduduk Amerika dan Eropa Barat hanya 16,5% dari penduduk dunia dan menguasai dua pertiga kekayaan dunia. Sedangkan menurut laporan PBB, sekitar tahun 90-an terjadi sebuah fenomena yang disebut *sebagai negatif transfer atau revising finansial flows*. Artinya fenomena ini menggambarkan sesungguhnya bukan dunia industri maju yang mengalirkan dana mereka ke dunia berkembang tapi sebaliknya, yaitu

---

pemenuhannya sangat terbatas. Agar proses produksi tersebut dapat selalu terdorong dan disisi lain persoalan konsumsi serta distribusi ekonomi dapat selalu terjaga seadil-adilnya, maka manusia mengembalikan kepada hukum pasar bebas yaitu hukum yang kendalikan oleh *supply and demand*.

<sup>40</sup> Hillary Clinton, *It Takes a Village*, alih bahasa Widodo, Jakarta, Gramedia Pustaka, Cet. I, 1996, hal. 269. Lebih lanjut lagi sesungguhnya proses kegiatan ekonomi dengan menyandarkan pada suatu *liberalisasi* akan mengakibatkan adanya suatu kompetisi atau persaingan. Dalam bahasa ekstrim kegiatan ekonomi ini seperti hukum rimba yang memberikan peluang kepada orang yang tidak memiliki kekuatan modal untuk mendapatkan hasil serupa seperti yang didapatkan pemilik modal besar. Dia melanjutkan dengan mengkritisi bahwa pandangan Adam Smith tentang persaingan dan pertentangan tersebut dimana dia percaya jika kontradiksi ini akan dapat diselesaikan oleh *invisible hand* (tangan pengendali yang tak terlihat), sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan tetap terwujud. Dan inilah barangkali satu titik kelemahan kapitalisme yang tidak segera diselesaikan atau bahkan menurut pandangan Karl Marx bahwa sistem ini akan tetap menyisakan yang namanya kontradiksi dan tidak dapat terdamaikan serta akan menghancurkan dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya baca juga Sopwan Ismail, "WTO Dan Gerakan Anti Kapitalis", *Kabar Kampus*, (9 Desember 1999), hal. 6, kolom 2.

dunia berkembang yang membantu dunia maju. Jumlah negatif transfer pada tahun 1984-1990 diperkirakan US\$ 180 miliar.<sup>41</sup>

Lebih jauh lagi adanya sistem kapitalis yang ditopang oleh perkawinan ilmu dan teknologi canggih, memang telah memberikan ketamakan/kescoronakan kepada segelintir manusia. Tapi *Herbert Marcuse* lebih jelas lagi mengatakan bahwa buah dari sistem ini ialah “memudarnya dimensi bagian dalam dari pikiran, pupusnya kekuatan kritis dari rasio, ketertundukan kepada fakta-fakta kehidupan.” Dan demi pemenuhan dorongan hedonistik, alam semesta telah dilukai melalui cara-cara yang tidak beradab, bumi menjadi terluka parah.<sup>42</sup>

Mungkin kita masih bisa menemukan kelemahan-kelemahan Kapitalisme yang lain, jika kita menggunakan etika al-Qur’an tentunya akan nampak jelas sekali kelemahan tersebut, sebagai contoh dalam konsumsi, al-Qur’an mengajarkan untuk mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan kebutuhan (prinsip moderasi) atau tidak boros, sementara dalam ekonomi Kapitalisme seseorang dianjurkan untuk memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu dengan sepuas-puasnya. Dari sini kita sudah bisa

<sup>41</sup> Ruslan Abdul Gani, *Harian Merdeka*, (28 Februari 1997), hal. 4

<sup>42</sup> Ahmad Syafii Ma’arif, *Islam dan Politik; Upaya Membingkai Peradaban*, Cirebon, Pustaka DINAMIKA, 1999, hal. 194. Sementara *Faisal Basri* mengatakan bahwa dengan mulai goyahnya tatanan ekonomi dunia, akhirnya banyak ahli ekonomi yang mempertanyakan sistem ekonomi sehingga kapitalisme yang diterapkan di negara-negara besar itu. Uniknya yang mulai banyak mengkritik sistem ekonomi kapitalisme adalah para pakar dan pendukung utama ekonomi kapitalisme itu sendiri. Selanjutnya baca dalam Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, (Jakarta, Erlangga, 1987), Cet. II, hal. 23.

melihat perbedaan yang sangat signifikan antara konsep al-Qur'an yang penuh dengan muatan etika/moral dalam berekonomi.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada teori ekonomi tersebut, namun akseptabilitas dari teori ini sudah sangat tinggi di dunia. Paham kapitalis saat ini sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia, bahkan negara-negara yang dulunya menganut paham komunis seperti Rusia dan beberapa negara ex Uni Soviet dan RRC, saat ini tatanan kehidupan ekonominya juga sudah tidak menunjukkan lagi penolakan terhadap paham ekonomi tersebut. Uniknya perluasan ini telah menjangkau dunia Islam, terbukti dengan banyaknya ekonom di negara-negara itu yang secara terang-terangan menganut paham tersebut. Hal ini tentu saja sedikit banyak telah memberi warna terhadap analisis-analisis ekonomi Islam.<sup>43</sup>

Kenyataan ini diperkuat lagi (dan menurut penulis memang harus diakui) bahwa ekonomi Islam belum memiliki alat analisis yang orisinal dari khasanah ekonomi Islam sendiri, yang implikasinya menyebabkan ekonomi Islam “meminjam” alat analisis ekonomi Barat. Walaupun adanya asumsi bahwa alat analisis yang dimiliki ekonomi Barat bersifat matematis-analitis saja, sehingga dipandang *bebas nilai*. Asumsi inilah yang sebenarnya merupakan ekspresi amoralitas dari ekonomi

Kapitalisme. Jika penggunaan alat ini akan terus dilakukan, maka dikhawatirkan hasil postulasi ekonomi Islam “sama” (tidak jauh berbeda) dengan ekonomi Kapitalisme. Atau jika tidak hanya memberi label “moral” terhadap ekonomi Kapitalisme.<sup>44</sup> Oleh sebab itu kita harus menemukan formulasi yang tepat untuk membangun ekonomi Islam secara integral.

## B. LATAR BELAKANG LAHIRNYA EKONOMI ISLAM

Dalam wacana perekonomian, setidaknya-tidaknya ada dua sistem ekonomi besar yang dominan dalam literatur ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada filosofi *individualis* atau *selfishness* serta bekerjanya *invisible hand* sehingga memunculkan persaingan di pasar yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi, serta kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kompetisi tersebut didukung pula dengan adanya kebebasan pemilikan atau penguasaan aset secara individu. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialisme di mana faktor produksi dikuasai negara, sehingga eksploitasi sesama individu dapat dihindari, akan tetapi karena mengabaikan sistem pasar, maka telah membunuh gairah untuk berkompetisi yang selanjutnya berpengaruh negatif terhadap efisiensi.

---

<sup>43</sup> Munrokhim Misanam, “Pendekatan Akademik Dalam Paradigma Ekonomi Islam”, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, (Surakarta; 17 Mei 1998), hal. 2.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 3.

Sistem ekonomi Islam<sup>45</sup> memiliki perbedaan yang sangat jauh dan fundamental terhadap kedua sistem ekonomi di atas. Adapun dasar dari ekonomi Islam diturunkan dari kerja sama (bukan kompetisi), serta adanya keseimbangan antara individu dengan kepentingan masyarakat yang semuanya dibangun atas dasar Syari'ah. Prilaku manusia (seperti produsen atau konsumen) dalam ekonomi Islam adalah jujur, adil, tidak tamak karena mereka adalah makhluk yang beriman.<sup>46</sup> Sistem pasar tetap berperan, akan tetapi tidak seluruh persoalan ekonomi umat harus dan mampu diselesaikan melalui mekanisme pasar seperti keadilan, pemerataan, moral dan sebagainya. Sehingga dengan dasar keimanan tersebut mereka percaya bahwa segala perbuatan termasuk di dalamnya perbuatan ekonomi yang

---

<sup>45</sup> *Islam* tidak saja berarti selamat, sejahtera dan tunduk serta penyerahan diri secara total untuk mendapat keselamatan, namun bukanlah sebuah agama yang hanya memuat dogma, kumpulan ritus semata, tetapi lebih luas lagi dalam makna yang lebih utuh islam adalah sebuah doktrin, world view, sebuah sistem ekonomi, sosial, politik dan juga budaya, yang beralaskan pada paradigma tauhid, selanjutnya baca dalam Nourrouzaman Shiddiqi yang berjudul *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, pada hal. 290. Muhammad Baqir Sadr (seorang pakar dalam ekonomi Islam kontemporer) menjelaskan bahwa Islam bersifat komprehensif dan menyeluruh yang menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia, selanjutnya baca dalam Farhad Nomani dan Ali Rehnema, *Islamic Economic System*, (Malaysia; Business Information Press, 1995), pada hal. 44.

<sup>46</sup> M. Husein Sawit, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Perlukah Berbeda?*, Dalam Seminar Nasional, yang diadakan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi, ( Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, 1997 ) hal. 2. Sebab kontribusi yang utama dari Islam terletak pada usaha untuk membuat kehidupan manusia dan usaha yang mempunyai tujuan yaitu *value oriented*. Transformasi-transformasi yang dibawanya dalam sikap manusia dan *pari passu* dalam sikap keilmuan sosial adalah untuk menghilangkannya dari *pseudo-value-neutrality* kearah *value-comitment* terbuka dan jelas serta *value-fulfilment*. Premis pertama yang penulis maksudkan untuk ditegaskan adalah bahwa pembangunan ekonomi dalam framework Islam dan pembangunan ekonomi Islam yang berakar pada *value-pattern* yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya baca dalam, Khurshid Ahmad, *Studies In Islamic Economics*, (Jeddah & Inggris; International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz & The Islamic Foundation, 1976), hal. 175.

dilakukan di dunia, akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Maka sebagai orang beriman, mereka percaya bahwa ada dua tahapan kehidupan manusia (baca: dunia dan akhirat) di mana segala perbuatan manusia di bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di akhirat nanti (accountability). Oleh karena itu fondasi *self interest dan invisible hand*-nya Adam Smith yang dipakai sebagai dasar dalam mengembangkan teori-teori ekonomi konvensional yang dikenal sekarang ini harus dihilangkan atau paling tidak “diminimalisasikan” dalam rangka membentuk sistem yang berbeda dari ekonomi konvensional, salah satunya dengan menghilangkan paradigma bunga.<sup>47</sup>

Sedangkan gagasan mengenai konsep ekonomi Islam sebenarnya baru muncul secara internasional pada sekitar belahan kedua dasawarsa 70-an, ketika untuk pertama kali diselenggarakan Konprensi Internasional tentang ekonomi Islam di Makkah, pada tahun 1976 yang ditandai oleh pertumbuhan fantastis lembaga perbankan Islam di berbagai belahan dunia. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam tersebut belum

---

<sup>47</sup> M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, Int. Islamic Pub. House, and the Intern. Insitute Of Islamic Though : Herndom VA, 1992, hal. 6. Dan M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995 ), hal. 312. <sup>47</sup> Dalam ekonomi Konvensional (model ekonomi kapitalis dan sosialis), bertentangan dengan *sistem nilai*; karena keduanya bersifat eksploitatif dan tidak adil serta gagal untuk memperluaskan manusia sebagai manusia, Khalifah Tuhan di b.m . Keduanya juga tidak dapat di temui dalam lingkungan mereka sendiri tantangan ekonomi, sosial, politik dan moral yang mendasar dari masa kita dan kebutuhan masyarakat manusia yang riil dan adil. Lebih lengkapnya lihat dalam Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (Jeddah & Inggris; International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz & The Islamic Foundation, 1976), hal. 175.

pernah dibahas sebelumnya. Dan pembahasan secara modern tentang ekonomi Islam yang bersifat filosofis sudah ada sejak permulaan dasawarsa 50-an dan meningkat pada dasawarsa selanjutnya mengenai sistem ekonomi, pembangunan ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi dan analisis ekonomi yang sifatnya empiris. Pada dasawarsa 70-an, tulisan-tulisan serupa terus berkembang, baru sekitar belahan kedua dasawarsa itu, mulai muncul teori-teori ekonomi yang memakai model-model ekonometri, setelah munculnya sarjana-sarjana ekonomi angkatan baru, terutama lulusan universitas-universitas Amerika.<sup>48</sup>

Jika kita melihat kronologi sejarahnya, Islam sudah memiliki pemikir-pemikir ekonomi kaliber dunia sejak abad kedelapan tahun Masehi. Di sana tercatat beberapa nama besar seperti Abu Yusuf (731-798) yang banyak menitikberatkan pada masalah keuangan (*public finance*), perpajakan dan sektor pertanian. Beliau mengajukan pemikiran tentang kelebihan sistem pajak yang proporsional dengan sistem yang dikenakan secara tetap (*lump-sum taxation*). Kemudian Ibn Taimiyyah (1262-1328) yang walaupun beliau seorang ahli dalam dunia pengobatan, sementara dalam ekonomi bisa dilihat dari tesis singkatnya yang tertuang dalam *Tadbir al-Manzel*, beliau mengemukakan pentingnya elemen dari masyarakat politik, organisasi sosial dan majemen pendapatan dan pengeluaran. Menurutnya pengeluaran harus

---

<sup>48</sup> M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah*; Menuju Ekonomi Islam, (Bandung; Penerbit Mizan, 1987), hal. 15.

tunduk pada keadilan yang mensyaratkan perlunya jalan *iqtisad* (pemenuhan kebutuhan dalam keadaan terbatas). Jelas di sini bahwa segala pengeluaran harus didasarkan pada prinsip optimalisasi. Selanjutnya Ibn Khaldun disebut sebagai pelopor pemikiran ekonomi Islam, seperti teori nilai, hukum penawaran dan permintaan, produksi dan distribusi, keuangan negara dan sebagainya.<sup>49</sup>

Lebih lanjut menurut Boufakia (1971), beberapa konsep ekonomi yang diajukan oleh beberapa pemikir ekonomi Barat seperti Adam Smith, David Ricardo dan Robert Malthus, sudah ditulis oleh Ibn Khaldun lebih kurang empat abad sebelum bukunya Adam Smith yang terkenal itu terbit. Dengan demikian adalah keliru kiranya klaim kebanyakan atau sementara orang yang berpendapat bahwa Adam Smith adalah “nabi” ekonomi modern.

50

Sementara di Indonesia perhatian terhadap pengembangan teori ekonomi yang bertolak dari keislaman (saat itu) boleh dikatakan tidak ada, kecuali sifatnya pribadi seperti Dr. A.M. Saefuddin, Dr. Halide dan Dr. Murasa Sarkaniputra. Sebelumnya Syafruddin Prawiranegara, seorang teknokrat terkemuka sejak tahun 1946 hingga sekitar 1958 pernah menjelaskan apa yang di maksud dengan "sistem ekonomi Islam" dalam

---

<sup>49</sup> Muhammad Akhyar Adnan, “*Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Islam*”, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan oleh MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, Surakarta, 17 Mei 1998, hal. 1. Baca juga Munrahim Misanam, “*Pendekatan Akademik Dalam Paradigma Ekonomi Islam*”, *Ibid.*, hal. 3-4.

<sup>50</sup> Muhammad Akhyar Adnan, *Ibid.*, hal. 1.

kesempatan lahirnya HUSAMI (Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia). Penjelasan tersebut menurut Dawam Rahardjo sebagai penjelasan lebih lanjut dari apa yang ditulisnya pada tahun 1951 yang berjudul “Motif atau Prinsip Ekonomi Diukur Menurut Hukum Islam”, dan penjelasan itu sebenarnya belum menjelaskan mengenai “sistem” melainkan moral ekonomi menurut pandangan Islam.<sup>51</sup>

Namun jika kita melihat saat ini minat terhadap ekonomi Islam baik di dunia internasional (contohnya di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Sudan, Yordania, Pakistan, Malaysia, yang mana negara-negara ini termasuk negara yang benar-benar melaksanakan zakat dan sebagai salah satu alternatif dalam memberantasan kemiskinan)<sup>52</sup> maupun di Indonesia sudah sangat besar, misalnya di Indonesia (secara resmi/operasional baru diakui keberadaannya pada tahun 1991) dan pada tataran praktis misalnya, sudah ada Bank Syari’ah, Asuransi Takaful, BMT, Bank Muamalat Indonesia lembaga BAZIS dan baru-baru ini ada Bursa Efek yang Islami yang mempunyai signifikansi besar terhadap pengembangan ekonomi umat.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>52</sup> J. Barkley Rosser, Jr, Marina V. Rosser, *Comparative Economics In A Transforming World Economy*, (USA; Penerbit Times Mirror Higher Education Group, 1996), hal 115. Walaupun sesungguhnya negara-negara Muslim jarang sekali (masih sangat parsial) yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara ketat (utuh/integral). Kalau boleh diilustrasikan mungkin satu-satunya masa dimana ajaran itu dijalankan dengan ketat hanya pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dan diabad kedua puluh ini, hanya Arab Saudi dan mungkin Lybia yang paling dekat dalam menerapkan sistem tersebut, negara lain mungkin menerapkan tetapi masih pada tataran parsial. Selanjutnya baca dalam Amrullah, dkk, *Islamisasi Ekonomi; Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, ( Yogyakarta; PLP2M, 1985), hal. 67.

Lebih lanjut pengembangan ekonomi Islam dilakukan dalam berbagai bentuk, dan yang paling menonjol adalah usaha pembangunan teori pada tingkat abstrak yaitu perumusan etika ekonomi dan model-model ekonometri. Di berbagai universitas telah dibentuk departemen ekonomi, secara khusus mengajarkan teori-teori ekonomi Islam seperti *Islamic University*, Makkah dan *Islamic University of Omm Durman*, Sudan serta kegiatan riset dan pelatihan telah di selenggarakan di lembaga-lembaga yang khusus dibentuk seperti *International Centre for Research in Islamic Economics*, King Abdul Aziz University, Jeddah, *the Islamic Research and Training Institute* pada Islamic Development Bank, Jeddah, *the Training Institute for Islamic Banking and Economics*, yang dibentuk oleh International Association of Islamic Banks di Lefkosa, Cyprus-Turki dan *School of Economics* pada Islamic University di Islamabad.<sup>53</sup> Dan bentuk pengembangan secara empirik nampaknya masih terbatas, tapi operasionalisasi beberapa konsep telah dilaksanakan, yang terkenal paling maju adalah pendirian bank-bank komersial Islam, lembaga-lembaga keuangan dan investasi serta bank pembangunan yang membantu membiayai berbagai proyek pembangunan negara Islam, melalui IDB. Sementara konsep lain yang mulai dilaksanakan adalah pengumpulan dana zakat untuk pembangunan dan bantuan sosial, baik untuk masyarakat setempat maupun masyarakat Islam di luar negeri.

---

<sup>53</sup> M. Dawam Rahadjo, *Op. Cit.*, hal. 64.

Demikian juga di Indonesia sudah banyak universitas-universitas yang khusus membuka konsentrasi ekonomi Islam seperti Magister Studi Islam, UII, Yogyakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, UNAIR di Surabaya dan lain-lainnya, maupun pengembangan melalui seminar-seminar dalam rangka mensosialisasikan ekonomi Islam kepada masyarakat luas.

## - PENGERTIAN EKONOMI ISLAM<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Ketika kita ingin menjelaskan tentang ekonomi Islam, ada beberapa pendapat tentang eksistensi ekonomi Islam, yang diklasifikasikan pada tiga pendapat : *Pertama*, mereka yang berpendapat bahwa pada hakikatnya sistem ekonomi Islam "sama saja" dengan sistem ekonomi Kapitalisme, walaupun ada perbedaan, maka perbedaan tersebut relatif kecil dan untuk itu ekonomi Islam cukup menyesuaikan saja. *Kedua*, mereka yang berpendapat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara ekonomi Islam dan ekonomi Kapitalisme. Dari sini sekaligus menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bisa ditransformasikan kedalam bentuk sistem ekonomi yang konsisten dengan fungsi dan strukturnya. Pendapat ini menantang pengembangan sistem ekonomi Islam dan berargumentasi bahwa sistem ekonomi Islam satu-satunya sistem ekonomi yang ilmiah dan dapat di praktekkan ( bersifat normatif sekaligus positif). *Ketiga*, Sistem ekonomi Islam hanya merefleksi kepercayaan tertentu. Oleh karena itu pendapat ini mengatakan bahwa usaha pengembangan ekonomi Islam akan menghasilkan *kekacauan intelektual (Intelektual Chaos)* sebab dua alasan yang pertama, ekonomi Islam mempunyai basis ilmiah dan kedua keberadaannya merupakan refleksi dari banyaknya sekte dalam Islam. Namun terhadap ketiga argumentasi diatas *Arif* membantahnya dengan membuktikan bahwa kekeliruan tersebut dilakukan oleh Arif dengan pendekatan (kreteria) Khun. Sehingga jelas, bahwa pada esensinya sistem ekonomi Islam tidak sama dengan sistem ekonomi Kapitalisme, atau sistem manapun yang sekarang atau masih ada dan sistem ekonomi Islam secara ilmiah dapat dibuktikan sebagai sistem tersendiri, setidaknya setara keilmiahannya dengan sistem ekonomi Kapitalisme dan sosialisme. Untuk lebih jelasnya baca Mohamad Arif, "Toward a definition of Islamic," Journal of Research In Islamic Economics, 1985, hal. 87-103. Dan sesungguhnya membangun sebuah sistem ekonomi (baca dalam hal ini ekonomi Islam) tidak hanya memerlukan perangkat kelembagaan yang secara formal berlaku, tetapi juga membutuhkan perangkat ilmu yang secara teoritis dapat diterapkan. Artinya kita tidak sekedar perlu membentuk lembaga-lembaga yang secara normatif telah sejalan dengan nilai-nilai yang hendak kita aktualisir, tetapi juga kita perlu memikirkan bagaimanakah proses aktualisasi itu dapat secara logis dan positif berlangsung dalam kancah kehidupan dengan sendirinya. Khususnya untuk hal yang terakhir ini kita membutuhkan

Menurut *Hasanuzzaman*,<sup>55</sup> ekonomi Islam yaitu: “*Islamic Economics is the knowledge and application of injunction and rules of the Syari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform their obligation to Allah and the society.*”

Didalam definisi tersebut terungkap aktivitas ekonomi yaitu dari kata-kata “perolehan” dan “pembagian”. Aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah Syari'ah yang di dalamnya mengandung perintah (injunction) dan peraturan (rules) tentang anjuran/perintah dan larangan. Pengertian “memberikan kepuasan terhadap manusia” merupakan sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian “memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat” dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi tapi juga

---

perangkat ilmu, karena hanya dengan ilmu gejala-gejala sosial yang akan terjadi dapat diketahui dan diamalkan. Selanjutnya baca dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, suatu penelitian kepustakaan masa kini, telah di terjemahkan oleh A. M. Saefuddin, (Jakarta; Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986), hal. xx. Lebih jauh lagi M.Dawam Rahardjo, dalam bukunya *Perspektif Deklarasi Makkah* pada hal. 60, mengatakan ada beberapa pendekatan untuk merumuskan pengertian tentang ekonomi Islam. **Pertama;** menilai pengertian ekonomi modern dengan ajaran Islam. Dengan cara ini ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi dalam sorotan prinsip-prinsip Islam, dengan membawa ilmu ekonomi modern sesuai dengan Syari'ah. **Kedua;** mengambil definisi paling mutakhir dan paling sedikit dikritik, yang kemudian dinilai dengan ajaran Islam (komparatif) selanjutnya dilihat sudah sesuai / belum dengan ajaran Islam. Dan menurut Lord Robbins, yang banyak dianut saat ini bahwa ekonomi Islam adalah “suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat langka yang mengandung pilihan dalam penggunaannya, sesuai dengan Syari'at.

mengakomodasikan peran pemerintah dalam mengatur dan merencanakan semua aktifitas ekonomi termasuk didalamnya pajak dan zakat.<sup>56</sup>

Jadi paradigma ekonomi yang dikembangkan dalam Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi dengan tujuan utama mencapai kemenangan dan kebahagiaan (falaakh) di akhirat yang menekankan keseimbangan antara dimensi spritual-material, aspek jasmani-rohani dan kepentingan individu-kolektif. Namun demikian peranan mekanisme harga dan pasar tetap merupakan suatu instrumen yang berperan dalam mengalokasikan sumberdaya secara efisien sebagai suatu upaya menyejahterakan masyarakat.<sup>57</sup>

Selanjutnya **M. Dawam Rahardjo** menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik pengertian yaitu, **Pertama;** pengertian tentang ekonomi itu sendiri, yakni “pengetahuan tentang penggalian dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia.” **Kedua;** mengenai “penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syari’at” dengan kegiatan ekonomi, dalam rangka “melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.” **Ketiga;** keterangan mengenai predikat “Islam” dalam

---

<sup>55</sup> S.M. Hasanuzzaman, dalam karangannya “*Definition of Islamic Economics*” *Journal of Reseach in Islamic Economics*,(Vol. 1, No. 2/1984), hal. 50.

<sup>56</sup> Husein Sawit, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Perlukah Berbeda*, *Op. Cit.*, hal. 3.

ilmu ekonomi.<sup>58</sup> Selanjutnya jika telah diketahui masalah ilmu ekonomi, maka tugas kita dalam melakukan penelitian terhadap ekonomi Islam adalah menggali ajaran Islam atau pengetahuan Syari'ah pada umumnya dan bidang yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya bidang mua'malah.

Dan **Dr. Munawar Iqbal**, Direktur institut Internasional Islamic University, Islamabad, Pakistan mengatakan:

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan Hadist adalah batu-ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam.<sup>59</sup>

Sementara **Mohamed Aslam Mohamed Haneef** mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah "*An approach to interpreting and solving man's economic problems based on the values, norm, laws and*

<sup>57</sup> Imamudin Yuliadi, "Metodologi Ekonomi Islam", *Utilitas*, (No. 9/Tahun Ke-7/1999), hal. 84.

<sup>58</sup> M. Dawam Rahardjo, *ISLAM dan Transformasi Sosial – Ekonomi*, (Yogyakarta, Penerbit Lembaga Studi Agama dan Filsafat, cet. I, 1999), hal. 20. Maka menurut penulis label "Islam" tersebut menunjukkan model, sistem dan kebijakan yang diterapkan benar-benar seperti yang ada dalam ekonomi konvensional (bersifat positif/empirik) selain itu juga label "Islam" itu mengisyaratkan bahwa akan berdampak serius yaitu pada gilirannya akan muncul yang namanya ekonomi Hindu, ekonomi Budha dan sebagainya. Oleh sebab itu idealnya kita (umat Islam) setidak-tidaknya harus bisa membuktikan bahwa ekonomi Islam *ada secara normatif* (baca: berdasarkan moral/etika dan *ada secara positif*) dengan memiliki ilmu (sistem, model dan kebijakannya) bisa dibuktikan secara ilmiah.

<sup>59</sup> Tulisan ini dikemukakan dalam kajian tentang Islamic Economics di Islamabad, Pakistan, buku tersebut berjudul *Ajaran Nabi Muhammad saw. Tentang ekonomi : Kumpulan Hadist-hadist Pilihan tentang Ekonomi* (Economic Teachings of Prophet Muhammad), karya Muhammad Akram, dan penulis kutip dari buku M. Dawam Rahardjo, *ISLAM dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, hal. 22.

*institutions found in, and derived from, the sources of knowledge in Islam.*"<sup>60</sup>

Berdasarkan definisi di atas, ekonomi Islam sebagai sistem pemikiran dan kebijakan yang merupakan interpretasi terhadap sumber pengetahuan dalam Islam. Dan dalam mengembangkan pemikiran dan kebijakan ekonomi, metodologinya harus dibentuk sebagaimana aturan dalam melakukan interpretasi dan mengembangkan disiplinnya. Adapun metodologi Islam tersebut meliputi "prinsip-prinsip pengetahuan dan metode pengajaran yang didasarkan pada hukum-hukum Syari'ah" (dan kami menambahkan nilai, norma dan institusi.) dari bagian yang mendukung pembuktian.<sup>61</sup> Bukti-bukti ini terdiri dari bukti pokok dan kedua berdasarkan sumber-sumber hukum dan nilai-nilai Islam. Sumber ini bisa dikategorikan kedalam "wahyu, akal dan alam".

Lebih jauh lagi *Akhyar Adnan* menjelaskan setidaknya ada landasan filosofisnya, bahwa sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri yaitu : tauhid, rububiyah, khilafah, tazkiyah, mas'uliyah dan ukhuwah. Dan pada tataran yang sedikit lebih teknis, secara prinsip sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada, misalnya menyangkut pemilikan secara umum, pemilikan

---

<sup>60</sup> Mohamed Aslam Mohamed Haneef, Islam, *The Islamic Worldview, And Islamic Economics*, Malaysia, IIUM ( Journal of Economics & Management 5, No. 1), International Islamic University Malaysia Press, 1997, hal. 50.

pribadi, distribusi kekayaan, moneter, larangan atas riba ~~zakat~~ larangan atas beberapa kegiatan ekonomi, nilai-nilai positif yang harus dipatuhi dan nilai-nilai negatif yang harus ditinggalkan. Beliau melanjutkan bahwa :<sup>62</sup>

“Pemahaman yang mendalam membuktikan jika sesungguhnya sistem yang ditawarkan Islam jauh lebih sempurna dibandingkan dengan sistem yang lain; baik sosialisme dan Kapitalisme. Tidak sedikit yang mengistilahkan sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berkeadilan”.

Selanjutnya **Suroso Imam Zadjuli** mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (Sunnatullah). Sumber terpenting dalam sistem ekonomi Islam adalah al-Qur'an, al-Hadist dan suri tauladan perilaku ekonomi Islam pada zaman khalifah. Namun lanjutnya hingga saat ini belum terdapat satu literatur pun yang mengemukakan Sistem Ekonomi Islam secara totalitas/menyeluruh, Yang ada baru merupakan pembahasan secara parsial saja seperti

<sup>61</sup> Mohamed Aslam Mohamed Haneef, *Op. Cit*, hal. 50.

<sup>62</sup> Muhammad Akhyar Adnan, “Sistem Ekonomi Islam Memiliki Beberapa Ciri”, *Kabar Kampus*, (29 Desember 1999), hal. 3.

halnya Zakat, Bank Islam, Riba dan sebagainya. Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa SEI (Sistem Ekonomi Islam) merupakan sistem yang mandiri dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem-sistem yang lain. Adapun yang membedakan SEI dengan sistem ekonomi yang lain adalah :<sup>63</sup>

- a. Asumsi Dasar/Norma Pokok ataupun aturan main dalam proses interaksi kegiatan ekonomi yang di berlakuk in. Dalam SEI asumsi dasarnya adalah “Syari’ah Islam” yang berlaku secara komprehensif dan universal.
- b. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
- c. Motif Ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akherat selaku Khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Lebih lanjut penulis akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis dengan menggunakan *aksioma etika*

---

<sup>63</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Op. Cit.*, hal. 8-9. Namun setidaknya, ketika kita akan merumuskan sistem/model ekonomi Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, sorotan utama dalam ekonomi Islam adalah persoalan akhlaq manusianya. *Kedua*, rumusan tentang tujuan hidup manusia hendaknya bukan semata-mata kesenangan belaka; melainkan harus ada tujuan paling mulia dan lebih jauh yaitu kebahagiaan diakhirat. *Ketiga*, kebebasan manusia dalam hak-hak atas kebendaan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus mengacu pada kepentingan sosial. Lebih jauh baca dalam *Mencari Sistem Ekonomi Islam*, Djauhari Muchsin dalam tulisannya yang berjudul : *Studi Perbandingan Tentang Sistem Ekonomi* (sebuah rangkuman), (Yogyakarta; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, 1985), hal. 40.

Islam.<sup>64</sup> *Pertama*, Kapitalisme gagal mengejawantahkan kesatuan kehidupan (makna hidup yang sesungguhnya) dengan penekanan yang berlebihan pada nilai material manusia dengan mengorbankan aspirasi ruhaninya. Padahal sesungguhnya penghambaan terhadap perolehan material akan membekukan sifat kreatif manusia dan mengeringkan sumber kebahagiaan yang mengalir dari karya-karya kreatif tersebut. Menurut sudut pandang Islami, sikap seperti itu mengaburkan usaha manusia dengan cara yang membahayakan, malah harus dipalingkan untuk mewujudkan sifat teomorfisnya. Dalam ayat al-Qur'an disebutkan: "Yang mengumpulkan kekayaan (di dunia ini) dan menumpuk-numpuknya; ia mengira bahwa kekayaannya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam api yang menganga (QS: al-Humazah :2-4). Karena itu, perolehan uang sangat disusutkan posisinya dalam skala nilai manusia menurut etika Islam. *Kedua*, Kapitalisme merusak keseimbangan alam. Sebab kekayaan terpusat pada segelintir orang, dengan alasan bahwa kaum kayalah yang berhak melakukan investasi. Sementara dalam Islam, kehidupan adalah saling bekerja sama, walaupun sama sekali tidak

---

<sup>64</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, (Bandung; Mizan, 1985), hal. 116. Karena dalam *frame* Islam pembangunan ekonomi merupakan aktifitas *goal-oriented* dan *value-realising*, yang melibatkan keyakinan dan partisipasi yang menyerap manusia dan diarahkan untuk maksimalisasi manusia dalam semua aspeknya dan membangun kekuatan umat untuk menyalurkan perannya sebagai khalifah Allah di bumi dan sebagai *the mid-most people*. Sebab pembangunan ekonomi berarti pembangunan *moral*, *spritual* dan *material individu* dan *sosial* yang membawa kepada kesejahteraan sosial-ekonomi maksimum dan kebaikan yang mendasar dari manusia. Lihat dalam Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (Jeddah & Inggris:

menafikan persaingan, namun Islam tidak mengakuinya sebagai cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan manusia. Sebab di bawah panji Kapitalisme, persaingan bebas sangat memperparah ketidakadilan sosial. *Ketiga*, kapitalisme tidak menitikberatkan pada tanggung jawab kolektif dalam pengertian dan tingkat yang sama dengan yang dilakukan Islam. Memang benar, bahwa tanggung jawab dipaksakan atas individu melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti pajak pendapatan progresif. Padahal sesungguhnya menghindari dari kewajiban membayar pajak akan mengakibatkan ketidakpekaan individu terhadap tanggung jawab sosial dan Islam menolak perilaku sosial yang tidak bertanggung jawab.

Maka sesungguhnya lahirnya “ilmu ekonomi Islami” sebagai kebenaran, perlu diupayakan untuk menuntun kebijaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka regenerasi kebudayaan dari *homo-economicus* menjadi *homo-Islamicus*. Lebih jauh lagi berhasilnya proses regenerasi alam dalam artian islamisasi ekonomi bergantung pada ketepatan strategi untuk memulai perjalanan panjang dalam mengubah struktur sosial ekonomi yang opresif dan tidak adil yang selama ini ada.<sup>65</sup>

Walaupun demikian, keberadaan ekonomi Islam tersebut tidak berarti kita harus menghapuskan model-model ekonomi yang sudah ada saat

---

International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz & The Islamic Foundation, 1976), hal. 176.

<sup>65</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta; Rajawali Press, 1987), hal. 223.

ini, tetapi seharusnya ekonomi Islam dapat memberikan kontribusinya dengan melengkapi dan mengoreksi apa yang sudah ada dengan teori ekonomi Islam.

Dan untuk mewujudkan cita-cita serta keinginan dalam menerapkan sistem ekonomi Islam, dibutuhkan bangunan teori ekonomi yang mendukungnya, sejauh mana teori-teori ini bisa berjalan maka perlu pengujian. Pengujian teori ini dapat dilakukan kalau konsep-konsep ini menuntut adanya lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu. Sejauh ini lembaga tersebut masih sangat terbatas namun perkembangan positif ada.<sup>66</sup>

Jadi ekonomi Islam tersebut, memang ada dan bisa dibuktikan secara *normatif maupun empirik*,<sup>67</sup> seperti yang dikatakan oleh Islahi dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, walaupun menurut

<sup>66</sup> Edi Suandi Hamid, *Kurikulum Dan Silabi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; LP3EI-UII, 1998), hal. 5. Menurut penulis ini merupakan tugas/perkara yang *mudah* dikatakan tetapi *sulit* dikerjakan, sebab ini tidak kurang dari/hampir membangun teori baru. Namun sebagai Muslim, kita harus melakukannya jika kita ingin berkontribusi solusi-solusi Islam yang orisinal bagi masalah-masalah manusia dan jika kita ingin berhenti bersikap sebagai *'free-loader'* dalam ilmu-ilmu sosial

<sup>67</sup> Selanjutnya Prof. Dr. Munrahim Misanam, dalam *Diskusi Panel: Paradigma Ekonomi Islam; Upaya Menyiapkan Konsep ekonomi Islam Alternatif Merespon Era Globalisasi*, Yogyakarta, 1998, pada hal. 1, mengatakan bahwa: idealnya suatu paradigma mengenai sesuatu haruslah berbeda dengan paradigma yang lain dalam hal yang lain. Maka paradigma ekonomi Islam pastilah berbeda dengan paradigma ekonomi yang lain seperti ekonomi *kapitalisme, marxisme dan sosialisme*. Sebagai orang Islam kita percaya bahwa adanya sistem ekonomi Islam yang dioperasikan diatas bumi ini, niscaya kesejahteraan sejati akan bisa diwujudkan di seluruh bangsa yang ada di bumi ini tanpa ada kecenderungan untuk mengeksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. Gagasan ini memang terasa sangat ambisius, namun paling tidak bukanlah sesuatu yang sia-sia. Jika kita coba menawarkan sebuah konsep ekonomi Islam tersebut kepada dunia sebagai konsep alternatif

Ibn Khaldun pada kenyataannya pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah lebih bersifat *normatif* dibandingkan nuansa *positif*.<sup>68</sup>

Adapun yang dikatakan *ekonomi positif* adalah suatu pembahasan mengenai kondisi riil dalam hubungan ekonomi atau “What Is”. Sedangkan *ekonomi normatif* adalah suatu pembahasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai tertentu atau “What ought to be”. Sumber nilai ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah tidak saja berbicara persoalan pada dataran normatif tapi juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi riil dalam masyarakat. Ada beberapa ayat al-Qur’an yang menjelaskan masalah ini, Contohnya : “Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup”.<sup>69</sup> Ayat ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan/kekayaan akan menimbulkan berbagai macam perilaku yang eksekif atau melampaui batas. Sementara dalam ayat lain dijelaskan : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang telah diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah-ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (surga)”.<sup>70</sup> Dari ayat tersebut di atas menerangkan kecenderungan umum masyarakat atau seseorang yang

---

dalam memberikan kegunaan (utility) yang optimal kepada para agen ekonomi sebagai cara paling efisien dalam pemberdayaan perekonomian umat.

<sup>69</sup> QS: Al-‘Alaq; 6-7.

<sup>70</sup> QS: Ali Imran; 140.

mengasumsikan perilaku masyarakat terhadap harta yang tak terbatas. Namun diingatkan dalam ayat tersebut bahwa balasan di akhirat (surga) jauh lebih tinggi nilainya daripada yang ada di dunia. Berangkat dari sini kita dapat mengambil suatu benang merah bahwa kecenderungan masyarakat akan harta merupakan sesuatu yang alami namun perilaku tersebut harus di kendalikan dengan adanya ganjaran yang lebih besar di akhirat. Maka sesungguhnya dalam perspektif Islam aspek normatif dan positif saling berkaitan, sebab setiap upaya memisahkan kedua aspek itu akan berakibat timbulnya distorsi dalam kehidupan masyarakat.<sup>71</sup>

Namun demikian penulis masih ragu jika keberadaan ekonomi Islam tersebut kita mendasarkan diri/mengacu pada praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebab menurut hemat penulis apa yang dilakukan Nabi bukanlah model/ilmu ekonomi Islam seperti yang ada selama ini dan jika ada secara mikro ekonomi, namun belum tersusun secara sistematis tentunya belum bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu ekonomi Islam. Hal itu dikarenakan yang dilakukan Nabi hanyalah praktek ekonomi yang memang sudah “*taken for granted*” dalam agama (baca : Islam). Tetapi paling tidak, kita berusaha untuk menggantikan *value judgement* ekonomi non-Islam (dalam hal ini ekonomi Kapitalisme) dengan *value judgement* Islam dan menambah stock ekonom mengenai ketegasan positif dengan ketentuan Islam, selanjutnya menjalankan konsekwensi-konsekwensinya;

---

<sup>71</sup> Imamudin Yuliadi, “Metodologi Ekonomi Islam”, *Op. Cit.*, hal. 85.

lebih jauh lagi kita mempunyai semangat dan memang “harus” untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikannya sedini mungkin.

Selanjutnya jika keberadaannya (ekonomi Islam) benar-benar diakui sebagai sebuah sistem ekonomi yang mandiri, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi, tentunya hal ini akan mudah dilakukan kalau teori ekonomi Islam itu sudah memiliki *bentuk standard dan isi yang* jelas serta teruji dalam pelaksanaannya, dan mampu memecahkan problem ekonomi yang ada di tengah-tengah kemapanan teori-teori ekonomi yang sudah ada. Tetapi pada dasarnya kita harus memulai dari sekarang untuk terus mengedepankan semangat untuk menerapkan ekonomi Islam (dengan memulainya dari diri kita sendiri), sebab menurut hemat penulis sistem ekonomi Islam ini akan terus berkembang (dinamis) seiring dengan perubahan waktu dan munculnya kesadaran masyarakat bahwa sistem ekonomi yang ada sekarang jauh dari norma-norma yang dianjurkan agama.

**BAB III**  
**PRINSIP EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM**  
**TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN**

**A. Menurut Ekonomi Kapitalisme**

Pada dasarnya distribusi kekayaan/pendapatan<sup>1</sup> merupakan tujuan utama dalam semua aktifitas ekonomi. Hal ini dikarenakan faktor-faktor produksi yang berperan dalam aktifitas ekonomi tepatnya ditujukan dalam rangka memperoleh saham yang “fair” dalam jumlah output, persis seperti petani, di mana semua usaha dan investasinya bertujuan memperoleh panen besar. Dengan demikian, struktur suatu masyarakat yang “baik” akan

---

<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud dengan *distribusi kekayaan/pendapatan* adalah suatu cara dimana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan menyangkut juga prinsip yang menentukan bagian dari faktor-faktor tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: *Pertama*, penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat. *Kedua*, pembagian barang keperluan sehari-hari (saat keadaan darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Lebih jelasnya baca dalam, Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*/Muhammad as a Treader, (Jakarta; Yayasan Swarna Bumi, 1995), hal. 285. Baca juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1989), hal. 238, artikel “Distribusi”. Sementara Kenneth E. Boulding dalam bukunya *Economic Analysis*, Third Edition, (New York; Harpen and Brothers, 1955), pada hal. 197, dikatakan bahwa kata “*distribusi*” seperti banyak kata lainnya boleh diartikan dengan “jumlah sesuatu”. Dalam phrase diartikan sebagai “distribusi barang”, hal itu menunjukkan proses penyaluran barang dari tempat yang aslinya sebagai konsumen terakhir, atau apa yang terkenal dengan “marketing”. Selanjutnya Paul A. Samuelson & William D. Nordbans, dalam bukunya, *Mikro Ekonomi*, Edisi Keempat Belas (Jakarta; Erlangga, 1993), hal. 417 menjelaskan kata “*pendapatan*” berarti penerimaan total atau kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu yang tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan ini terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) dan tunjangan transfer pemerintah. Sedangkan “*kekayaan*” artinya nilai rupiah bersih aktiva (asset) yang dimiliki pada waktu tertentu.

ditentukan tidak hanya oleh “efisiensi” mesin alokasinya, tetapi juga oleh “kejujuran” (fairness) mesin distribusinya.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu banyak ekonom telah berusaha untuk menyederhanakan studi pendahuluan tentang distribusi pendapatan dengan berpikir dari segi “timbunan–barang nasional”. Dikarenakan setiap individu membawa dan mengkontribusikan barang-barang ekonomis yang telah dapat ia produksi pada suatu periode tertentu dan dari mana ia mendapat berbagai barang (komoditas) dan jasa yang ia inginkan.<sup>3</sup>

Distribusi pendapatan (*distribution of income*) oleh beberapa penulis dikatakan bahwa distribusi pendapatan adalah sesuatu yang tidak berubah. Sebab mereka percaya bahwa studi statistik menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi pendapatan sangat mencolok dan hal ini merupakan jenis pernyataan yang wajar dari masyarakat yang maju. Mereka berpikir bahwa dampak dari perubahan tersebut bagi pekerja akan berakhir dengan bencana bagi masyarakat.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> M. Umer Chikra, terj. Nurhadi Ikhsan & Rifqi Amar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1999, ) hal. 57.

<sup>3</sup> Ralph. H. Bladgett, *Comparative Economic System*, (New York; The Macmillan Company, 1949), hal. 381. Menurut *Adam Smith* pembayaran uang yang terbesar untuk membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan laba. Dari pengamatannya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, “sistem kebebasan alamiah yang sederhana dan gamblang itu” selain menguntungkan kapitalisme juga sangat jelas mengandung sejumlah kelemahan mendasar. Baca dalam George Soul, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 57.

<sup>4</sup> Elizabeth Ellis Hoyt, *The Income Of Society; An Introduction To Economic*, (New York ; The Ronald Press Company, 1950), hal. 156.

Namun para ekonom klasik seperti Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Karl Marx dan Henry George merasa yakin bahwa distribusi pendapatan personal akan berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan hal itu dikarenakan distribusi personal akan mendapatkan lebih buruk. Mereka percaya bahwa pembagian pendapatan nasional akan dimiliki oleh kepemilikan individu, sebagian lagi dimiliki oleh negara tentu akan mendapatkan lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh para pekerja yang mendapat lebih kecil. Mereka juga percaya bahwa jumlah pekerja yang terlatih tidak bisa dikembangkan melebihi batas campuran, maka peningkatan penduduk dan keikutsertaan negara menjadi lebih tinggi, sebab bagaimanapun milik negara mampu untuk meningkatkan pendapatan yang lebih banyak dari penggunaan hak milik mereka.<sup>5</sup>

Adapun model distribusi pendapatan dalam ekonomi Kapitalisme (ada tiga faktor sangat berpengaruh yaitu: upah, tenaga kerja dan modal) sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan produktif dimiliki secara privat/swasta/pribadi untuk sebagian terbesarnya. Di bawah konsep distribusi yang disederhanakan tersebut, jelaslah bagi kebanyakan orang bahwa setiap individu harus diizinkan mengambil komoditas dan jasa dari timbunan barang itu secara proporsional dengan kontribusi yang dapat diberikan ke timbunan barang tersebut olehnya atau sejumlah agen produktif yang dimilikinya. Ia tidak akan punya keinginan untuk mengambil komoditas dan jasa yang sama

---

<sup>5</sup> Elizabeth Ellis Hoyt, *Ibid.*, hal. 147.

dengan yang telah ia masukkan, tetapi barang (komoditas) dan jasa yang diambil, diharapkan akan memiliki nilai total yang sama seperti yang dikontribusikan.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut teori ini, tingkat upah/remuneration yang diterima oleh para pemilik suatu kelas tertentu dari agen produktif cenderung ditentukan oleh permintaan (demand) dan penawaran (supply) dalam jangka panjang dan dibawah kondisi-kondisi kompetitif, sehingga nilainya sama dengan produktivitas marjinal dari kelas agen produktif yang dimaksud dapat diberikan agen produktif ini pada nilai tukar barang dan jasa tersebut. Terdapat perbedaan yang mencolok dalam tingkat upah rata-rata, sama sulitnya dengan merata-ratakan orang. Contoh seorang manager bank swasta bisa memperoleh \$4 juta per tahun, sedangkan seorang kerani hanya mendapat \$15.000 dan seorang buruh tani \$12.000. Dalam pabrik yang sama, seorang mekanis memperoleh \$500 per minggu, sedangkan nelayan hanya mendapat \$200, maka seharusnya teori upah yang lengkap harus mampu menjelaskan perbedaan-perbedaan itu. Selanjutnya sarana analisis dalam ilmu ekonomi yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja, kita dapat memahami fenomena dasar dari struktur upah.<sup>7</sup> Dan penulis tidak akan membahas masalah upah ini secara spesifik, tetapi hanya sebatas pembahasan yang bersifat ilustratif saja.

---

<sup>6</sup> Ralp. H. Bladgett, *Comparative Economic System, Op. Cit.*, hal. 382.

<sup>7</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordbaus, *Op. Cit.*, hal. 274.

Adapun asumsi-asumsi dari teori distribusi yang secara spesifik dijelaskan sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Ada banyak peminta (*demanders*) dan penawar (*suppliers*) dari setiap agen produktif atau kelas suatu agen.
2. Para pengguna dari setiap agen bersaing secara aktif memperebutkan peluang-peluang yang tersedia untuk pendaugaannya, dengan tanpa kombinasi, organisasi, atau konspirasi pada salah satu sisi pasarnya.
3. Para pemilik setiap agen produktif dan mereka yang menggunakannya dalam produksi mendapat informasi yang cukup baik mengenai kondisi pasar yang mempengaruhi agen tersebut.
4. Setiap agen produksi bersifat mobil (bergerak) di seputar tempat-tempat dan posisi (jabatan) seseorang.
5. Ada suatu persamaan daya tawar antara penawar (*supplier*) dan para peminta (*demanders*) pada setiap agen produksi.
6. Pemerintah tidak campur tangan dalam distribusinya, dan tingkat upah untuk para pemilik faktor-faktor produktif ditentukan secara eksklusif oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan di pasar.
7. Para pengusaha (*enterpriser*) yang meminta agen-agen produktif menjual produk-produk mereka sendiri dalam situasi pasar yang sangat kompetitif.

---

<sup>8</sup> Ralp. H. Bladgett, Op. Cit., hal. 383..

Lebih jauh lagi untuk menilai terealisasi atau tidaknya asumsi-asumsi di atas, secara praktek distribusi pendapatan dalam kehidupan ekonomi aktual akan serupa dengan yang diimpikan oleh teori umum tersebut. Akan tetapi kita dapat mengatakan bahwa bermacam-macam asumsi ini jarang atau jika pernahpun, maka sepenuhnya *benar*/sepenuhnya *salah* sebagai diskripsi tentang kondisi pasar aktual sehubungan dengan distribusi dalam sistem perekonomian kapitalistik, dan sejauh mana asumsi-asumsi itu terlaksanakan sangat tergantung pada situasi yang bervariasi dari satu agen produksi ke agen produksi lainnya pada waktu yang sama. Meskipun sebagian dari asumsi-asumsi tersebut dapat saja *tidak valid* pada waktu tertentu dan kelas-kelas tertentu dari agen produksi, maka asumsi bahwa pemerintah tidak mencampuri distribusi pendapatan telah menjadi semakin “kurang berlaku” dalam perekonomian kapitalistik dalam tahun-tahun belakangan ini.

Di Amerika Serikat misalnya, pemerintah federal dalam periode perang mencampuri atau menentukan rente di banyak bidang di negara tersebut; pemerintah memberlakukan sebuah undang-undang yang mempromosikan dan mendukung organisasi-organisasi pekerja sebagai tujuan tawar-menawar kolektif dengan pihak majikan; pemerintah telah menjalankan kebijakan-kebijakan finansial yang mempunyai efek sangat besar pada suku bunga dalam perekonomian tersebut; dan pemerintah juga secara mencolok mengubah distribus. final pendapatan uang dengan pengurangan pajak progresif yang berat pada pendapatan dan laba yang berlebihan. Jadi secara

umum teori distribusi secara keseluruhan, perlu untuk disimpulkan bahwa distribusi yang dispesifikasikan oleh teori umum tersebut belum baku (final) dari suatu aproksimasi (tidak sentralistik) yang muncul dalam praktek aktual terhadap sistem perekonomian kita.<sup>9</sup>

Dan *John Stuart Mill* menyatakan bahwa distribusi pendapatan dalam ekonomi kapitalisme yang walaupun ia banyak memakai pengertian-pengertian seperti yang digunakan oleh teori pembagian yang klasik, berupa upah dan teori Malthus tentang penduduk, namun ia menunjukkan kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai tujuan. Menurutnya upah riil yang akan diterima oleh kaum buruh, jika tidak terpaksa karena putus asa tidak mencukupi keperluan hidup semata-mata tetapi harus disesuaikan pula dengan tingkat penghidupan yang berlaku.<sup>10</sup>

Sungguhpun demikian dia membenarkan pemikirannya David Ricardo di mana keuntungan harus turun jika biaya kerja naik, namun ongkos buruh tersebut tidak sama dengan upah. Lebih lanjut dikatakan bahwa : “ongkos buruh sering paling tinggi dan upah paling rendah”, sebab biaya buruh menjadi lebih efisien, dan mereka juga bisa dipekerjakan dengan kemajuan teknologi.

Oleh sebab itu semakin besar modal oleh suatu negara, semakin tinggi upah yang dapat dibayarkan, karena dengan adanya akumulasi modal suatu

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 384-385.

negara menjadi lebih produktif. Hal ini didukung oleh realitas yang terjadi di masyarakat, sejauh ini Smith (*baca*: bahwa penulis mengajukan tokoh ini, sebab dia dianggap sebagai tokoh ekonomi klasik terkemuka yang sampai sangat ini masih diakui pemikirannya) menemukan sejumlah alasan yang menyakinkan bahwa dengan tumbuhnya industri di Inggris, maka upah riil meningkat. Ia pun dengan tepat menunjukkan adanya korelasi antara taraf hidup yang rendah di India dan China dengan keterbelakangan industri disana.<sup>11</sup>

Tetapi karena persaingan antara pekerja dalam memperebutkan pekerjaan, maka upah tidaklah mesti setinggi seperti seharusnya. Lagi-lagi menurut Smith, batas terendah upah ialah pemenuhan kebutuhan minimum untuk dapat hidup (subsistensi), sebab di bawah batas itu penduduk akan mati. Jumlah tenaga kerja yang langka disertai dengan laju peningkatan kekayaan nasional yang pesat menyebabkan upah naik, seperti yang pada umumnya terjadi di Amerika Utara. Jadi dalam hal upah pun sama seperti harga barang-barang lain, yaitu berlaku hukum permintaan dan penawaran (seperti yang dijelaskan diatas).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> George Soule, *Pikiran-pikiran Sardjana-sardjana Besar dalam Ekonomi*, (Jakarta; Pustaka Rakyat, 1958), hal. 173.

<sup>11</sup> George Soul, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*, *Op. Cit.*, hal. 58.

<sup>12</sup> Ringkasnya dalam ekonomi Kapitalis, jika seseorang mempunyai tanah, maka ia akan mendapat sewa. Jika ia sebagai seorang pekerja, maka ia akan mendapat upah; dan sebagai seorang kapitalis, ia akan memperoleh bunga. Selanjutnya jika ia seorang pengusaha, maka ia akan menerima laba. Jelasnya baca dalam Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 311.

Hal ini menurut Adam Smith, tingkat kelahiran orang-orang miskin amat sangat tinggi, tetapi angka kematian bayi juga sangat tinggi – kebenaran ini kemudian diperkuat oleh penelitian statistik. Tingkat kelahiran yang tinggi menambah penawaran angkatan kerja dan cenderung mempertahankan upah pada tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sekedar untuk hidup (subsistensi) dalam perekonomian yang statis, atau malahan kurang dari itu bila perekonomian mengalami kemunduran. Sebab syarat utama untuk menaikkan upah dalam perekonomian yang berkembang – yaitu suatu perekonomian yang mampu memproduksi dengan laju pertumbuhan yang lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, kemakmuran orang-orang kaya menyebabkan tingkat kelahiran di kalangan mereka turun dan dengan demikian kekayaan cenderung terpusat di kalangan orang-orang kaya saja.

Satu hal yang perlu dikemukakan di sini, bahwa *Paul Douglas* yang merintis tentang perubahan dalam jumlah tenaga kerja dan membiarkan pembagian tenaga kerja relatif dan modal kurang lebih sama. Kenyataan menunjukkan secara empiris saham relatif tenaga kerja cenderung berada pada keadaan yang diramalkan, sehingga mengindikasikan distribusi pendapatan antara tenaga kerja dan modal dalam keseluruhan kira-kira sama dengan yang dihasilkan dalam keadaan persaingan sempurna. Akan tetapi ini bukanlah berarti perekonomian Amerika Serikat merupakan persaingan sempurna. Dan yang dapat dikatakan ialah ketidaksempurnaan semacam itu dalam persaingan

seperti yang telah ada tidaklah mempengaruhi seluruh distribusi pendapatan antara tenaga kerja dan modal. Walaupun harus diakui bahwa keadaan yang tidak sempurna pada pasar memang mempunyai pengaruh terhadap distribusi pendapatan, akan tetapi yang paling besar dari ketidaksempurnaan ini ialah dalam bidang redistribusi pendapatan di sektor tenaga kerja daripada antara tenaga kerja dan pemilik modal.<sup>13</sup>

Dan dalam hal *penduduk*, menurutnya bertambahnya jumlah penduduk dapat diatasi, dan laba yang besar, upah yang tinggi mungkin memiliki persamaan. Kecenderungan ini pada kenyataannya terdapat di Inggris dan Amerika Serikat sejak tulisan Mill ditulis. Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa doktrin harga adalah khusus tentang pembagian yang berlaku pada ekonomi kapitalis, daripada “hukum alam”, doktrin tersebut dapat diubah, seraya mengingatkan bahwa kebenaran-kebenaran dalam ekonomi bersifat global (tentatif) saja.<sup>14</sup>

Adapun tentang *laba*, Adam Smith mengatakan jika suatu negara berhasil mengadakan akumulasi modal, maka tingkat keuntungan cenderung turun karena semakin banyak persaingan di dunia industri. Implikasinya dalam masyarakat yang masih terbelakang kesenjangan antara yang kaya dan miskin justru lebih tajam. Selanjutnya ia sangat menentang monopoli, sebab

---

<sup>13</sup>Don Bellante & Mark Jackson, (Ed. Pratama Raharja), *Ekonomi Ketenagakerjaan; Pasar Tenaga Kerja Dan Distribusi Pendapatan*, (Jakarta ; Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1983), hal. 449-450.

<sup>14</sup>George Soule, *Pikiran-pikiran Sardjana-sardjana Besar Ekonomi*, *Op. Cit.*, hal. 174.

monopoli merupakan musuh besar manajemen profesional. Manajemen yang baik tidak akan pernah dilaksanakan kalau orang “tidak dipaksa” oleh persaingan bebas untuk menerapkannya agar bisa bertahan.<sup>15</sup>

Mengenai *sewa*, Smith berpendapat bahwa sewa pada hakikatnya merupakan suatu harga monopoli. Jika diilustrasikan bahwa tanah yang dibutuhkan itu terbatas, maka orang-orang yang memilikinya dapat menarik bayaran tertentu dari pemakai. Sewa ini bukan upah tenaga kerja ataupun balas jasa bagi para pemilik modal/investor.<sup>16</sup> Sebab sewa yang tinggi semata-mata akibat dari kekayaan nasional yang melimpah atau tingkat upah yang tinggi. Dalam analisisnya tentang sewa, Adam Smith telah merintis teori terkenal tentang “*unearned increment*” (penghasilan bukan karya) Teorinya itu juga mencerminkan kecurigaan produsen barang-barang industri terhadap sisa-sisa sistem feodal dan para pemilik tanah.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*, *Op. Cit.*, hal. 59.

<sup>16</sup> Adapun yang dimaksud dengan *sewa tanah* adalah bayaran kepada pemilik tanah, karena digunakannya sumberdaya alam ini. Pembayaran kepada tuan tanah itu dapat juga termasuk bunga atas kapital yang dipergunakan untuk memajukan tanah, gedung dan sebagainya. Tapi pembayaran ini berbeda dengan sewa itu sendiri, sebab pemilik tanah dapat mengambil sebagian dari laba rata-rata yang biasanya merupakan tambahan bagi petani penyewa. Atau sebagian dari laba-lebih (kelebihan laba) yang datang dari upah pertanian yang rendah, tapi Marx mengabstraksikannya sebagai penyimpangan terhadap norma-norma kapitalisme. Hal ini disebabkan dalam sistem kapitalis, tanah merupakan sumber pendapatan. Harga tanah ditentukan oleh kapitalisasi sewa yang dihasilkan. Sebab sewa sudah menerangkan harga tanah dan tidak sebaliknya, sebagai contoh: dengan 5% suku bunga, maka tanah yang menghasilkan sewa 200 a' acre layak berharga 4000, sebab 200 adalah 5% dari 400 pounds. Karena tanah itu aman dan *berprestige* sebagai aset, dalam kenyataannya ia dapat menentukan harga yang relatif tinggi, walaupun pengembalian tanah dapat saja rendah ketimbang aset lainnya. Tulisan ini penulis kutip dari Anthony Brewer, *Kajian Kritis DAS Kapital Karl Marx*, (Jakarta; Teplok Press, 1999), hal. 261.

<sup>17</sup> George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*, *Op. Cit.*, hal. 59.

Selanjutnya Ricardo mengatakan bahwa sewa adalah bagian hasil tanah yang dibayarkan kepada tuan tanah untuk penggunaan kekayaan tanah asli dan tidak rusak. Menurutnya sewa merupakan surplus diferensial yang berarti selisih hasil tanah mutu unggul dengan hasil tanah mutu rendah, atau mungkin juga timbulnya sewa karena kesulitan tanah sehubungan dengan permintaan. Sementara Profesor **Marshall** menjelaskan bahwa hakikat pengertian sewa adalah pengertian tentang suatu surplus yang diperoleh suatu kesatuan khusus faktor produksi yang melebihi penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya.<sup>18</sup>

Lebih luas lagi implementasi kongkret dari teori tentang distribusi harta/pendapatan ini, maka dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Namun para pakar ilmu ekonomi telah memusatkan perhatian terhadap dua saja yaitu : distribusi “fungsional” (pembahasannya menyangkut pembagian pendapatan di antara pekerja dan pemilik modal) dan distribusi pendapatan “ukuran”.

#### a. Ukuran Distribusi Pendapatan<sup>19</sup>

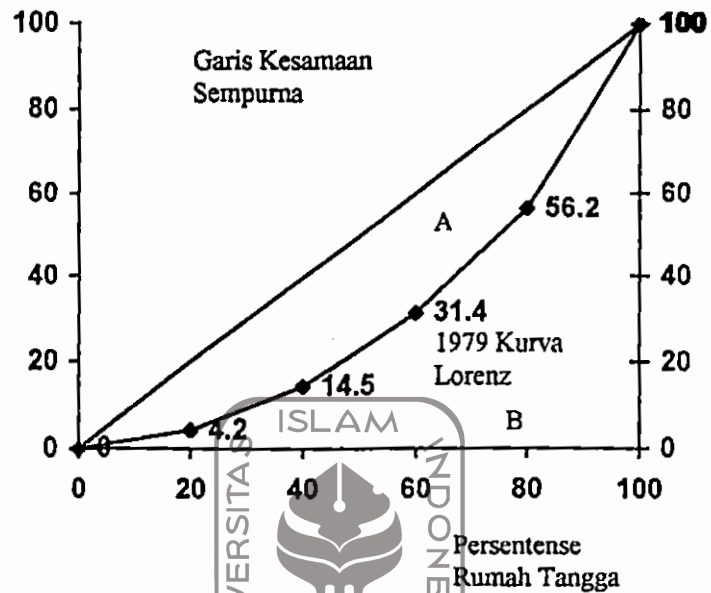
Ukuran distribusi merupakan suatu konsep tentang penyebaran pendapatan baik bersifat individual maupun rumah tangga dalam masyarakat. Dengan kata lain, ukuran distribusi pendapatan membahas derajat ketidaksamaan pada distribusi pendapatan. Tiga di antaranya yang paling lazim digunakan ialah:

<sup>18</sup> Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, *Op. Cit.*, hal. 115.

<sup>19</sup> Don Bellante and Mark Jackson, *Op. Cit.*, hal. 447-458.

- 1). Kurva Lorenz
- 2). Indeks atau Rasio/Koefisien Gini
- 3). Kriteria Bank Dunia

Pada dasarnya kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif juga. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri "ditempatkan" pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Maka kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang *semakin merata*. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan keadaan distribusi pendapatan yang *semakin buruk* dan tidak merata. Adapun alat untuk mengukurnya dengan grafik yang biasanya menggunakan kurva Lorenz. Kurva ini menunjukkan juga persentase kumulatif pendapatan yang di terima, dapat digambarkan pada persentase kumulatif rumah tangga dalam masyarakat yang menerima pendapatan itu. Hal itu tercermin dalam *gambar* 1.1 dibawah ini, yang merupakan kurva Lorenz untuk tahun 1979 .



Gambar : 1.1 Kurva Lorenz dan Koefisien Gini Pendapatan Rumah Tangga di Amerika

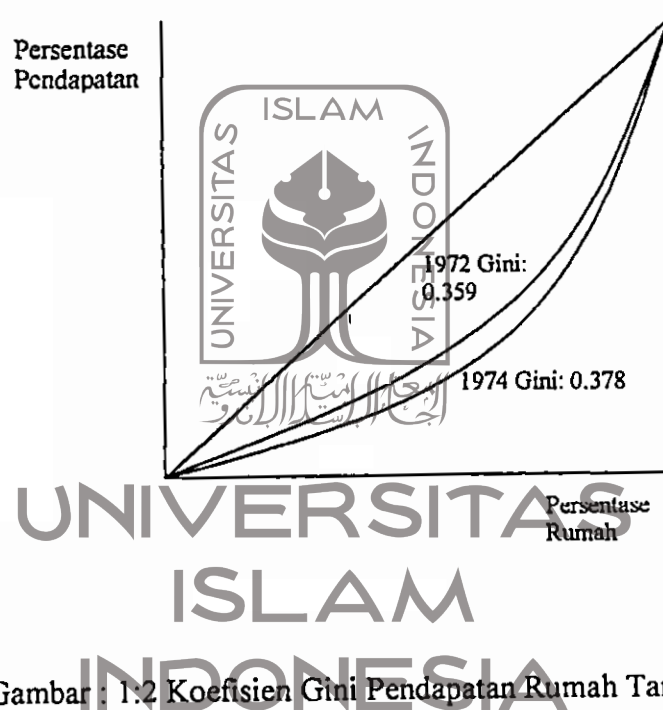
Kurva tersebut juga melukiskan fakta bahwa jumlah 20% yang terendah di kalangan rumah tangga menerima 4,21% dari seluruh pendapatan, 40% yang terendah menerima 14,51% dari jumlah seluruh pendapatan, demikianlah seterusnya untuk persentase lainnya. Garis lurus itu menunjukkan bagaimana kurva Lorez itu seharusnya jika pendapatan didistribusikan secara sempurna dan merata di kalangan rumah tangga. Sebagai lawannya yang ekstrim, ketidaksamaan yang sempurna akan terjadi manakala semua pendapatan diterima oleh suatu rumah tangga. Dalam kasus

ini, kurva Lorenz akan mengikuti sumbu horizontal dan sumbu vertikal pada sisi kanan, membentuk sebuah siku-siku. Jadi intinya *semakin dekat* kurva Lorenz berada pada garis persamaan yang sempurna, *semakin sama* pendapatan didistribusikan.

Selanjutnya informasi grafis yang dimaksud oleh kurva Lorenz dapat dilukiskan dengan angka melalui perantara koefisien Gini. Koefisien ini adalah ratio area antara kurva Lorenz dan garis persamaan yang sempurna atau suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusinya. Demikian juga koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang sangat timpang atau senjang,<sup>20</sup> (tercermin area A pada gambar 1.1) dengan seluruh area di bawah garis persamaan yang sempurna (jumlah area A dan B pada gambar 1.1). Maka koefisien Gini akan mempunyai nilai nol apabila pendapatan dibagi sama secara sempurna, dan suatu nilai 1,00 di bawah ketidaksamaan yang sempurna.

Pada *gambar* 1.2 dibawah ini diperlihatkan koefisien Gini untuk Amerika pada tahun 1947 dan 1972. Selama masa 25 tahun yang memisahkan kedua tahun tersebut, maka derajat

ketidaksamaan pendapatan nampaknya mengalami sedikit sekali perubahan. Hal ini disebabkan banyak orang cenderung memandang distribusi pendapatan yang nampak stabil di Amerika Serikat sebagai “terlampau tidak sama” atau “tidak merata”.



Gambar : 1.2 Koefisien Gini Pendapatan Rumah Tangga di Amerika

Sementara itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah faktor *pertumbuhan ekonomi*.<sup>21</sup> Sehingga sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi masyarakat

<sup>20</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia, Op. Cit.*, hal. 53-54.

<sup>21</sup> Wijaya mendefinisikan pertumbuhan ekonomi ialah sebuah proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan terjadi jika ada kenaikan out put per kapita.

tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB atau Gross National Product/GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestik Product/GDP).<sup>22</sup> Selanjutnya PNB atau PDB mengukur hasil keseluruhan sebuah negara, padahal besar negara (dalam arti jumlah/kuantitas penduduknya) berlainan. Oleh karena itu agar bisa membandingkannya, maka digunakan ukuran PNB/kapita atau PDB/kapita. Dengan demikian dapat dilihat produksi rata-rata setiap orang dari negara yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Maka seluruh kekayaan yang dimiliki atau diproduksi oleh negara itu tidak berarti menjadi milik semua penduduknya. Bisa jadi, sebagian kecil orang di negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar yang lain hidup dalam kemiskinan. Jadi sebuah negara yang tinggi PNB/kapitanya bisa saja kita temukan di mana-mana terdapat penduduk miskin, tidak punya tempat tinggal dan kedinginan pada musim dingin. Oleh karena itu dibutuhkan indikator yang lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu faktor pemerataan ekonomi.<sup>24</sup>

---

Selanjutnya baca dalam Faried Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika-Ekonomika Makro*, (Yogyakarta; BPFE, Ed. III, Cet. I, 1992), hal. 264-265.

<sup>22</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, Cet. III, 1996), hal.2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

### b. Sumber Ketidaksamaan<sup>25</sup>

Pada dasarnya identitas terdekat pada kedua koefisien menunjukkan dan lebih meyakinkan bahwa ketidaksamaan dalam distribusi kekayaan *bukanlah* sumber utama dari ketidaksamaan pendapatan secara keseluruhan. Sebaliknya ketidakmerataan pendapatan disebabkan ketidakmerataan tenaga kerja, pemilikan kekayaan. Orang-orang yang sangat kaya apakah karena warisan, kemampuan, atau keberuntungan menikmati pendapatan jauh di atas jumlah yang diperoleh rumah tangga rata-rata. Sebab orang-orang yang tidak memiliki kekayaan sulit memperoleh pendapatan besar.<sup>26</sup> Sementara koefisien Gini dan kurva Lorenz mengambil garis persamaan yang sempurna sebagai norma perbandingan dengan distribusi yang ada. Akan tetapi jika ditentukan perbedaan yang ada dalam soal cita rasa, kapabilitas, investasi human kapital, jumlah jam kerja dan variabel lainnya, persamaan pendapatan sempurna menjadi tidak berarti sebagai standar perbandingan. Maka jika distribusi pendapatan “kurang sama” di Amerika Serikat dibandingkan dengan negara makmur seperti Swedia atau negara totaliter seperti Uni Sovyet (sekarang Rusia) ini berarti tidak diragukan lagi menggolongkan Amerika memiliki distribusi rendah.

<sup>25</sup> Don Bellante and Mark Jackson, *Op. Cit.*, hal. 459.

<sup>26</sup> Paul A. Samuelson & Willam D. Nordbaus, *Op. Cit.*, hal. 420.

Sungguhpun demikian identifikasi distribusi ini sebagai “ideal” merupakan suatu persoalan yang murni *normatif* atau *filosofis*, bukanlah sasaran bagi analisis ekonomi. Sekalipun jika salah satu atau lain distribusi diterima sebagai “ideal”, distribusi Amerika tidak dapat dianggap rendah, kecuali jika menyimpang besar sekali dari distribusi yang “ideal”.

## B. Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, yang menjadi obyek bahasan dalam distribusi pendapatan antara lain tentang konsep/prinsip *sewa dan upah, modal dan tenaga kerja*. Kita mulai dengan faktor yang *pertama* yaitu *sewa dan upah*, yang mana secara historis tidak terdapat “bukti” mengenai konsep sewa dalam istilah modern (namun menurut Umer Chapra permasalahan sewa masih mengalami kontraversial di kalangan ulama fiqih)<sup>27</sup> yang pernah

<sup>27</sup> Para ahli fiqih tidak mengizinkan baik tanam *bagi hasil* maupun *sewa* tanah untuk masa tertentu dan menegaskan bahwa seorang pemilik tanah harus menanam sendiri tanahnya sebisanya dan memberikan sisanya kepada orang lain agar bisa melakukan hal yang sama. Namun ada dikalangan ahli fiqih membolehkan tanam bagi hasil, tetapi melarang sewa untuk masa tertentu. Keberatan mereka adalah walaupun pada mulanya Nabi SAW tidak menganjurkan tanam bagi hasil dan sewa tanah untuk masa tertentu, tetapi kemudian beliau mengizinkan tanam bagi hasil dan ini telah menjadi praktek luas di kalangan sahabat Nabi dan penerusnya. Walaupun demikian mayoritas ahli fiqih “membolehkan” baik tanam bagi hasil maupun sewa untuk masa tertentu, yang disesuaikan dengan dibolehkannya *mudharabah* dan sewa dalam *Syari'ah*. Adapun argumentasi mereka bahwa kemiskinan mayoritas ummat Islam di masa awal periode Madinah telah mendorong Nabi SAW, untuk lebih banyak menuntut dari orang kaya. Dan untuk lebih adilnya, maka para ahli fiqih yang membolehkan sewa untuk masa tertentu, diharapkan mereka akan berusaha untuk menjamin keadilan kepada penyewa dengan menyepakati sejumlah persyaratan validitas kontrak sewa tanah. Contohnya, menurut Imam Malik bila hasilnya rusak atau penyewanya tidak dapat menanam tanah yang disewa karena diluar kontrolnya (misalnya banjir atau kekeringan) maka kontrak dapat dibatalkan karena resiko yang berlebihan dan tidak menentu. Silakan baca: *Shahih – Muslim*, vol. 3, 1995, hal. 1186 : 90, juga Abdul Hamid Abu Sulaiman, “The theory of the Economic of Islam”, dalam *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam*, 1976, hal. 9-12.

dikembangkan pada masa Nabi Muhammad SAW, barangkali (menurut Abdul Mannan) pada masa itu tidak terdapat kekurangan tanah. Kebutuhan tersebut telah berlangsung lama dan permanen dirasakan selama masa Khalifah ‘Umar, sebagai akibat penaklukan Irak, Suriah, Iran dan Mesir. Lagi-lagi menurut Abdul Mannan konsep sewa dalam bentuk yang sederhana telah berkembang tidak hanya karena langkah revolusioner ‘Umar dengan adanya larangan pembelian tanah oleh kaum Muslimin di wilayah yang ditaklukkan, tetapi juga karena dihentikannya praktek mendistribusikan tanah<sup>28</sup> taklukan dikalangan kaum Muslimin. Selanjutnya ‘Umar mengizinkan para penggarap tanah asli untuk membudidayakan tanah mereka berdasarkan pembayaran *Kharaj* dan *Jizyah*.<sup>29</sup>

Oleh karena itu praktek Nabi SAW pada periode awal di Madinah mengindikasikan jika negara Islam memiliki wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan para petani pemilik tanah dan yang tidak memiliki tanah dan juga mengurangi pemusatan kekayaan di masyarakat Muslim. Dalam rangka

<sup>28</sup> Adapun yang dimaksud dengan *distribusi tanah* adalah suatu penentu utama untuk distribusi pendapatan dan kemiskinan. Maka negara-negara yang telah menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan suatu distribusi pemilikan tanah yang adil, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Costa Rica telah mampu mencapai suatu distribusi pendapatan yang relatif lebih adil, sementara negara-negara yang membolehkan berlangsungnya pemilikan tanah mengalami kemiskinan yang tinggi dan distribusi pendapatan tidak adil. Lihat dalam Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, pada hal. 113.

<sup>29</sup> *Kharaj* adalah salah satu bentuk pajak yang bisa dirubah oleh pemerintah Islam, dan tidak disebutkan oleh al-Qur’an tetapi berdasarkan *ijma’*. Adapun yang dimaksud dengan *Jizyah* adalah pajak untuk mendapatkan hak memilih yang ditetapkan bagi orang non-Muslim yang bersumber dari al-Qur’an, yaitu: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-

melindungi kepentingan kedua belah pihak, ada tiga unsur yang menjadi pertimbangan di negara Islam yaitu:<sup>30</sup> produktivitas tanah, penggarap dan kesejahteraannya dan biaya pengolahan, sebelum penetapan sewa atas tanah.

Dari ketiga unsur diatas, kesejahteraan petani penggarap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sewa atas tanah dan pemilik tanah dianggap tidak adil, jika menetapkan sewa atas tanah tersebut melebihi dari apa yang dihasilkan tanah tersebut, walau dalam kondisi apapun.

Ada dua prinsip yang mendasari sewa atas tanah yaitu: **Pertama**, keadilan yang berarti sewa yang dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka merasa bahagia dan puas, dengan demikian harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanah tersebut. **Kedua**, kemurahan hati yang berarti sewa yang akan dipungut ketika mereka menghasilkan melebihi diatas kebutuhan mereka.<sup>31</sup>

Faktor yang kedua berlaku adalah **modal**, sebagaimana yang kita ketahui bahwa modal dalam ekonomi modern sangat ditentukan oleh tingkat bunga, permintaan dan penawaran, modal juga ditentukan seberapa besar tingkat bunga yang berlaku. Adalah ekonomi Keynesian memandang jika tingkat bunga tinggi, maka tabungan yang terbentuk menjadi besar sehingga

---

orang yang telah diberi al-Kitab, kecuali jika mereka memabayar jizyah dengan tunduk dan patuh. (QS; at-Taubah: 29). Lihat juga dalam Amrullah dkk, *Op. Cit.*, hal. 43.

<sup>30</sup> Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 179.

<sup>31</sup> Selanjutnya baca dalam Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.178.

sumber modal pun menjadi besar tetapi konsep ini mengandung kelemahan, sebab jika kegiatan bunga tinggi, maka investasi akan menurun. Hal ini berarti kegiatan ekonomi akan mengalami penurunan. Adapun yang dimaksud dengan modal dalam ekonomi Islam adalah “Sarana produksi yang menghasilkan” tidak sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Pada kenyataannya modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alam. Dalam karya-karya Wicksell, modal adalah “Suatu keseluruhan tunggal yang terpadu dari tanah dan tenaga kerja yang tersimpan, bertumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun lamanya.” Oleh karena itu dalam suatu masyarakat bebas-bunga, modal dapat diperlakukan dalam pengertian yang digunakan dalam produksi kapitalistik. Karena sistem ekonomi Islam mendukung suatu masyarakat yang seimbang, perbedaan antara modal pribadi dan sosial jadi tidak penting. Tetapi tidak demikian hanya dalam masyarakat kapitalis sekarang ini, di mana pinjaman perang oleh pemerintah adalah modal. Lain halnya dengan negara Islam mempunyai hak untuk turun tangan bila modal swasta digunakan untuk merugikan masyarakat. Sebab terdapat dalil normatif yang mensinyalir, jika menyalahgunakan kekayaan masyarakat yaitu : “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> QS; al- Haqqah: 30-32

Selanjutnya teori Islam tentang modal lebih realistik, luas, mendalam dan etis dibandingkan dengan yang ada dalam teori modern. *Realistik*, karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kenyataan produksi, yang dianggap mudah berubah dalam pertumbuhan yang dinamis. *Luas* dan *mendalam*, karena memperhatikan semua variabel seperti mata uang, jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan, selera, tingkat hidup, ketinggalan waktu dan sebagainya. *Etis*, karena keikutsertaannya dalam berbagai bidang di suatu negara Islam harus bersifat adil dan wajar, juga harus bebas dari eksploitasi para pelaku produksi lainnya, sehingga terciptanya kekayaan nasional. Oleh sebab itu dalam kerangka sosial Islami, bunga yang ditetapkan pada modal tidak diperbolehkan menimbulkan dampak yang merugikan ekonomi.<sup>33</sup> Idealnya *modal* dalam ekonomi Islam, haruslah terbentuk bebas dari bunga, sebab modal dalam Islam bersumber dari kesediaan dari orang-orang kaya untuk berbagi hasil dengan orang miskin yang produktif dan diimplementasikan dalam bentuk zakat.

Faktor yang selanjutnya adalah *tenaga kerja*. Tenaga kerja merupakan faktor yang diakui dalam ekonomi Islam bukan hanya sebagai suatu jumlah yang besar dan diutamakan tetapi juga kualitas tenaga yang ditawarkan melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja dan juga bentuk hubungan

---

<sup>33</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, pada hal. 124. Baca juga Dochak Latief, "Perspektif Ekonomi Islam", *Kumpulan Makalah*, disampaikan dalam Kursus Loka karya Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UII, p3Ei Bekerjasama dengan Syari'ah Banking Institute (SBI), dan ICMI Orwil DIY, tanggal : 13 Desember 1993 s/d 5 Februari 1994, Yogyakarta, hal. 20.

antara pemilik dan tenaga kerja.<sup>34</sup> Walaupun demikian, sifat faktor produksi dalam Islam berbeda karena kenyataan bahwa perburuhan, maka semua faktor produksi tidak hanya tergantung kepada proses perubahan sejarah (seperti yang terdapat dalam ekonomi sekuler modern), melainkan juga pada kerangka moral dan etika tanpa batas waktu di mana faktor produksi perlu bekerja. Hal ini disebabkan juga banyak atribut hubungan pemilik modal, buruh, perilaku para pekerja terhadap majikan dan sebagainya, harus berdasarkan pada Syari'at.<sup>35</sup>

Selanjutnya Baqir as-Shadar<sup>36</sup> mengatakan bahwa ketiga-tiga faktor ini sangat dipengaruhi oleh politik ekonomi tetapi beliau mengingatkan bahwa buruh/tenaga kerja (termasuk organisasi) bukanlah material kekayaan yang boleh dimiliki, sebaliknya merupakan unsur kemanusiaan dalam pengeluaran dan mekanisme faktor inilah yang menghasilkan modal.

Lebih jauh lagi Abdul Hamid Abu Sulaiman menolak ide yang menganggap "buruh/tenaga kerja" sebagai faktor pengeluaran yang dianggapnya merupakan konsep yang ada dalam ekonomi kapitalis yaitu pengeluaran adalah masalah terakhir. Menurut beliau faktor-faktor pengeluaran hanyalah tanah dan modal, sementara buruh atau lebih tepat lagi manusia merupakan entitas yang mendapat masukan dari faktor-faktor

---

<sup>34</sup> Dochak Latief, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>35</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Op. Cit.*, hal. 58.

<sup>36</sup> Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, (Beirut; Dar' al-Fikr, 1968), hal. 396-397.

tersebut. Maka perbedaan antara modal dan tanah di satu pihak dan manusia di pihak lain, beliau mengemukakan peraturan bahwa tanah dan modal dibagikan kepada orang yang mengerjakannya. Sebab jika buruh dianggap sebagai “faktor pengeluaran” yang mungkin akan menyebabkannya dipergunakan oleh pihak lain.<sup>37</sup>

Adapun tentang *upah* terhadap buruh/karyawan, dalam sistem ekonomi Islam harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu : *saling rela* (‘an taradin), sedangkan penentuan nilainya didasarkan pada manfaat kerja yang telah diberikan buruh terhadap majikan tersebut (bukannya berdasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Tidak boleh ada pihak lain dalam penentuan upah termasuk pemerintah. Sebab adanya penentuan UMR oleh pemerintah, jika terlalu tinggi dan di luar kemampuan pengusaha, maka hal itu akan merugikan pengusaha sehingga akan menyebabkan usahanya mengalami kerugian. Sedangkan bila terlalu rendah, jelas akan merugikan kaum buruh. Oleh sebab itu, Islam menyerahkan penentuan itu dikembalikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kerelaan masing-masing. Peran pemerintah hanyalah memberi bantuan penyelesaian jika terjadi perbedaan dalam menaksir nilai manfaat dari kerja yang akan dilakukan tersebut.

---

<sup>37</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Tinjauan Penulisan Semasa*, terj, Amin Abdullah, (Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia), 1989), hal. 82-83.

Berkenaan dengan standar upah minimal, Islam menghendaki keikutsertaan para pekerja dalam keuntungan. Karena itu, kemudian dengan sendirinya penghasilan para pekerja diharapkan akan memiliki kesempatan yang layak untuk menjadi bebas gharar, tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada para majikan. Anggapan ini selanjutnya diperkuat oleh prinsip Islam tentang mudharabah, yang biasa dipraktekkan oleh masyarakat Islam masa awal dan yang sekarang dihidupkan lagi. Menurut penulis buku ini mudharabah tidak hanya bentuk organisasi bisnis; tetapi memiliki pesan dan prinsip serta implikasi yang luas. Jadi, nilai produk seluruhnya minus upah minimum harus dianggap sebagai hasil keuntungan dari produktivitas gabungan antara tenaga kerja dan modal, yang karenanya harus dibagi antara keduanya, sehingga para pekerja dapat menerima upah pasar selama jangka waktu produksi, tetapi penghasilan mereka akan disesuaikan dengan hasil bisnis yang terakhir.<sup>38</sup>

Hal ini diperkuat oleh *al-Qur'an* maupun *Sunnah* dinyatakan bahwa para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sebab setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik di pihak majikan maupun pekerja, dan

---

<sup>38</sup> Munawar Iqbal, (Ed.), *Distributive Justice and Fulfilment in an Islamic Economy*, (Islamabad; Leicester, U.K., Cet. I, International Institute of Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1986), hal. 47.

ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.<sup>39</sup> Dalam sebuah hadist juga dijelaskan bahwa: “Bayarlah upah kepada para pekerjamu, sebelum keringatnya kering”.

### C. Persamaan dan Perbedaan Ekonomi Kapitalisme dan Islam tentang Distribusi Pendapatan

Berangkat dari penjelasan di atas, maka sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan antara kedua sistem ekonomi tersebut tentang distribusi pendapatan. Menurut penulis, perbedaan itu bisa dilihat sebagai berikut :

1. Asumsi dasarnya:
  - a. Dalam ekonomi kapitalisme berawal dari konsep *laissez faire* di mana setiap orang bebas untuk “memiliki” kekayaan sesuai dengan hasil produksinya sehingga setiap individu harus diijinkan mengambil komoditas dan jasa dari timbunan – barang secara proporsional dari sejumlah agen produktif yang dimilikinya seperti dalam hal upah, tenaga kerja dan modal, artinya tanpa harus terikat oleh nilai-nilai manusiawi dan moral yang ada didalamnya.
  - b. Dengan konsep mekanisme pasar dan berfungsinya *invisible hand* yang ada dalam ekonomi kapitalisme maka pemerintah tidak campur tangan dalam distribusinya (kalaupun ada tapi sangat minim sekali) dan tingkat upah untuk para pemilik faktor-

---

<sup>39</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Op. Cit.*, hal. 118.

faktor produktif yang ditentukan secara eksklusif oleh faktor *penawaran dan permintaan* dan juga *persaingan bebas*. Sementara dalam ekonomi Islam, berawal dari bahwa semua harta pada dasarnya “milik Allah”,<sup>40</sup> dan manusia menguasainya sebagai amanat dari-Nya, menunjuk pada pemilikan kekayaan secara kolektif. Karenanya, dukungan tak bersyarat kepada pranata kekayaan pribadi yang menjadi sandaran kapitalisme, tak bergema dalam pemikiran Islami. Sebab kebebasan tanpa batas atas kekayaan pribadi hanya menyisakan ruangan yang sempit bagi kebebasan manusia dengan membebaskan tanggung jawab sosial yang amat ringan kepada kaum kaya seraya mengorbankan kaum miskin. Jadi bagi setiap individu yang memilikinya harus didistribusikan pada orang-orang yang berhak menerimanya dan landasan ini sering disebut dengan istilah *tauhid* atau juga menyadari bahwa setiap individu adalah Khalifah Allah, sehingga memunculkan rasa *accountabilitas* dalam diri orang tersebut untuk mentransferkan hartanya. Dan intervensi pemerintah terhadap kondisi pasar dibenarkan, selama untuk menstabilkan harga dipasar, yang terimplementasikan di

---

<sup>40</sup> Implementasi pernyataan diatas, ditegas oleh ayat al-Qur'an yang artinya: “Kekayaan dan anak adalah hiasan kehidupan dunia. Namun amalan shaleh adalah lebih baik pahalanya dalam pandangan Allah serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS; Al-Kahfi: 46)

mana negara dapat mengenakan peraturan-peraturan pasar yang mencegah praktek dagang yang tidak jujur, misalnya mengawasi standar timbangan dan ukuran, mengawasi kualitas barang, menetapkan patokan harga, sampai kepada memberantas pasar gelap, penimbunan barang dan sebagainya.

## 2. Orientasi/tujuannya:

Pada dasarnya kedua sistem ekonomi di atas bertujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat, masalahnya adalah “cara/proses” dalam menegakkannya yang sangat “berbeda”. Dalam ekonomi kapitalis terlepas dari “norma-norma” agama, misalnya dengan mengeksploitasi tenaga manusia demi kepentingan sesaat, sebaliknya dalam ekonomi Islam selalu mengacu pada etika yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Contohnya, terdapat aspek etika dalam konsumsi yang terangkum dalam beberapa hal yaitu: *Pertama*, menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir; *Kedua*, mengajarkan bersikap sederhana yang mengandung lima dimensi yaitu keadilan (dalam mendistribusikannya), kebersihan (dalam mencarinya; berdasarkan halal/haramnya), kemurahan hati (untuk membelanjakannya bagi orang yang memerlukan) dan moralitas (menggunakannya sesuai dengan petunjuk Syari’at).

### 3. Pada *perilaku* manusianya

Dalam ekonomi Kapitalisme tidak terdapat aturan yang memuat agar para pemilik kekayaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada orang-orang yang berhak dan perilaku pemiliknya cenderung *materialistik-hedonistik* yang mengakibatkan kekayaan terfokus pada sekelompok orang saja. Sebaliknya dalam ekonomi Islam, terdapat anjuran agar setiap orang yang mampu agar mendistribusikan hartanya pada orang-orang yang memerlukan (seperti yang tercermin dalam surat At-Taubah: 60 diatas).

### 4. Asumsi terhadap makna *bunga*.

Dalam ekonomi Islam, absen dari paradigma *bunga*, ini disebabkan :<sup>41</sup> (1) bunga dan/riba meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan oleh segolongan kecil orang saja; dalam prosesnya cenderung menghilangkan kepekaan seseorang terhadap sesamanya. (2) Islam tidak membolehkan laba yang didapat dari kegiatan ekonomi kecuali kalau juga ada kemungkinan untuk merugi darinya; tanggungan yang sah dari bunga nominal bisa dianggap sebagai laba yang pasti. (3) dalam Islam kekayaan haruslah diperoleh dari kegiatan pribadi dan kerja keras, dan tidak dari sikap mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin.

Permasalahan riba/bunga (boleh/tidaknya) telah begitu ~~serius~~ tidak hanya di kalangan orang Muslim (dalam agama Islam), namun juga di kalangan non-Muslim, seperti yang diungkapkan oleh Mervyn K. Lewis yang menurut Akh. Minhaji dalam bahasannya tentang perbandingan hukum Kristen dan hukum Islam, ada semacam pemahaman bahwa *Christianity is a religion of theology* sedangkan *Judaism and Islam are religions of law* yang walaupun dalam bahasan Lewis nampaknya kurang seimbang, karena lebih menekankan informasi tentang hukum Islam. Terlepas dari persoalan tersebut (penulis tidak punya kapasitas untuk membahas lebih lanjut persoalan riba/bunga), Lewis mengungkapkan bahwa larangan riba/bunga bukan hanya dikenal dalam Islam tapi juga dalam agama-agama lain termasuk Kristen. Namun dalam perjalanan sejarahnya, larangan dalam Kristen semakin longgar dan akhirnya riba diperbolehkan dalam arti *interest* yakni *usury* dengan *reasonable rates*. Lewis melanjutkan suatu hal yang tidak mungkin jika ada perubahan sikap Islam terhadap riba, maka beliau “menyarankan” agar Islam belajar dari pengalaman Kristen untuk merubah pandangannya sehingga pada akhirnya bisa menerima dan membolehkan riba. Lebih lanjut Lewis memprediksikan bahwa nantinya Islam akan membolehkan riba.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Amrullah dkk, *Op. Cit.*, hal. 46.

<sup>42</sup> Akh. Minhaji, Riba: *Haruskah Islam Belajar Kepada Kristen*, disampaikan pada acara peluncuran Iqtisad, Journal of Islamic Economics, diselenggarakan oleh Fak. Ekonomi UII Yogyakarta, Yogyakarta, 6 Mei 1999, hal. 1 dan 7. Namun Taqyuddin an-Nabhani, menjelaskan bahwa bunga bank termasuk riba yang haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak, tinggi ataupun rendah. Alasannya adalah: a). Setiap kelebihan yang diambil karena proses transaksi pinjam-meminjam (qard), jual-beli maupun salam adalah riba. b). Bunga

Terlepas dari boleh/tidaknya riba, namun yang menjadi *starting point* bahasan di sini adalah dikarenakan riba itu sendiri lebih digunakan sebagai alat yang bisa dipakai untuk melakukan eksploitasi ekonomi. Misalnya, kalau pemerintah (atau lembaga perbankan lainnya) meminjam uang dari rakyatnya dengan syarat ada bunga yang diberikan, maka ada implemementasi eksploitasinya. Lebih dari itu, apakah peminjam tersebut bersifat individual, perusahaan, atau pemerintahan asing, kemungkinan akan kelalaian pemerintah akan selalu ada. Maka seharusnya sistem bank bisa dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih memperbesar tanggungjawab (seperti sistem Bank Syari'ah yang memakai konsep mudharabah/bagi hasil) pihak yang meminjamkan agar jika perusahaan tersebut bangkrut tidak hanya berdasar pada pertimbangan kreditor saja. Walaupun ini merupakan penyimpangan yang cukup banyak dari praktek perbankan di negara kapitalis Barat, sistem semacam ini akan menjadi saluran bagi mereka yang mempunyai modal lebih dan investasi yang baik.<sup>43</sup> Jadi lebih khusus lagi, dalam istilah ekonomi, sistem ini menggantikan peran yang dimainkan oleh sistem bunga di Barat sebagai imbalan atau mekanisme alokatif dari modal kepada proses produksi; jika tidak modal akan sia-sia.

---

bank termasuk dalam katagori kelebihan yang diperoleh karena transaksi pinjaman (qard). c). Pengharaman riba adalah berdasarkan nash semata-mata, jadi walaupun perbankan merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat namun jika memuat bunga maka tetap saja haram hukumnya. Oleh sebab itu keberadaan ekonomi Islam dalam hal ini Bank Syari'ah sangat penting dalam menaggulangi perbankan model kapitalis.

Selanjutnya dari uraian tentang riba/bunga, bisa dilihat adanya persamaan ajaran Islam tentang bunga dan persewaan. Menerima sewa dari tanah yang belum dibuka atau sumber alamnya belum diolah adalah dilarang. Sebaliknya, jika pemilik tanah sudah menggarapnya dengan mempekerjakan orang dan/atau telah menginvestasikan sejumlah uang di dalamnya, maka sewa bisa ditarik disesuaikan dengan pengolahan yang telah dilakukan.<sup>44</sup>

Maka pengaruh/akibat dari adanya larangan bunga terhadap distribusi pendapatan adalah:<sup>45</sup>

**Pertama**, pemakaian/pinjaman yang mengandung bunga biasanya membolehkan kekayaan untuk dieksploitasi yang seharusnya diberikan bagi keperluan orang-orang lemah dan miskin. Hal ini membantu dalam rangka mendistribusikan pendapatan sebagai kemurahan hati/sedekah.

**Kedua**, dalam masalah pinjaman produksi yang mengandung bunga, sesuatu yang sangat penting bagi si peminjam, dan mengembalikan modalnya merupakan suatu kepastian yang ditentukan oleh bunga dari pinjaman tersebut. Seperti yang dikatakan ekonom terkenal, **Mishan**: "Given that differences in wealth are substantial, it would be irrational for the lender to be willing to lend as much to the impecunious as to the richer members of the society, or to lend the same amounts on the same term to each".

---

<sup>44</sup> Amrullah Achmad, dkk, *Op. Cit.*, hal. 49.

<sup>45</sup> Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Islamabad & Leicester, International Institute of Islamic Economics & The Islamic Foundation, 1986), hal. 196.

Dari uraian diatas, menurut penulis baik secara konseptual maupun operasionalnya (maksud penulis sebagai data pendukung) dalam distribusi pendapatan, antara ekonomi Kapitalisme dan Islam banyak memuat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan landasan kedua sistem ekonomi tersebut berbeda yang antara lain adalah pada aspek moral/etika dan absennya paradigma bunga dalam ekonomi Islam sehingga bisa penulis katakan bahwa kedua model ekonomi diatas tidak akan pernah mencapai titik temu, sebab keduanya mempunyai kelemahan dan kelebihan.

#### **D. MEKANISME KERJA EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN**

##### **1. Menurut Ekonomi Kapitalisme**

Dalam mekanisme kerja ekonomi kapitalisme tentang distribusi pendapatan, dikenal istilah faktor produksi, sebab untuk memproduksi suatu barang seringkali diperlukan suatu proses yang lama dan berbelit-belit. Apabila semua unsur yang ikut serta dalam proses produksi itu digolong-golongkan, ternyata ada empat kelompok dasar yang oleh para ahli ekonomi disebut keempat “faktor produksi” atau “sumber daya”, yaitu: kerja manusia, yang mengerjakan sumber-sumber alam, dengan bantuan peralatan atau barang-barang modal dalam suatu organisasi kerjasama yang merupakan hasil

kegiatan pengusaha (faktor tersebut adalah: modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam).<sup>46</sup>

a. Tenaga Kerja Manusia

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam seluruh kegiatan produksi adalah manusia, maka tenaga kerja manusia (*human resources*) dengan segala keterampilan dan keahliannya (*skills*) merupakan faktor produksi yang utama. Maka dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan yang pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut. Misalnya: jika stock modal yang tersedia membutuhkan 1 juta orang untuk menggunakannya dan apabila jumlah tenaga kerja tersedia 900 ribu orang, maka jumlah penduduknya akan cenderung meningkat, sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan meningkat menjadi 1 juta orang.

Selanjutnya tenaga kerja mempunyai supply yang terus menerus naik sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Sedangkan permintaan akan tenaga kerja tergantung pada kenaikan permintaan akan *barang jadi* (seperti halnya dengan permintaan akan barang-barang modal). Di samping itu permintaan akan kerja dipengaruhi

---

<sup>46</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi; Bagian Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 98-100.

pula oleh kemajuan teknologi . Ada teknologi-teknologi yang justru mengurangi permintaan akan tenaga kerja, misalnya: otomatisasi di pabrik-pabrik menaikkan output menambah penggunaan mesin-mesin, tetapi mengurangi penggunaan tenaga kerja. Inilah latar belakangnya mengapa di negara-negara yang pertumbuhan penduduknya sangat cepat, pemerintah berusaha mendorong penggunaan teknologi-teknologi yang padat tenaga kerja (*labor intensive*) dan bukan yang padat modal (*capital intensive*). Di mana permintaan akan tenaga kerja tidak tumbuh secepat penawaran tenaga kerja (pertumbuhan penduduk), maka ada kecenderungan bagi upah (harga faktor produksi tenaga kerja ) semakin menurun.

#### b. Sumber-Sumber Alam

Adapun yang dimaksud dengan sumber daya alam (*natural resources*) adalah segala apa yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Adam Smith, sumber-sumber alam yang tersedia merupakan modal yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi perubahan perekonomian tersebut. Artinya, selain sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi adalah dua unsur produksi lain yaitu: jumlah penduduk dan stock

barang modal/kapital. Dua unsur inilah yang menentukan besarnya output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) dan pada tahap ini sumber-sumber alam akan membatasi output.

### c. Peralatan Produksi atau Barang-barang Modal

Faktor produksi yang ketiga adalah sarana dan prasarana produksi yaitu peralatan atau lebih biasa disebut barang-barang modal (*capital goods*).<sup>47</sup> Modal dalam arti barang-barang modal (*capital goods*) ini sering disebut modal konkret atau sumber daya. Selanjutnya usaha untuk menambah peralatan atau kapasitas produksi disebut investasi/pembentukan modal (*netto*). Konkretnya ini berarti sebagian dari kegiatan produksi (tenaga, waktu, bahan-bahan dan alat-alat) diarahkan untuk pembuatan barang-barang produksi; bangunan dan konstruksi, mesin dan alat-alat. Maka dilihat dari segi uang tidak seluruh pendapatan dibelanjakan untuk konsumsi, melainkan sebagian disisihkan untuk dibelikan barang-barang produksi.

---

<sup>47</sup> **Barang modal** adalah segala sumber daya selain kerja manusia dan pemberian alam, yang dipergunakan, atau lebih singkat: barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana/alat/masukan (input) untuk menghasilkan barang lain. Contohnya: bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat dan persediaan bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi. Termasuk juga konstruksi seperti jalan-jalan, jembatan, bendungan dan saluran air untuk irigasi dan sebagainya. Baca dalam T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi; Bagian Makro*, hal. 111.

Berangkat dari persoalan di atas, maka stock kapital yang secara aktif menentukan tingkat output. Adam Smith memberikan peranan sentral terhadap pertumbuhan stock kapital/akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Sebab apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stock kapital dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stock kapital (tentu saja sampai tahap pertumbuhan di mana sumber-sumber alam membatasi).<sup>48</sup> Dan pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Secara tidak langsung berarti peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan oleh adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Sebab menurut Adam Smith semakin besar stok kapital semakin besar kemungkinan dilakukan spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perkapita. Adapun spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan pertumbuhan output, karena spesialisasi tersebut meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan berbagai macam pekerjaan. Namun demikian, sebaliknya ada dua faktor penunjang penting di balik proses akumulasi modal

---

<sup>48</sup> Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara/teknologi produksi itu sendiri. Selanjutnya baca dalam Boediono, *Pertumbuhan Ekonomi*, Bagian 2, (Yogyakarta; BPFE, 1985), hal. 8-9.

bagi terciptanya pertumbuhan output yaitu makin meluasnya pasar dan adanya tingkat keuntungan di atas keuntungan maksimal.<sup>49</sup>

Selanjutnya menurut Smith, Potensi pasar akan bisa dicapai secara maksimal jika hanya setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan menghilangkan perturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Smith dianggap sebagai penganjur *laissez faire* dan *free trade*. Faktor penunjang kedua adalah tingkat keuntungan yang memadai dan ini erat hubungannya dengan luasnya pasar. Artinya jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot dan pada akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal, yang menurut Smith dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurun, pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan maksimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

Maka modal (sumber-sumber ekonomi ciptaan manusia) mempunyai supply yang lebih elastis karena dari waktu ke waktu warga masyarakat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk di tabung (*saving*) dan kemudian sektor produksi akan menggunakan dana tabungan ini untuk pabrik-

---

<sup>49</sup> Lincohn Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta; Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1997), hal. 51.

pabrik baru, membeli mesin-mesin, membangun jalan dan sebagainya (yaitu investasi). Karena adanya saving dan investasi, maka supply dari barang-barang modal dari waktu ke waktu bisa bertambah. Sedangkan permintaan akan barang-barang modal terutama sekali dipengaruhi oleh gerak permintaan akan barang-barang jadi. Bila harga pakaian naik, maka permintaan akan mesin-mesin tenun, mesin jahit dan mesin pembuat kancing baju juga akan naik. Permintaan akan barang-barang jadi, pada gilirannya dipengaruhi oleh dua faktor utama:

- a). Pertumbuhan penduduk (yang membutuhkan tambahan baju perumahan dan sebagainya), dan
- b). Pertumbuhan pendapatan penduduk (yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional/GNP perkapita).

Oleh sebab itu investasi penting sekali dalam pembangunan, karena untuk meningkatkan produksi diperlukan lebih banyak pabrik, mesin, alat, jalan, bendungan dan lain-lain. Investasi memperbesar kapasitas produksi dan dengan demikian meletakkan dasar untuk meningkatkan produksi nasional dan kesempatan kerja.

#### d. Organisasi atau Kegiatan Pengusaha

Ini merupakan faktor produksi yang paling sulit untuk dianalisis, karena faktor-faktor yang menentukan penawaran pun permintaannya sangat beraneka ragam (dan sering faktor-faktor ini di luar kemampuan ilmu ekonomi untuk menganalisis, misalnya,

faktor-faktor sosiologis kepercayaan, faktor-faktor motivasi lainnya). Agar barang dan jasa tersedia dalam bentuk, waktu, dan tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan kegiatan dan inisiatif dari seseorang untuk menggabungkan dan mempekerjakan faktor-faktor produksi, menentukan apa, berapa, bagaimana mengorganisasikannya supaya efisien dan efektif, sehingga para pemilik faktor produksi mendapat balas jasa yang seimbang dengan sumbangan masing-masing. Namun, pada umumnya untuk negara-negara sedang berkembang, penawaran atau tersedianya orang-orang yang berjiwa “enterpreuner” masih sangat kecil. Itulah sebabnya penghasilan untuk pengusaha-pengusaha yang sukses juga cukup besar di negara tersebut.<sup>50</sup>

Lebih jauh lagi pola pemilikan faktor-faktor produksi yang ada di masyarakat adalah faktor yang sangat menentukan pola distribusi pendapatan di suatu masyarakat. Misalnya pola pemilikan yang ada pada saat ini adalah hasil kumulatif dari faktor-faktor ekonomis-sosial dan politis yang berlaku di masyarakat tersebut di tahun-tahun silam sampai saat ini. Hak milik seorang warga A atas tanah, tenaga kerja dan modal yang ia miliki sekarang (kekayaan si A) mungkin berasal dari warisan, mungkin dari tabungan-tabungan di masa-masa lalu, atau mungkin juga dari kedudukannya sebagai pejabat tertentu atau

---

<sup>50</sup> Boediono, *Pertumbuhan Ekonomi*, Bagian 1, (Yogyakarta; BPFE, 1982), hal. 153.

hasil dari lainnya. Karena pada hakikatnya pola distribusi pendapatan di suatu masyarakat adalah hasil dari sistem kemasyarakatan masyarakat itu sendiri, dan bukan hanya karena faktor-faktor yang biasa disebut “faktor-faktor ekonomis”.<sup>51</sup>

Namun satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa di hampir semua negara (terutama di negara-negara sedang berkembang), ternyata perbedaan-perbedaan dalam kepemilikan kekayaan ini sangat menentukan perbedaan-perbedaan dalam pola distribusi pendapatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena perbedaan kekayaan antara satu warga dengan warga yang lain, bukan hanya akan terus bertahan, tetapi justru akan membesar. Sebab kekayaan yang besar menghasilkan pendapatan (income) yang besar; dan dari income yang besar ini akan bisa disisihkan jumlah yang cukup besar untuk menambah kekayaannya dan seterusnya. Tentu saja hal ini dengan asumsi bahwa tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja, sebaliknya yaitu dengan meratakan pendapatan misalnya, campur tangan pemerintah berupa pajak progresif, land reform, subsidi kepada orang yang berpenghasilan rendah, rumah sakit yang murah dan pendidikan yang murah dan lain-lain.

Oleh sebab itu peranan mekanisme harga hanya terbatas terutama pada penentuan harga faktor-faktor produksi, karena ini merupakan faktor yang mempengaruhi pola distribusi pendapatan. Namun, sesungguhnya secara

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 154-155.

hasil dari lainnya. Karena pada hakikatnya pola distribusi pendapatan di suatu masyarakat adalah hasil dari sistem kemasyarakatan masyarakat itu sendiri, dan bukan hanya karena faktor-faktor yang biasa disebut “faktor-faktor ekonomis”.<sup>51</sup>

Namun satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa di hampir semua negara (terutama di negara-negara sedang berkembang), ternyata perbedaan-perbedaan dalam kepemilikan kekayaan ini sangat menentukan perbedaan-perbedaan dalam pola distribusi pendapatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena perbedaan kekayaan antara satu warga dengan warga yang lain, bukan hanya akan terus bertahan, tetapi justru akan membesar. Sebab kekayaan yang besar menghasilkan pendapatan (income) yang besar; dan dari income yang besar ini akan bisa disisihkan jumlah yang cukup besar untuk menambah kekayaannya dan seterusnya. Tentu saja hal ini dengan asumsi bahwa tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja, sebaliknya yaitu dengan meratakan pendapatan misalnya, campur tangan pemerintah berupa pajak progresif, land reform, subsidi kepada orang yang berpenghasilan rendah, rumah sakit yang murah dan pendidikan yang murah dan lain-lain.

Oleh sebab itu peranan mekanisme harga hanya terbatas terutama pada penentuan harga faktor-faktor produksi, karena ini merupakan faktor yang mempengaruhi pola distribusi pendapatan. Namun, sesungguhnya secara

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 154-155.

konkret tidak menjamin tercapainya pola distribusi yang “adil”<sup>52</sup> (“Adil” adalah suatu perkataan yang subyektif, yaitu tergantung pada pendapat atau penilaian seseorang; dan tidak ada ukuran obyektif), tetapi kebanyakan warga masyarakat modern berpendapat bahwa yang dimaksud pola distribusi pendapatan yang “adil” adalah pola yang tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu “*mencolok*” antara penghasilan warga masyarakat, namun pola ekonomi Kapitalisme dalam mengurangi ketidakadilan, karena tetap mempertahankan hak milik perseorangan, juga kebebasan usaha oleh warga masyarakat, yaitu dengan cara adanya intervensi pemerintah berupa: pajak progresif atas kekayaan atau penghasilan, penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup dasar (misalnya makanan pokok, pakaian, perumahan) yang murah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Jadi analisis mengenai permintaan ke atas faktor-faktor produksi bukan saja akan menjelaskan tentang penentuan harga-harga faktor produksi, tetapi juga pendapatan dari masing-masing faktor produksi dan distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Dari sinilah oleh para

---

<sup>52</sup> Scumpeter mengatakan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalis bisa meningkatkan output pendapatan masyarakat dan sekaligus akan membawa masyarakat ke arah distribusi pendapatan yang lebih merata, beliau mengatakan ini disebabkan oleh inovasi-inovasi yang selanjutnya akan mengarah pada barang-barang yang dikonsumsi oleh orang banyak sehingga barang-barang ini menjadi berlimpah. Menurutnya: “*the capitalist process not by coincidence but by virtue of its mechanism, progressively raises the standard of life for the masses*”. Jadi jelasnya kesimpulan Scumpeter berlawanan dengan kesimpulan pesimistis dari ekonomi klasik yang meramal datangnya “stationary state”. Selanjutnya baca dalam Boediono, *Teori Pertumbuhan*, Bagian 1, hal. 54-55.

ahli/ekonom menyatakan bahwa penentuan harga faktor produksi disebut sebagai *teori distribusi*.<sup>53</sup>

## 2. Menurut Ekonomi Islam

Distribusi melalui transfer secara luas dapat dibagi menjadi beberapa kategori:<sup>54</sup> (1) transfer wajib, (2) transfer direkomendasikan, dan (3) distribusi melalui warisan.

### a. Transfer Wajib

Islam menyediakan sebuah mekanisme unik berupa transfer wajib sumber-sumber daya dari orang-orang yang lebih mampu kepada orang-orang yang lebih miskin dalam masyarakat. Ada beberapa jenis cukai/pajak wajib yang berkisar dari rate setinggi 20% dari out put sampai minimum 2,5% dari kekayaan. Pajak/cukai ini meliputi: Zakat, Ushr dan Sadaqatul Fitr.

Adapun implementasinya tercermin kedalam beberapa hal yaitu:

#### 1). Zakat.

Pada dasarnya terminologi *zakat*,<sup>55</sup> *sadaqah* dan *infaq* memiliki arti yang sama, atau paling tidak esensinya, baik dalam

<sup>53</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi Kedua, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 329.

<sup>54</sup> A. H. M. Sadeq, *Islamic Economics; Some Selected Issues*, (Lahore-Pakistan, Islamic Publication, 1989), hal. 77.

<sup>55</sup> Dalam *Encyclopedia of Islam* yang dikutip oleh Josep Scacht dalam artikel tentang "zakat" berarti "menjadi suci" atau "menjadi saleh". Dengan demikian, zakat dianggap sebagai satu tindakan pembersihan atau pembersihan atas dosa-dosa seseorang, suatu cara untuk

al-Qur'an maupun al-Hadist. Bahkan "zakat" yang harus dibagi, menurut **8 asnaf**, seperti yang tercantum dalam surat al-Taubah ayat 60 di bawah ini tidak menggunakan istilah *zakat*, melainkan *sadaqah* yang berbunyi:

"Sesungguhnya sadaqah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurusnya, para mua'allaf yang sedang dibujuk hatinya untuk pembebasan budak, orang-orang yang dililit hutang untuk perjuangan di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dan secara *etimologis* kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.

Sedangkan *secara terminologi fiqih* berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping juga berarti "mengeluarkan jumlah tertentu" dan yang dikeluarkan tersebut dikenal dengan zakat, karena "menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan".<sup>56</sup>

---

mengurangi sifat mementingkan diri sendiri. Dan dalam istilah ekonomi, *zakat* merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya, sedangkan transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; contohnya, orang yang dizakati mempergunakan barang yang dizakatkan untuk usaha-usaha produktif. Disinilah kita bisa melihat bahwa zakat yang pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, lebih jauh lagi bisa mempunyai arti ekonomi. Untuk lebih jelasnya baca dalam M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Mekah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung; Mizan, 1987), hal. 145.

<sup>56</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Keempat, (Jakarta; Mizan, 1996), hal. 34-35.

Sementara *infaq* sama dengan *sadaqah* yaitu segala sesuatu yang diberikan untuk kebaikan dan *zakat* adalah *sadaqah* dengan aturan-aturan tertentu yang bersumber dari al-Qur'an wajib dipungut, jika perlu dipaksa (seperti yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat) dan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu. Dengan demikian zakat di dalam as-Sunnah dan al-Qur'an merupakan dasar Islam ketiga dan tanpa ini bangunan Islam tidak akan kokoh.

Selanjutnya setelah kita mengetahui esensi zakat itu adalah wajib, maka signifikansi yang menjadi konsekuensinya yaitu.<sup>57</sup>

- Zakat dalam Islam bukan hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi salah satu rukun Islam yang utama dan dipandang dari segi moral dan agama mutlak dilaksanakan.
- Kewajiban zakat tidak saja diserahkan kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggung jawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Oleh karena itu al-Qur'an mengungkapkan dengan: "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka

---

<sup>57</sup> Neni Meidawati, *Akuntansi Zakat Dan Pengelolaannya Di Perusahaan*, Vol. 2, No. 2, (Yogyakarta; Penerbit Fak. Ekonomi UII, 1998), hal. 185-187. Begitu urgennya makna dan aplikasi zakat, sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa beliau hampir tidak menyimpan sesuatu pun untuk dirinya sendiri maupun keluarganya diluar persyaratan sekedar untuk penghidupan, dan menolong sepenuhnya kaum yang kekurangan (fakir-miskin). Untuk lebih jelasnya tentang gaya kehidupan Nabi SAW yang keras dan kebaikan hatinya pada orang lain, baca dalam *The Life Of Muhammad*, karya Muhammad Husaen Haekal, 1976, hal. 185-187.

dan sunnah mengungkapkannya dengan, “dipungut dari orang-orang kaya”.

- Bagi seorang Muslim dianjurkan untuk membayar zakat, sebab sebagai intermediator dalam mendekatkan diri kepada Allah.
- Zakat bukanlah hanya sekedar meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin, namun lebih jauh lagi zakat harus dioptimalisasikan untuk memberantaskan kemiskinan. Karena tujuan zakat tidak hanya sekedar memberikan kehidupan sesaat, akan tetapi diharapkan dapat menjadi sumber penghidupan.

Adapun tentang cara pengumpulan zakat merupakan permasalahan yang terus mengalami kontroversial di kalangan ulama, namun pada akhirnya menghasilkan suatu persetujuan pokok mengenai *kekayaan nyata* (zakat biasanya dikumpulkan oleh wakil pemerintah atau masyarakat) sebagai kebalikan dari *kekayaan tidak nyata* (pajaknya dikeluarkan langsung oleh pemiliknya). Di pihak lain dikatakan bahwa untuk menjamin distribusi zakat yang merata di antara mereka yang membutuhkan, pemerintah harus mengawasi pelaksanaan zakat, dan pemerintah mempunyai hak untuk memaksa (seperti yang dilakukan khalifah Abu Bakar Shidiq yang memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya) orang-orang Muslim untuk mengeluarkan zakat jika mereka lalai serta mengumpulkannya atau jika

kebutuhan suatu wilayah Islam melampaui kemampuan daerah itu untuk mengumpulkan zakat bagi penduduknya.<sup>58</sup>

Zakat juga seharusnya dikumpulkan lewat negara, karena institusi zakat harus diselenggarakan oleh negara. Pemerintah akan menilai income dari para individu dan mengumpulkan zakat dari setiap orang yang memiliki penghasilan yang dapat dizakati; pemerintah atau otoritas lainnya tidak memiliki hak legal untuk menyisihkan bahkan sejumlah kecil saja dari jumlah zakat. Oleh sebab itu semangat Islam agar pemerintah menerapkan segala kekuatan negara yang mungkin untuk mengumpulkan zakat dari kaum kaya dan selanjutnya mendistribusikannya kepada kaum miskin dan fakir. Maka keberadaan sebuah badan/departemen administratif lengkap pada tingkat nasional yang terdiri dari orang-orang terlatih secara profesional dalam Syari'ah untuk penaksiran dan pengumpulan zakat sangat diperlukan, sebab zakat dapat dibayarkan secara individual hanya bila tidak ada ketentuan untuk mengumpulkan zakat melalui negara.

Selanjutnya jenis harta yang dizakatkan adalah: *Pertama*, zakat binatang ternak (diantara binatang yang bermanfaat seperti: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri). Adapun syarat-syarat zakat ternak yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Amrullah Achmad, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>59</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta & Bandung, Penerbit Lintera Antar Nusa & Mizan, 1996), hal. 170-171.

1. Sampai Nisab (mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'). Zakat ini tergantung dari macam ternaknya. Contohnya, Imam Hanafie menentukan sekitar 2,5% (jika jumlahnya diatas minimum). Bagi unta, tidak dikenakan zakat untuk 5 yang pertama, tetapi lebih dari itu (5) retribusi khusus ditentukan bagi ternak dengan nilai yang berbeda-beda; misalnya: domba, unta betina muda dan unta betina dewasa. Untuk kambing dan domba (ghanam), maka Imam Syafi'ie, Hambali dan Maliki semuanya setuju bahwa retribusi tidak dikenakan pada 40 yang pertama, tetapi lebih dari itu kewajiban berlaku secara proporsional. Mengenai nisab minimal untuk sapi terdapat perbedaan pendapat yang berkisar antara 5s/d 30 bahkan 50 ekor. Pada umumnya, pajak yang dikenakan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan, dalam banyak kasus ini diartikan sebagai pajak netral atau proporsional.<sup>60</sup> Kedua, jika zakat ternak didasarkan pada jumlah fisiknya, maka zakat emas, perak dan barang dagangan didasarkan pada nilai jualnya, taripnyapun biasanya proporsional yaitu 2,5%.

---

<sup>60</sup> Adapun istilah ekonomi *pajak netral* atau *proporsional* yang mengena pada semua pembayar pajak dengan akibat yang sama; *pajak progresi* adalah yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kekayaan atau penghasilan yaitu dengan kemampuan membayar. Sedangkan *pajak regresi* lebih banyak mengena kepada orang miskin dibandingkan kepada orang kaya. Maka pajak atas terkenal kecil dan umumnya banyak dimiliki seperti domba dan biri-biri sebenarnya lebih bersifat regresif, sebab diatas ukuran ternak minimum. Contohnya seorang Muslim dengan 40 domba, wajib membayar zakat 2,5% sedangkan seorang lagi dengan 121 domba, wajib membayar 1,66% dan seorang yang mempunyai 400 domba hanya wajib zakat

## 2. Telah Dimiliki Satu Tahun

Telah disebutkan sebelumnya bahwa persyaratan satu tahun itu merupakan ketetapan *ijma'* tentang kekayaan yang bukan pengguna pribadi. Selanjutnya Jumbuh ulama' yang mensyaratkan satu tahun pada binatang ternak untuk penggunaan pribadi pun tidak mensyaratkan satu tahun pada produksi ternak itu dan menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.

## 3. Digembalakan

Yang dimaksud dengan digembalakan adalah sengaja diurus sepanjang tahun dimaksudkan untuk memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. Syaratnya binatang itu digembalakan pada tempat gembalaan pada sebagian besar dalam satu tahun.

## 4. Tidak Dipekerjakan

Binatang ternak tersebut tidak dipekerjakan seperti dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, mengangkut barang dan lain-lainnya (syarat ini dikhususkan bagi sapi dan unta).

---

1%. Uraian ini penulis kutip dari buku Amrullah Achmad dengan judul *Islamisasi Ekonomi; Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian*, pada hal. 40.

**Kedua**, harta yang wajib zakat berupa emas dan perak,<sup>61</sup> tanam-tanaman, usaha, misalnya dagang dan barang tambang<sup>62</sup> yang dikeluarkan dari perut bumi. Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakatkan antara lain:<sup>63</sup>

- Milik Penuh

Pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah; Dialah yang menciptakannya dan mengkaruniakannya pada manusia. Oleh sebab itu Allah dalam al-Qur'an mengingatkan prinsip dasar ini, yang adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya adalah Tuhan seperti Firman Allah: "Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah dikaruniakan-Nya kepada kalian".<sup>64</sup> "Keluarkanlah oleh kalian sebagian rezeki yang telah diberikan-Nya kepada kalian".<sup>65</sup> "Mereka sangat kikir mengeluarkan sebagian karunia yang diberikan Allah kepada mereka".<sup>66</sup>

Adapun yang dimaksud dengan istilah "milik penuh" adalah kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti

---

<sup>61</sup> Pernyataan Allah tentang zakat emas dan perak: "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang adzab yang pedih". (QS; At-Taubah: 35).

<sup>62</sup> "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (QS: Al-Baqarah: 267).

<sup>63</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 125.

<sup>64</sup> QS; An-Nuur: 33.

yang dikatakan oleh para ahli fiqih, “bahwa kekayaan itu berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dipergunakan serta faedahnya dapat dinikmati. Maka seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai ditangannya, begitu juga jika diselewengkan dan barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

#### 1). Harta tersebut Berkembang

Berkembang menurut bahasa berarti sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi sesuai dengan istilah yang digunakan oleh para ahli perpajakan. Menurut ahli fikih berarti bertambah baik secara konkret yang bertambah akibat pembiakan dan perdagangan maupun tidak secara konkret yaitu kekayaan itu berpotensi untuk berkembang baik ditangannya atau di tangan orang lain. Misalnya ternak yang digembalakan (seperti unta, sapi dan kambing) atau emas dan perak yang diperdagangkan.

#### 2). Cukup Senisab

Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai satu nisab disepakati oleh ulama’, kecuali hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia.

---

<sup>65</sup> QS; Al-Baqarah : 254.

<sup>66</sup> QS; Al-Imran: 180.

### 3). Lebih dari Kebutuhan Biasa

Yang dimaksud dengan “lebih dari kebutuhan rutin” karena kebutuhan manusia sesungguhnya tak terbatas, terutama saat ini, di mana barang mewah dianggap sebagai kebutuhan (primer). Maka kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tidak dapat (mesti) ada untuk ketentuan hidupnya, seperti: makanan, pakaian, minuman, buku-buku dan sebagainya.

### 4). Bebas dari Hutang

Jika pemiliknya mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab itu, zakatnya tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai (masalah ini terus mengalami kontroversial).

### 5). Berlalu Satu Tahun

Hal ini berarti pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariah. Persyaratan satu tahun ini khusus untuk binatang ternak, uang, harta yang diperdagangkan, yaitu harta yang bisa dikategorikan sebagai “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan sebagainya yang sejenis tidak disyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat diklasifikasikan sebagai “zakat pendapatan”.

## 2). *Ushr*

Adapun tentang pajak tanah atau *ushr* (jika tanah tersebut memberi hasil). Di sebut *ushr* (perpuluhan) karena rate biasanya dari cukai/pajak ini adalah sepersepuluh dari hasilnya, walaupun ratenya dapat bervariasi sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan biaya pengolahan dalam bentuk irigasi dan sebagainya. Dalam hal ini tidak ada batas maksimal (walaupun sudah mencapai satu tahun) yang dibolehkan untuk jenis zakat ini. Namun biasanya, kewajiban ini didasarkan pada kualitas tanah, misalnya 5% bagi tanah yang pengairannya tergantung pada irigasi, dan 10% bagi yang tadah hujan. Zakat ini juga dikenakan pada hasil kotor, sebelum dikurangi dengan biaya produksi, namun perhitungan biasanya dengan memperhatikan ongkos produksi.<sup>67</sup>

*Ushr* ini bukanlah sekedar pajak tanah tetapi telah mendapat status ibadah. Kewajiban ini diatur oleh Allah Swt, yang merupakan sebuah kewajiban Syari'ah untuk membayar *ushr* dari hasil bumi dan dengan demikian Nabi saw dan para Khalifah mengumpulkan *ushr* dari mereka yang mempunyai jumlah *ushr* hasil bumi. Hasil bumi akan terkena *ushr* bila hasil tersebut berjumlah lima "Wasaqs" yang adalah sekitar 1000

kilogram. Nisab ini dibuat rendah sehingga suatu jumlah yang sangat besar dapat dikumpulkan dari orang-orang yang relatif mampu. Pertimbangan redistribusi dalam kasus ini sedemikian kuat sehingga *ushr* dikenakan juga bagi mereka yang tidak terkena zakat. Selanjutnya hasil *ushr* akan digunakan sebagai pemberian bantuan finansial kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum miskin serta untuk makanan masyarakat umum.<sup>67</sup>

Pendeknya, nisab dari *ushr* dipatok pada jumlah yang rendah sehingga sejumlah besar orang dapat tercakup oleh pajak/cukai *ushr* dan tarifnya dipatok pada suatu rente yang tinggi agar jumlah yang besar dapat dikumpulkan dari masyarakat mampu bagi kesejahteraan kelompok yang terutama berincome rendah. Hal ini, jika dipraktekkan secara tepat akan menjadi sarana efektif untuk meredistribusikan income dalam perekonomian.

### 3). *Sadaqatul Fitr*

Bagi kaum Muslimin yang kaya diwajibkan untuk melakukan suatu pembayaran kepada penduduk berincome rendah pada waktu Idul Fitri (perayaan suci kaum Muslimin

<sup>67</sup> Amrullah Achmad, *Op. Cit.*, hal. 41.

<sup>68</sup> A. H. M, Sadeq, *Op. Cit.*, hal. 82.

setelah satu bulan berpuasa di bulan Ramadhan). Sadaqatul Fitri diwajibkan pada setiap muslim yang memiliki nisab zakat, nisab yang dizakati diwajibkan untuk membayar Sadaqah ini atas namanya sendiri dan juga atas nama anaknya termasuk nak yang lahir di malam Idul Fitri. Adapun ukurannya, misalnya gandum rate-nya 1,5 Saa' perorang, anak atau dewasa, pria atau wanita yang sama dengan sekitar 1,75 kilogram gandum/harganya.<sup>69</sup>

b. Transfer yang Direkomendasikan

Islam merekomendasikan pembayaran kepada orang-orang dari golongan berincome rendah di atas dan di luar pajak/cukai wajib. Oleh sebab itu pembayarannya harus jelas artinya tidak bersifat opsional, tetapi direkomendasikan sampai tingkat di mana seseorang dapat ditolak di kalangan umat Islam, jika ia makan kenyang sementara tetangganya kelaparan; jika melaksanakan semua kewajiban Islam termasuk ibadah ritual lainnya. Ada banyak ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi tentang pembayaran diluar zakat. Karenanya, setiap orang yang mampu harus membantu orang-orang yang kekurangan dan pembayaran ini bukanlah karena belas kasihan dan kebaikan hati tetapi hanyalah memberikan kepada kaum miskin.

---

<sup>69</sup> A.H.M, Sadeq, *Ibid.*, hal. 83.

Ali Ibn Abi Thalib RA (Khalifah keempat) menyatakan: “Allah telah menetapkan bahwa kaum kaya harus membayar dari kekayaan mereka sejauh yang mencukupi bagi kebutuhan-kebutuhan kaum miskin, sehingga jika mereka tidak mendapatkan makanan atau pakaian atau berjuang (namun tidak sukses dalam hidup), itu kaum kaya tidak menjalankan kewajiban mereka, maka Allah akan menegur mereka pada Hari Pengadilan dan akan menghukum mereka”.<sup>70</sup>

Secara legal, pemberian di atas dan di luar zakat direkomendasikan tetapi seorang muslim yang baik menganggap seolah mengikat secara moral. Ini merupakan kewajiban moral pada anggota masyarakat yang kaya untuk membantu penduduk berpendapatan rendah sampai dan kecuali tidak ada yang membutuhkan bantuan finansial. Dengan demikian pendistribusian pendapatan bisa dikatakan merata dalam perekonomian Islam. Dan menurut penulis transfer yang direkomendasikan ini bisa disebut dengan sadaqah/infaq.

### c. Distribusi Warisan

Warisan adalah sebuah sumber penting untuk mendapatkan hak atas kekayaan dalam sistem sosial dunia. Namun demikian sifat dari hukum-hukum warisan bervariasi dalam agama dan kultur yang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

berbeda, yang menimbulkan pola distribusi berbeda dari kekayaan yang diturunkan tersebut. Salah satu dari hukum-hukum ini memberikan anak tertua hak tunggal atas properti dari almarhum, sehingga mengesampingkan semua putera dan puteri lain yang lebih muda, apalagi kerabat-kerabat lain baik jauh atau dekat.

Lebih lanjut Islam menyajikan sebuah sistem pendistribusian warisan yang unik di kalangan sanak keluarga berdasarkan kedekatan hubungan. Menurut hukum warisan Islam, semua anak dari almarhum akan mendapatkan bagian yang pantas yang ditetapkan Allah Swt tanpa mengacu pada usia dan jenis kelamin anak-anak tersebut. Maksudnya, seluruh warisan tidak akan diterima oleh anak laki-laki tertua, tetapi semua anak laki-laki mendapatkan warisan yang sama dan anak-anak perempuan tidak dikesampingkan dari pewarisannya, tetapi mendapatkan bagian dari warisan itu baik volume warisannya kecil atau besar.

Dengan perincian bagian anak laki-laki dan perempuan dalam warisan orang tua dan bagian para orang tua dalam warisan dari almarhum telah ditetapkan dalam al-Qur'an: "Allah memerintahkan kami mengenai (warisan) anak-anakmu kepada laki-laki satu bagian yang sama dengan bagian dua perempuan; tetapi jika hanya ada perempuan dua atau lebih, dua pertiga dari apa yang ditinggalkan almarhum adalah milik mereka; dan jika hanya ada satu untuknya

adalah separuhnya. Untuk orang tuanya, kepada masing-masing mereka adalah seperenam bagian dari apa yang ia tinggalkan, jika ia punya anak; tetapi jika ia tidak punya anak dan (hanya) orang tuanya yang mewarisinya, untuk ibunya adalah sepertiga; tetapi jika ia punya saudara laki-laki atau perempuan, untuk ibunya adalah seperenam, setelah (pembayaran suatu warisan, ia mungkin telah diwarisi atau suatu hutang); orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu mana dari mereka yang lebih dekat denganmu dalam kebaikan; inilah adalah peraturan dari Allah dan Allah pastilah Maha Tahu dan Maha Bijak”.

Jadi prinsip dasar dari hukum Islam tentang warisan adalah bahwa pria mendapat dua kali dari apa yang diterima perempuan. Hal ini dijustifikasi karena pria mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri, bagi istrinya dan anak-anak mereka, dan perempuan tidak punya kewajiban semacam itu, bahkan nafkahnya sendiri pun disediakan oleh pria (suami). Seorang perempuan tidak diwajibkan untuk membelanjakan apa pun dari pendapatan atau asetnya untuk keluarga, untuk dirinya atau untuk anak-anaknya. Karena itu adillah untuk memberi pria lebih banyak dari perempuan dari warisan tersebut.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> A. H. M, Sadeq, *Op. Cit.*, hal. 84-87.

Jenis pajak yang selanjutnya adalah *kharaj* (satu bentuk pajak yang bisa dirubah oleh pemerintah Islam karena tidak disebutkan dalam al-Qur'an, maka ketetapanannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus yang dicapai berdasarkan ajaran agama). Pajak *kharaj* terbagi pada dua macam, yaitu tertentu dan proporsional.<sup>72</sup> Adapun tarif pajak *kharaj* tertentu dihitung dari jumlah semua tanah yang bisa ditanami, juga menurut macamnya yakni satu jumlah tertentu untuk luas tanah tertentu dan sejumlah pohon tertentu. Dan untuk kasus-kasus yang belum tercakup tarifnya ditentukan oleh pajak tanahnya yaitu tergantung kepada kualitas tanahnya, macam tanaman yang ditanam juga pengairannya. Sementara tarifnya berkisar antara 20%-50% dari hasil tanah tersebut. Jika *kharaj* tertentu ditetapkan tanpa mempedulikan hasil yang sebenarnya yang dikeluarkan, maka *kharaj* proporsional merupakan prosentase dari yang sebenarnya dihasilkan.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Adapun yang dimaksud bersifat proporsional misalnya  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$  dari hasil tanaman yang diperoleh. Dan yang bersifat pasti berarti dibayar setiap setahun sekali. Besar kecilnya tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Contohnya: - tanah yang ditanami makanan pokok 1 dirham seperi kebun anggur : 8 dirham, tanaman untuk makanan ternak : 7 dirham dan empat jenis tanaman kurma dan enam jenis tanaman zaitun : 4 dirham.

Dan kesemuanya itu dipungut berdasarkan luas tanah per jarib. Demikian juga ada 4 jenis besarnya *kharaj* terhadap jenis tanah yang berbeda. Tanah didaerah kota, tanah yang berada dibawah pemilikan tuan tanah, tanah yang berada dibawah pemilikan tuuan tanah, tanah yang tidak diolah, tanah milik raja yang sudah ditinggalkan (raja yang lari setelah kalah dalam peperangan). Selanjutnya baca dalam Dochak Latief, *Instrumen dan Lembaga Ekonomi Islam*, Kumpulan Makalah, disampaikan dalam Kursus Singkat Loka Karya Ekonomi Islam, yang diselenggarakan oleh UII, Fak. Ekonomi, P3EI dengan Syari'ah Banking Institute (SBI dan ICMI Orwil DIY), tanggal: 13 Desember 1993-5 Februari 1994, hal. 19.

<sup>73</sup> Amrullah Achmad dkk, *Op. Cit.*, hal. 42.

Selain dari *kharaj*, yang termasuk jenis pajak lainnya adalah *Jizyah* (pajak poll) yaitu pajak untuk mendapatkan hak memilih, yang khusus ditetapkan bagi orang non Muslim. Seperti Firman Allah:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberi al-Kitab, kecuali jika mereka membayar *jizyah* dengan tunduk dan patuh”.<sup>74</sup>

Di satu pihak, pajak ini dikenakan bagi mereka yang non-muslim karena ketidakamanan mereka dan/atau sebagai pembayaran atas hidup mereka yang dilindungi, sebab dengan membayar pajak ini hidup mereka dijamin. Sebaliknya, pembayaran tersebut bisa diartikan sebagai retribusi yang menggantikan wajib militer, yang paling tidak secara teoritis diwajibkan bagi semua laki-laki Islam yang sudah dewasa, namun wanita dan anak-anak yang tentu saja tidak bisa berperang, dibebaskan dari *jizyah*. Lain halnya dengan non-muslim yang secara *de facto* dikecualikan, maka mereka perlu membantu dengan membayar pajak untuk kesejahteraan dan juga pertahanan negara.<sup>75</sup>

Adapun tentang jumlah *jizyah* sangat variatif. Dalam beberapa kasus, jumlahnya ditentukan dalam perjanjian yang dibuat dengan satu suku yang bernaung di bawah hukuk Islam, atau dengan pembayaran sekaligus atau retribusi perkapita (kedua-duanya). Seperti halnya dengan *kharaj*, *jizyah* juga tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an, karena itu tarifnya didasarkan pada *ijma'* – khususnya sebagaimana yang pernah ada pada masa Khalifah

<sup>74</sup> QS; At-Taubah: 29.

Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib, yang mana tarif per tahunnya bagi orang-orang kaya sebesar 48 *dirham*; 24 *dirham* bagi kelas menengah dan 12 *dirham* bagi mereka yang miskin.

Demikianlah perincian dari mekanisme kerja distribusi pendapatan yang ada dalam ekonomi Islam, yang menurut penulis, Islam dalam hal ini sudah menyiratkan sistem yang adil, di mana bagi orang-orang yang mampu agar mendistribusikan harta/pendapatannya melalui zakat/sejenisnya (*sadaqah, jizyah, kharaj, sadaqatul fitri* dan lain-lain) sehingga setiap umat Islam yang mampu atau tidak bisa beribadah kepada Allah Swt. Demikian juga dalam hal warisan, Islam menempatkan posisi antara laki-laki dan perempuan pada posisi yang proporsional, sehingga kaum laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar (terhadap dirinya, anaknya atau istrinya) dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pria (suami). Lebih jelasnya lihat pada *Tabel 1* (terlampir).

---

<sup>75</sup> Amrullah Achmad, *Ibid.*, hal. 42-43.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PRINSIP EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN

#### A. Analisis terhadap Prinsip Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi

##### Kapitalisme

Ekonomi kapitalisme sebagaimana kita ketahui “maju/berhasil” dalam pertumbuhan, tetapi “gagal” dalam pemerataan (distribusi). Indikasi tersebut dapat dilihat, seperti yang terjadi di Indonesia. Selama 50 tahun pembangunan yang kapitalistik, Indonesia pun menghadapi kenyataan pahit. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) 1994, dengan garis kemiskinan 500 rupiah per hari, terdapat 28 juta rakyat miskin (2 juta di kota dan 26 juta di desa). Bila garis kemiskinan dinaikkan menjadi 1000 rupiah per hari, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sekitar 117 juta jiwa atau 65% dari jumlah penduduk.<sup>1</sup> Dalam sebuah artikel khusus *Harian Republika* dilaporkan bahwa omset tahun 1992 dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam grup Praselya Mulya, di antaranya Salim Group, Ciputra Group, Mochtar Riady (Lippo Group), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Eka Tjipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 triliun rupiah atau 83% APBN Indonesia tahun itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang abad XXI*, (Jakarta, Erlangga, Cet.II, 1995), hal. 105.

<sup>2</sup> *Harian Republika*, 15 Juni 1993.

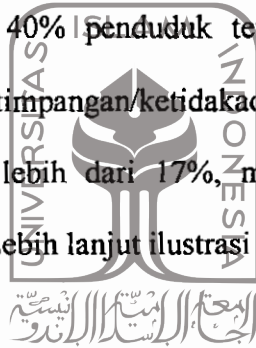
Lebih lanjut dengan adanya krisis yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 yang bermula dari runtuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, mengakibatkan runtuhnya berbagai sektor usaha. Dampak yang paling buruk dialami oleh sektor manufaktur, diikuti sektor konstruksi, sektor properti. Kontraksi ekonomi ini mengakibatkan meningkatnya PHK secara drastis dari 23 juta jiwa pada bulan agustus 1998 menjadi 25-26 juta jiwa pada awal Januari 1999. Jika di Indonesia rata-rata rasio orang bekerja dibandingkan orang tak bekerja adalah 1:6, artinya satu orang bekerja menanggung 6 orang tak bekerja, maka jumlah total orang (yang berpotensi) miskin semakin meningkat. Terbukti, dari 218 juta jiwa populasi Indonesia, pada bulan Maret 1997 tercatat 27 juta jiwa yang hidup pada dan di bawah garis kemiskinan, yaitu sama atau kurang dari Rp 52.000,00 per orang per bulan. Angka ini membubung hingga 79,4 juta jiwa pada bulan Agustus 1998 dan terus melonjak ke angka 118 juta jiwa di akhir Januari 1999. GDP anjlok dari 1200 dollar AS menjadi 300-400 dollar AS per tahun.<sup>3</sup>

Untuk mengkaji langsung asumsi bahwa distribusi pendapatan dalam ekonomi kapitalis terkesan “tidak adil”, yang mana - (kriteria ini dikenal dengan melihat ketidakmerataan versi Bank Dunia yang didasarkan atas porsi

---

<sup>3</sup> Bambang Warih Koesoema & Yanuar Nugroho, *Paradigma Pemilu 1999; Titik Tolak Penyelesaian Krisis Ekonomi & Politik Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menangkap Peluang Bisnis Indonesia Pasca Krisis: Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Krisis, diselenggarakan oleh Magister Manajemen kerjasama dengan ISEI Cabang. Yogyakarta, Yogyakarta, 19 April 1999, hal. 1-2.

pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk)<sup>4</sup> secara sederhana dapat diukur dengan mengkaji berapa persen dari PNB yang diraih oleh 40% penduduk termiskin, berapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya. Dalam ilmu ekonomi, menurut Sumitro Djojohadikusumo, jika 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12%, maka ketimpangan/ketidakadilan yang ada dianggap *mencolok*. Jika 40% penduduk termiskin menerima antara 12% sampai 17%, maka ketimpangan/ketidakadilan dianggap *sedang*. Jika penerimaan golongan ini lebih dari 17%, maka ketimpangan/ketidakadilan dianggap *lumayan kecil*.<sup>5</sup> Lebih lanjut ilustrasi di atas bisa dilihat pada *Tabel* di bawah ini.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

<sup>4</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta; Erlangga, 1996), hal. 55.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 4.

**Tabel Distribusi Pendapatan Berdasarkan Klasifikasi  
Tingkat Pendapatan dan Persamaan  
(Versi Bank Dunia)  
Ketidakmertaanya Tinggi  
(40% Penduduk Miskin Menerima Kurang Dari 12%)**

Negara /Tahun	Per Capita GNP (U\$S)	Rendah 40%	Sedang 40 %	Tinggi 20%
Pendapatannya sampai 300\$				
1. Kenya/1960	136	10.0	22.0	68.0
2. Sierra Leone/1968	159	119.6	22.4	68.0
3. Phili. 1971/pina	239	11.6	34.6	53.8
4. Iraq/1956	200	6.8	25.2	68.0
5. Senegal/1960	245	10.0	26.0	64.0
6. Ivory Coast/1970	247	10.9	32.1	57.1
7. Rhodesia/1968	252	8.4	22.8	69.0
8. Tunisia/1970	255	11.4	53.6	55.0
9. Honduras/1968	265	6.5	28.5	65.0
10. Ecuador/1970	277	6.5	20.0	73.5
11. All Savador/1969	295	11.2	36.4	52.4
12. Turki/1968	282	9.3	29.9	60.8
Ketidak merataannya Sedang (40% Penduduk miskin menerima antara 12-17%)				
Negara/Tahun	Per Capita GNP (U\$S)	Rendah 40%	Sedang 40%	Tinggi 20%
1. Birma (1958)	82	16.5	38.7	44.8
2. Dahomey (1959)	87	15.5	34.5	50.0
3. Tanzania (1967)	89	13.0	26.0	61.0
4. India (1964)	99	16.0	32.0	52.0
5. Madagskar (1960)	120	13.5	25.5	61.0
6. Zambia (1959)	230	13.5	28.5	57.0
Ketidak merataannya Sedang (40% Penduduk miskin menerima antara 17%)				
Negara/Tahun	Per Capita GNP (U\$S)	Rendah 40%	Sedang 40%	Tinggi 20%
1. Chad (1958)	78	18.0	39.0	43.0
2. Sri Lngka (1969)	95	17.0	37.0	46.0
3. Nigeria(1960)	97	18.0	40.0	42.0
4. Pakistan (1964)	100	17.5	37.0	30.0
5. Uganda (1970)	126	17.1	35.8	47.1
6. Thailand (1970)	180	17.0	37.5	45.5
7. Korea (1970)	235	18.0	37.0	45.0
8. Taiwan (1964)	241	20.4	39.0	40.1

<b>Ketidakmerataannya Tinggi</b> (40% penduduk miskin menerima kurang dari 12%)				
Negara/Tahun	Per Capita GNP (US\$)	Rendah 40%	Sedang 40%	Tinggi 20%
1. Malaysia/1970	33.0	11.6	32.4	56.0
2. Colombia/1970	358	9.0	30.0	61.0
3. Brazil/1970	390	10.0	28.4	61.5
4. Peru/1971	480	6.5	33.5	60.0
5. Gabon/1968	497	8.8	23.7	67.0
6. Jamaika/1958	510	8.2	30.0	61.5
7. Costarica/1971	521	11.5	30.0	58.5
8. Mexico/1969	645	10.5	25.5	64.0
9. Afrika Selatan/1965	669	6.2	35.8	58.0
10. Panama/1969	692	9.4	31.2	58.4
<b>Ketidakmerataannya Sedang</b> (40% penduduk miskin menerima 12% dan 17%)				
Negara/Tahun	Per Capita GNP (US\$)	Rendah 40%	Sedang 40%	Tinggi 20%
1. Republik Dominica/1969	323	12.2	30.3	57.5
2. Iran/1968	332	12.5	33.0	54.5
3. Guyana 1956	550	14.0	40.3	45.7
4. Libanon/1990	508	13.0	26.0	61.0
5. Uruguay/1968	618	16.5	35.5	48.0
6. Chile/1968	744	13.0	30.2	56.8
<b>Ketidakmerataannya Rendah</b> (40% penduduk miskin menerima 17% ke atas)				
Negara/Tahun	Per Capita GNP (US\$)	Rendah 40%	Sedang 40%	Tinggi 20%
1. Suriname/1962	394	21.7	35.7	42.6
2. Greece/1957	500	21.0	29.5	49.5
3. Yugoslavia/1968	529	18.5	40.0	41.5
4. Bulgaria/1968	530	26.8	40.0	33.2
5. Spanyol/1965	750	17.6	36.7	45.7

Bersambung

Sambungan

<b>Ketidakmerataannya Tinggi</b> (40% penduduk miskin menerima kurang dari 12%)				
Negara/Tahun	Per Capita GNP (US\$)	Rendah 40%	Sedang 40%	Tinggi 20%
Pendapatannya di atas US\$ 750				
1. Venezuela/1970	104	7.9	27.1	68.0
2. Finlandia/1962	1599	8.4	39.6	49.5
3. Prancis/1913	1913	9.2	36.8	53.7
<b>Ketidakmerataannya Sedang</b> (40% penduduk miskin menerima 12% dan 17%)				
Negara/Tahun	Per Capita GNP (US\$)	Rendah 40%	Sedang 40%	Tinggi 20%
Pendapatannya di atas US\$ 750				
1. Argentina/1970	1079	16.5	36.1	47.4
2. Puerto Rico/1968	1100	13.7	35.7	50.6
3. Belanda/1967	1990	13.6	37.9	48.5
4. Norwegia/1968	2010	16.6	42.9	40.5
5. Jerman Barat/1964	2144	15.4	31.7	52.9
6. Denmark/1968	2563	13.6	38.8	47.6
7. Selandia/1969	2859	15.5	42.5	42.0
8. Swedia/1963	2929	14.0	42.0	44.0
<b>Ketidakmerataannya Rendah</b> (40% penduduk miskin menerima 17% ke atas)				
Negara/Tahun	Per Capita GNP (US\$)	Rendah 40%	Sedang 40%	Tinggi 20%
Pendapatannya di atas US\$ 750				
1. USA/1968	2015	18.8	42.2	39.0
2. Hungaria/1969	1140	24.0	42.5	33.5
3. Czwzhoslovakia/1964	1150	27.6	41.4	31.0
4. Australia/1968	2509	20.0	41.2	38.8
5. Canada/1965	2920	20.0	39.8	40.2

Sumber : David Colman &amp; Fred Nixon, 1994, p. 72-73

Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa negara-negara yang berkembang diungkapkan oleh besarnya jumlah mereka, yang mana 20 persen penduduk yang terkaya menerima lebih dari 60 persen GNP dan 40 persen penduduk yang termiskin menerima kurang dari 10 persen (atau sedikit lebih banyak) dari GNP-nya. Sebaliknya, dinegara-negara maju hanya dalam dua kasus saja (Prancis dan Jerman), 20 persen penduduk terkaya menerima lebih dari 50 persen GNP, walaupun persentase GNP yang diterima oleh 40 persen termiskin adalah di bawah 15 persen dalam sejumlah kasusnya. Jadi, tanpa memperhitungkan negara-negara yang diabaikan dari tabel di atas, ada bukti yang kuat bahwa income terdistribusi secara lebih/ tidak merata di negara-negara miskin di bandingkan di negara-negara yang kaya. Hal ini pada gilirannya telah diinterpretasikan sebagai tingkatan ketidakmerataan dalam distribusi /ukuran income mengecil seiring dengan pembangunan.<sup>6</sup>

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia ini sering pula dipakai sekaligus sebagai kriteria kemiskinan relatif. Sebab pemerataan distribusi pendapatan nasional bukan semata-mata “pendamping” pertumbuhan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan, ketidakmerataan juga sesungguhnya tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Selain dari itu isu pemerataan dan pertumbuhan hingga kini masih menjadi masalah kontroversial yang tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Kedua hal ini berkaitan erat

---

<sup>6</sup> David Colman & Fred Nixon, *Economic of Change In Less Developed Countries*, (New York; Cambridge University Press, 1994), hal. 74.

dengan efektivitas dan efisiensi. Pemikiran dan strategi serta efisiensi dan pertumbuhan di satu pihak melawan pengutamaan efektivitas dan pemerataan di pihak lain.

Dengan adanya ketidakmerataan yang terlampau besar (kesenjangan) ini memiliki implikasi terhadap ketidakpuasan sosial, kesempatan yang tidak sama untuk mencapai pendidikan dan kesempatan kerja, serta kemunduran dalam efisiensi. Idealnya perekonomian-perekonomian demokratis harus berusaha untuk meniadakan disparitas-disparitas yang tidak dibenarkan. Dan solusi yang ditawarkan dalam ketidakmerataan/ketidakteraturan ekonomi yaitu dengan sistem perpajakan, terutama pajak penghasilan, pajak dan warisan. Tetapi perlu diingat bahwa undang-undang perpajakan pada berbagai negara banyak mengandung peluang untuk menghindari pajak, sehingga kelompok penghasilan besar dapat memperkecil jumlah kewajiban pajak. Akibatnya kelompok penghasilan menengah dan rendah menanggung beban pajak lebih besar.

Dari persoalan distribusi ini, sesungguhnya Kapitalisme sering dikecam, dan diimplementasikan Kapitalisme dalam dua lembaga yaitu: *hak milik dan warisan*, yang merupakan sebab pokok terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Lebih lanjut Adam Smith dan kebanyakan ahli ekonomi abad ke-19 yang meyebarluaskan doktrin-doktrin kapitalisme tradisional, tidak “mengecam” ketidakmerataan ekonomi (*economic inequality*), tetapi membenarkannya berdasarkan alasan bahwa hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan pembentukan modal dengan tabungan orang-

bahwa sistem distribusi ini dipandang memiliki keistimewaan dibandingkan sistem distribusi yang ada (dalam sistem distribusi sosialisme, fasisme dan lain-lain) inilah yang disepakati oleh pendukung/penganut ekonomi Kapitalisme.

Dan jika kita mengacu pada konsep Islam tentang struktur pasar yang tanpa bunga dan dengan keadilan distributif sebagai sasaran fundamentalnya cukup berbeda dari struktur di bawah roda kapitalistik. Dalam kerangka kerja pasar Islam, maksimalisasi laba bukanlah sebuah motif penting dari perusahaan swasta. Persaingan lebih didukung atas monopoli, tetapi haruslah jujur dan tanpa eksploitasi dan ini tidaklah keramat atau tidak dapat diubah. Implikasinya dalam bentuk ini, sistem pasar melayani sasaran keadilan sosial dan ekonomi dengan efisiensi dalam alokasinya.

Sebaliknya, kerangka kerja pasar di bawah roda kapitalistik mengimplikasikan bahwa pada akhirnya harga pasar dibiarkan sendiri menuju optimalitas Pareto yang didefinisikan sebagai konfigurasi yang “penuh kebahagiaan” dari kekuatan-kekuatan ekonomi sedemikian hingga bahkan suatu perubahan sangat kecil pun akan membuat seseorang dalam sistem tersebut akan menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, sebuah sistem perusahaan swasta mencapai secara simultan suatu alokasi sumber-sumber daya yang optimal, pendayagunaan paling efisien faktor-faktor dan input-input lain yang tersedia dan maksimalisasi kepuasan oleh para konsumen, jika segala hal lain sama. Walaupun sistem pasar tersebut mengarah ke efisiensi dalam pengertian Paretian, namun seperti diketahui gagal dalam mengatasi problem distribusi dan

keadilan sosial. Sebagai contoh, cukup mudah dibayangkan dalam perekonomian semacam itu bahwa efisiensi Pareto dapat menyertai suatu bentuk distribusi pendapatan yang lebih buruk. Bahkan bila sistem tersebut berangkat dari suatu keadaan distribusi yang “sesuai/layak” pada awalnya, lebih lanjut tidak ada jaminan bahwa solusi equilibriumnya akan sesuai. Jadi implikasi lebih lanjut adalah terjadinya ketidakadilan distribusi pendapatan dalam ekonomi Kapitalisme, dikarenakan mekanisme pasar yang berlaku dalam masyarakat, yang mana cenderung lebih menguntungkan kaum/sekelompok orang saja, sehingga kekayaan terakumulasi pada sebagian kecil masyarakat.

#### **B. Analisis terhadap Prinsip Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam**

Adanya ketidakmerataan income, pengangguran dan kemiskinan di sejumlah negara sedang berkembang telah menjadi penyebab utama keprihatinan pada tingkat nasional maupun internasional. Dialog Utara Selatan secara kontinyu tentang Tatanan Ekonomi Dunia Baru bahkan merupakan suatu manifestasi dari keseriusan problem-problem ini. Keprihatinan yang semakin besar tersebut juga terefleksikan secara jelas dalam pencarian strategi-strategi, model dan kerangka kerja kebijakan baru untuk mengatasi masalah ini pada tingkat nasional.

Dalam konteks ini, sangat mencolok bahwa disparitas-disparitas pendapatan dan kekayaan yang akut di negara-negara Muslim agaknya tak konsisten dengan penekanan Islam pada keadilan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa hal, Islam memperlakukan semua makhluk sama di hadapan Allah

keadilan sosial. Sebagai contoh, cukup mudah dibayangkan dalam perekonomian semacam itu bahwa efisiensi Pareto dapat menyertai suatu bentuk distribusi pendapatan yang lebih buruk. Bahkan bila sistem tersebut berangkat dari suatu keadaan distribusi yang “sesuai/layak” pada awalnya, lebih lanjut tidak ada jaminan bahwa solusi equilibriumnya akan sesuai. Jadi implikasi lebih lanjut adalah terjadinya ketidakadilan distribusi pendapatan dalam ekonomi Kapitalisme, dikarenakan mekanisme pasar yang berlaku dalam masyarakat, yang mana cenderung lebih menguntungkan kaum/sekelompok orang saja, sehingga kekayaan terakumulasi pada sebagian kecil masyarakat.

#### **B. Analisis terhadap Prinsip Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam**

Adanya ketidakmerataan income, pengangguran dan kemiskinan di sejumlah negara sedang berkembang telah menjadi penyebab utama keprihatinan pada tingkat nasional maupun internasional. Dialog Utara Selatan secara kontinyu tentang Tatanan Ekonomi Dunia Baru bahkan merupakan suatu manifestasi dari keseriusan problem-problem ini. Keprihatinan yang semakin besar tersebut juga terefleksikan secara jelas dalam pencarian strategi-strategi, model dan kerangka kerja kebijakan baru untuk mengatasi masalah ini pada tingkat nasional.

Dalam konteks ini, sangat mencolok bahwa disparitas-disparitas pendapatan dan kekayaan yang akut di negara-negara Muslim agaknya tak konsisten dengan penekanan Islam pada keadilan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa hal, Islam memperlakukan semua makhluk sama di hadapan Allah

tanpa membedakan peringkat, kelas atau ras. Sebab seluruh kerangka kerja institusional dan kebijakan dalam Islam diarahkan untuk pencapaian sasaran fundamental yaitu keadilan distributif.<sup>12</sup>

Hal ini dikarenakan pada dasarnya baik pembentukan, penggunaan dan distribusi pendapatan harus berlaku dengan tata cara yang halal dan adil sebab keadilan dalam Islam adalah meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Jika kita lihat bahwa sesungguhnya tingkat kemakmuran umat Islam pada umumnya masih rendah bila dibandingkan dengan umat yang beragama lain. Misalnya dalam hal tingkat kemakmuran masyarakat dunia berdasarkan ketiga kelompok agama besar yang dianut, maka susunan/distribusi pendapatan perkapitanya sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Masyarakat yang beragama Katholik/Protestan pendapatan per kapitanya sebesar US\$ 8.600 setahun.
2. Masyarakat Islam termasuk negara Petro Dollar (seperti Oman, Libya, Arab Saudi, Kuwait dan Persatuan Emirat Arab) berpendapatan per kapita US\$ 937 per tahun.
3. Masyarakat Hindu/Budha/Shinto dan Khong Hoe Coe berpendapatan per kapita US\$ 788 per tahun.

---

<sup>12</sup> M. Ahmed, *Distributive Justice and Fiscal and Monetary Economics in Islam*, Makalah di sampaikan pada Seminar Internasional tentang Kebijakan Ekonomi Fiscal dan Moneter yang diselenggarakan di Saudi Arabia oleh International Centre for Research in Islamic Economics; King Abdul Aziz University Jeddah, Saudi Arabia, 7-12 Oktober 1978, hal. 311.

<sup>13</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, *Op. Cit.*, hal. 20.

4. Masyarakat Islam tidak termasuk negara petro Dollar hanya berpendapatan US\$ 467 per tahun.

Dengan demikian masyarakat Islam di luar negara-negara Timur Tengah berada dalam posisi tingkat kemakmuran yang paling bawah yaitu sebanyak US\$ 467 per kapita per tahun. Demikian juga halnya yang terjadi di Indonesia yang pada tahun 1984 pendapatannya sebesar US\$ 540 dan pada tahun 1986 senilai US\$ 588.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ukuran distribusi pendapatan untuk 12 negara Muslim dan 5 negara maju, maka penulis akan mengilustrasikannya seperti yang terlampir pada **Tabel** dibawah ini.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**Tabel**  
**Ketidakadilan di Negara-Negara Muslim Tertentu Tertentu Negara-Negara Berkembang**

Negara	Tahun	Rasio Lorenz	Indek Kuznets	GNP Perkapita US
<b>Negara Muslim</b>				
Banglades	1966/7	0.342	0.260	266 (70)
Mesir	1964/5	0.434	0.332	260 (73)
Indonesia	1971	0.463	0.337	126 (73)
Iran	1968	0.502	0.373	1635 (75)
Iraq	1956	0.629	0.501	381 (70)
Libanon	1955-60	0.537	0.418	603 (70)
Libya	1962	0.269	0.203	5236 (74)
Malaysia	1970	0.518	0.395	602 (73)
Pakistan	1970/1	0.330	0.248	129 (73)
Sudan	1963	0.446	0.344	117 (70)
Tunisia	1970	0.502	0.397	624 (74)
Turki	1986	0.568	0.437	910 (75)
<b>Negara-Negara Berkembang</b>				
Jerman	1970	0.394	0.299	6871 (75)
Jepang	1970	0.287	0.213	4133 (74)
Swedia	1970	0.387	0.290	8459 (75)
Inggris	1968	0.338	0.258	4089 (75)
Amerika	1972	0.417	0.316	7087 (75)

Sumber : Shail Jain. Ukuran Distribusi Pendapatan Versi Bank Dunia 1975

Dua ukuran ketidakmerataan income global disajikan pada Tabel tersebut. Keduanya adalah:<sup>14</sup> a). Koefisien Gini atau rasio Lorenz, dan b). Indeks ketidakmerataan Kuznets. Ukuran-ukuran ini telah digunakan secara luas untuk mengindikasikan tingkat ketidakmerataan income secara

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 313.

keseluruhan. Kedua rasio ini bernilai antara nol dan satu; semakin tinggi rasionya semakin besar ketidakmerataan income dan sebaliknya.

Dari tabel di atas, jelas bahwa disparitas-pendapatan yang ada sangat akut di kebanyakan negara Muslim. Ketidakmerataan-ketidakmerataan tersebut lebih besar daripada yang dijumpai bukan saja di negara-negara maju tetapi juga di banyak negara sedang berkembang, negara-negara dengan ketidakmerataan pendapatan yang relatif rendah juga termasuk di antara negara-negara yang tidak maju.

Rata-rata sederhana dari rasio Lorenz lima negara maju adalah 0.365. Dengan mengacu pada rata-rata ini, rasio Lorenz lebih tinggi dalam sembilan dari dua belas negara Muslim. Tiga negara di mana rasio Lorenz-nya lebih rendah dari rata-rata negara maju adalah Libya, Bangladesh dan Pakistan, dua yang terakhir ini adalah termiskin di antara negara Muslim. Di Iran, Lebanon, Malaysia, Tunisia dan Turki, rasio Lorenz-nya diatas 0.50, yang mengindikasikan tingkat ketidakmerataan pendapatan yang tinggi. Kasus-kasus ketidakmerataan akut semacam itu tidaklah banyak di seluruh dunia. Gambaran yang sama muncul bila perbandingan-perbandingannya didasarkan pada indeks ketidakmerataan Kuznets.

Selanjutnya sebuah pola yang lebih suram ditunjukkan oleh data pada *Tabel* yang terlampir di bawah ini.

**Tabel**  
**Ukuran Distribusi Pendapatan di Negara-Negara Muslim dan Negara-Negara Berkembang**

Kelompok-kelompok Negara	Di bawah 10%	2 thn decile	3 thn decile	4 thn decile	5 thn decile	6 thn decile	7 thn decile	8 thn decile	9 thn decile	di atas 10%	di atas 5%
<b>Negara Muslim</b>											
Banglades	3.4	4.5	5.4	6.3	7.3	8.5	10.1	12.2	15.6	26.7	16.7
Mesir	1.5	3.1	4.2	5.3	6.5	8.1	10.1	12.8	17.3	31.1	19.2
Indonesia	2.7	4.1	4.9	5.6	6.3	7.1	8.0	9.3	11.3	40.1	33.7
Iran	1.2	2.8	3.8	4.9	5.9	7.2	8.8	11.0	14.7	39	29.7
Iraq	0.9	1.2	1.8	3.6	3.7	5.1	7.2	10.6	17.1	39.7	35.1
Linbanon	2.4	2.7	3.2	4.0	4.8	6.0	7.6	9.9	14.3	49.8	34.6
Libya	4.8	5.5	6.4	7.1	8.0	9.1	10.4	12.0	14.7	45.1	13.3
Malaysia	1.1	2.4	3.4	4.3	5.6	6.9	8.8	11.5	16.1	22.2	28.3
Pakistan	3.6	4.8	5.6	6.6	7.5	8.5	10.0	11.9	14.7	39.5	17.3
Sudan	1.9	3.1	3.9	5.0	6.2	7.7	9.6	12.5	17.1	26.8	20.9
Tunisia	1.8	2.4	3.1	4.1	5.2	6.9	8.9	12.2	18.12	37.3	23.5
Turki	1.0	1.9	2.8	3.7	6.2	6.2	8.1	10.9	15.9	44.7	32.8
<b>Negara-Negara Maju</b>											
Jerman	2.2	3.7	4.7	5.8	7.0	8.3	10.3	12.3	16.5	29.1	18.2
Jepang	3.4	5.4	6.3	7.2	8.3	9.2	10.5	12.1	14.5	23.1	14.2
Swedia	1.5	3.7	4.9	6.1	7.4	8.8	10.6	12.9	16.6	27.5	16.8
Inggris	2.3	4.3	5.4	6.5	7.8	9.2	11.0	13.2	16.4	23.9	13.7
Amerika	0.8	3.1	4.4	5.8	7.1	8.8	10.8	13.5	17.6	28.1	16.6

Sumber : Shail Jain. Ukuran Distribusi Pendapatan Versi Bank Dunia 1975

Dengan 12 negara Muslim disatukan, pangsa dari 10 persen penduduk termiskin dalam income total yang tersedia adalah 2.2 persen dibanding dengan 37.0 persen dari 10 persen terkaya dan 26.3 persen dari 5 persen terkaya. Angkanya semakin memburuk jika hanya 9 negara saja yang dipertimbangkan, di mana rasio Lorenz lebih tinggi dari rata-rata untuk negara-negara maju. Pangsa rata-rata dari 10 persen terbawah populasi di sembilan negara ini ternyata 1.21 persen dibanding dengan 41 persen dari 10 persen terkaya dan 28.7 persen dari 5 persen terkaya populasinya.

Rata-rata untuk kesembilan negara tersebut bisa dibandingkan dengan rata-rata untuk kelima negara maju. Rata-rata untuk 10 persen termiskin di negara-negara maju 2.04 persen yang berarti 70 persen lebih tinggi daripada rata-rata untuk kesembilan negara Muslim tersebut. Di ujung satunya dari skala income, pangsa 10 persen terkaya dari 5 persen terkaya di negara-negara maju berturut-turut adalah 28.3 dan 15.9 persen, yang adalah 30 dan 45 persen lebih rendah daripada rata-rata sederhana untuk kesembilan negara Muslim.

Dalam kasus Bangladesh dan Pakistan, di mana secara paradoksnya rasio Lorenz sangat rendah (bahkan lebih rendah daripada negara-negara maju), tingkat kemiskinan dan kemelaratannya termasuk yang terburuk di dunia. Sebagai contoh, sebuah studi ILO baru-baru ini menunjukkan 96 persen dari populasi total Bangladesh dicap sebagai "miskin" berdasarkan Standar Eropa Barat tentang "garis kemiskinan" yang berlaku, yang ditetapkan sebagai UU\$2.4 per orang per hari atau US\$880 per orang per tahun.

Jelaslah, standar-standar Eropa Barat tidak dapat diterapkan ke negara-negara Asia dan Afrika atau dalam hal ini pada negara Muslim mana pun. Lebih jauh pengestimasi standar Eropa Barat pada nilai tukar yang berlaku menyembunyikan perbedaan dalam daya beli dollar AS. Menurut sebuah studi, di kebanyakan negara Asia satu US\$ dapat membeli hanya barang dan jasa senilai 20 persen. Setelah menyesuaikan “garis kemiskinan” tersebut dengan perbedaan-perbedaan daya beli, nampak bahwa 96 persen populasi Bangladesh tergolong di bawah garis kemiskinan US\$. Lima puluh per orang per hari atau US\$182 per tahun. Bahkan garis kemiskinan ini sangat tinggi untuk sebuah negara seperti Bangladesh di mana income per kapita rata-rata negara tersebut hanya US\$66 pada tahun 1970, atau sekitar sepertiga dari garis kemiskinan Eropa Barat.

Di Pakistan, walaupun situasinya agak lebih baik sekitar 50 persen (lebih dari 35 juta orang) hidup di bawah garis kemiskinan US\$50 per tahun. Menurut studi baru-baru ini, persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan yang diestimasi secara lebih komprehensif adalah 53.7 di daerah pedesaan dan 44.1 di daerah urban pada tahun 1969/70. Studi tersebut menunjukkan bahwa garis kemiskinan untuk sebuah keluarga lima anggota di daerah pedesaan dan urban di Pakistan berturut-turut adalah PRs 174 dan PRs 206, pada tahun 1969/70 atau US\$42 dan US\$49 dengan nilai tukar yang berlaku.

Untuk Libya, tidak tersedia data baru tentang ukuran ~~distribusi~~ pendapatannya. Berdasarkan data tahun 1963 negara tersebut memiliki ketidakmerataan income yang paling rendah di antara semua negara Muslim. Hal ini sangat kontras tajam bahkan dengan rata-rata kelima negara maju sekalipun. Menariknya, income per kapita dan kinerja pertumbuhan negara tersebut juga sangat mengesankan. Tingkat ketidakmerataan income yang rendah di Libya mungkin memang merefleksikan situasi yang ada juga karena program jaminan sosial massif yang didirikan oleh negara itu baru-baru ini. Tidak adanya informasi serupa tentang distribusi pendapatan yang tersedia untuk negara-negara Muslim lainnya, yang memerlukan riset lebih jauh. Akan tetapi, orang tidak membutuhkan persuasi lain untuk menerima fakta suram tentang keberadaan disparitas pendapatan yang akut di negara-negara Muslim dan kemiskinan dan kemelatan di sebagian di antaranya. Lebih jauh, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu menggembarakan di negara-negara berpenduduk besar termasuk Indonesia, Mesir dan Sudan, dimensi-dimensi problemnya memang menakutkan.

Oleh sebab itu bila negara-negara Muslim diambil sebuah kelompok, orang dapat melihat kantong-kantong kemakmuran dan kemiskinan, tingkat pendidikan yang tinggi dan buta huruf yang meluas dan perbedaan yang mencolok dalam ketersediaan layanan sosial lain. Sebab sejumlah negara memiliki kerangka kerja organisasional dan institusional yang relatif lebih baik, walaupun dari segi GDP per kapita mereka berperingkat sangat rendah.

Sehingga selain menyoroti disparitas-disparitas, analisis ini juga mengindikasikan potensi yang sangat besar untuk mendayagunakan keunggulan-keunggulan yang berlainan dari berbagai negara untuk suatu transformasi mutual yang kondusif.

Melihat kondisi di atas, sesungguhnya kekayaan dapat diproduksi pada suatu negara dalam jumlah besar, tetapi jika pendistribusiannya tidak berdasarkan atas prinsip yang benar dan adil, (baca: yang penulis maksudkan adalah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yang berarti tidak terpusat pada sekelompok masyarakat saja) maka negara tersebut tidak akan menikmati kemakmuran. Ironisnya dalam masyarakat yang telah mengalami kemakmuran seperti zaman modern ini yang mana kekayaan dijumpai dalam jumlah besar dan berlimpah, namun pendistribusiannya salah, maka banyak penduduk/daerah di negara tersebut tetap dalam kemiskinan. Seperti yang terjadi pada masyarakat komunisme (di Uni Sovyet/Rusia, hingga perang Korea selesai, Cina masih menganut sistem kolektivisme di sektor pertanian) jika pendistribusian kekayaan tidak sesuai, dampaknya ada sekelompok masyarakat yang tidak mendapatkan bagian yang semestinya akan merasa terpinggirkan. Idealnya distribusi pendapatan/kekayaan dalam ekonomi tingkat keadilannya harus tinggi.

Maka untuk membasmi ketidakadilan distribusi kapitalisme, sosialisme mereduksi manusia kepada suatu keadaan permanen dari perbudakan upah dan juga membunuh inisiatif dan usaha mereka dengan kolektivisasi semua sarana

produksi dan pemusatan pembuatan keputusan.<sup>15</sup> Sebaliknya jika dalam model pembagian distribusinya mengacu pada *hak milik* dan *warisan* yang menjadi puncak ketidakadilannya seperti dalam ekonomi Kapitalisme, implikasinya yang memiliki kekayaan hanyalah kaum borjuis saja. Dengan kata lain paham kapitalis menekankan bahwa distribusi kekayaan pasca produksi kekayaan sedangkan paham komunisme pada distribusi kekayaan/pendapatan dengan tidak memperhatikan dampaknya pada masyarakat.

Lain halnya yang diterapkan dalam ekonomi Islam, di mana Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua golongan masyarakat sebaliknya mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan pada segelintir orang saja. Sebagaimana yang terilustrasikan dalam firman Allah yang artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.<sup>16</sup> Karena konsep kekayaan dalam Islam merupakan karunia dan pemberian Allah. Manusia sifatnya hanya memiliki ‘hak guna’ atas kekayaan yang dimilikinya. Karena pemilik yang sebenarnya adalah Allah SWT. Lebih jauh lagi implikasi yang ditimbulkan dari pandangan ini dalam penggunaan semua bentuk kekayaan manusia selalu melakukan evaluasi apakah tindakannya sudah sesuai dengan syari’at atau belum.

---

<sup>15</sup> Umer Chapra, terj. Nur Hadi Ikhsan & Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), hal. 281.

<sup>16</sup> QS; Al-Hasyar: 7.

Adapun prinsip- prinsip distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam didasari atas tiga sendi yaitu :<sup>17</sup>

### 1. Asas Kebebasan

Ajaran Islam mengajarkan agar dalam kehidupan ekonomi tidak terjadi kediktatoran dan mengendalikan rezeki mereka . Hal itu dilakukan karena dua hal. *Pertama*, percaya kepada Allah (baca: menurut penulis dalam diri manusia mempunyai dua unsur/dimensi yaitu dimensi *ilalahiah/vertikal* yang sudah *taken for granted* bagi setiap manusia); *Kedua*, percaya kepada manusia (dimensi *insaniah/horizontal* yang memang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan).

#### a. Percaya kepada Allah dan Mengesakan- Nya

Sesungguhnya inti kepercayaan kepada Allah di dalam Islam adalah tauhid.<sup>18</sup> Dan hakikat tauhid adalah mengesakan Allah dan beribadah serta selalu memohon pertolongannya. Berangkat dari sini, maka bertauhid berarti menganggap Allah satu-satunya yang harus disembah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun.

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997),, hal. 203.

<sup>18</sup> *Tauhid* menurut penulis merupakan komitmen yang mendasar dan totalitas bagi setiap muslim dalam segala dimensi kehidupannya untuk menyelaraskannya dengan kehendak Allah. Komitmen tersebut tercermin dalam kalimat “Laillahailallah” artinya tiada Tuhan selain Allah; sebagai pemilik, pengatur alam, Maha Pencipta rizki, yang menentukan hidup/mati dan sebagainya. Lebih lanjut *Yunahar Ilyas* dalam Lokakarya Ekonomi Islam yang berjudul: “*Beberapa Prinsip Sistem Sosial Dalam Islam*”, pada hal. 18 menjelaskan bahwa manusia

## b. Percaya kepada Manusia

Ajaran Islam menerapkan kebebasan karena ia menganjurkan kepada manusia untuk percaya kepada Allah, demikian juga dengan menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia, bahwa manusia memiliki fitrah untuk menyembah Allah

Oleh sebab itu Allah mengangkat manusia sebagai “khalifatullah” (sebagai definisi dari peran dan tugas manusia untuk memakmurkan kehidupan di dunia yang didasarkan atas sistem organisasi yang teratur dan tertib berdasarkan aqidah Islamiyah).<sup>19</sup>

Lebih jauh Allah telah menciptakan manusia dan memberikannya kekuatan jasmani dan rohani untuk menegakkan kekhalifahan dan memakmurkan bumi, semua itu tidak akan terlepas dari hubungan manusia dengan Allah.

## 2. Pengakuan Hak Milik Pribadi

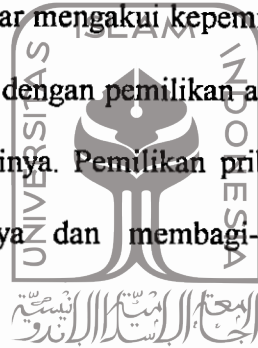
Peraturan Islam dengan mengakui pemilikan pribadi/khusus adalah untuk memelihara naluri manusia yang tumbuh sejak kecil, yaitu senang memiliki. Naluri ini diciptakan Allah tanpa intervensi dari siapa pun. Adapun prinsip-prinsip umum ekonomi Islam tentang

---

bertauhid berarti manusia yang “bebas”, merdeka, yang hanya mau menjadi “hamba Allah” bukan “hamba manusia”.

<sup>19</sup> Pernyataan diatas dikuatkan dengan ayat al-Qur’an yaitu: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri

hak milik pribadi yaitu:<sup>20</sup> (1). Tuhan menciptakan dunia dengan kekayaan yang melimpah bagi manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan; (2). Karena itu semua itu menjadi milik mereka, jika mereka berusaha dan tidak zhalim; (3). Dengan adanya kepemilikan tersebut, mereka harus memperhatikan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat luas. Berangkat dari uraian itu, maka Islam benar-benar mengakui kepemilikan individu, namun pemilikan pribadi berbeda dengan pemilikan absolut, sebab hanya Tuhan yang berhak memilikinya. Pemilikan pribadi yang sah adalah hak untuk memanfaatkannya dan membagi-bagikannya pada orang yang berhak.



Tetapi walaupun Islam menganjurkan pemilikan pribadi dalam pengertian di atas, namun hak semacam itu mempunyai beberapa persyaratan antara lain: *Pertama*, Nabi Muhammad telah menyebutkan banyak hal tentang kebutuhan pribadi (untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah) tetapi melebihi itu semua tidak boleh. *Kedua*, jika zakat tidak mencukupi kebutuhan sosial, maka negara berhak untuk menarik pajak tambahan, karena orang miskin juga berhak (selain zakat, misalnya sedekah), atas kekayaan orang kaya. *Ketiga*, redistribusi umum

---

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan". (QS: al-Baqarah :256 dan az-Zumar : 17).

<sup>20</sup> Amrullah dkk, *Islamisasi Ekonomi; Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta; PLP2M, 1985), hal. 52.

bisa berlaku atas asset produktif dan mengkonsumsi harta kekayaan masyarakat. Jadi kedua bentuk redistribusi di atas dianjurkan untuk menjaga keutuhan masyarakat, pemerataan kekayaan, keadilan sosial dan menjaga kebebasan individu.

### 3. Warisan, Pengakuan terhadap Hak Milik yang Paling Menonjol

Menurut pengamat ada dua hak yang utama : *Pertama*, hak yang tetap dan kekal dan *kedua*, hak bebas dalam membelanjakan hak milik. Adapun hikmah disyaratkannya warisan adalah : dalam rangka menjamin kemaslahatan pribadi dan menjamin kemaslahatan keluarga.

Warisan dapat memperkuat tali persaudaraan antarindividu, keluarga dan dapat memperkokoh solidaritas serta hasrat untuk saling tolong-menolong. Dalam bidang distribusi warisan termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu dengan memindahkan harta benda dari milik perseorangan kepada sekelompok orang.

Misalnya kedua orang tua orang yang meninggal dijamin memperoleh bagian tertentu dari warisan. Ini tidak hanya akan menjamin kesejahteraan mereka, tetapi juga memungkinkan distribusi bagian orang tua ini kepada saudara laki-laki dan wanita dari orang yang meninggal tersebut setelah orang tuanya wafat, dengan demikian memperluas distribusi kekayaan. Sebaliknya istri

juga dijamin bagiannya dalam Syari'ah dan sisanya untuk semua (harus semua) anak-anak orang yang meninggal itu. Jika tidak ada anak, kekayaan itu didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dan wasiat dari yang meninggal untuk menjamin distribusi yang lebih adil dan luas.

Sehingga dengan kata lain, tujuan di balik skema pewarisan yang ditetapkan Islam – dalam rangka mewujudkan suatu distribusi yang memiliki sumber yang luas (*a broad-based distribution*) dari harta yang meninggal. Maka jika nilai-nilai Islam diterapkan dan sistem pewarisan dilaksanakan dengan efektif, distribusi kekayaan dalam masyarakat Muslim pasti akan adil dan demikianlah seterusnya.<sup>21</sup>

Lebih lanjut distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan esensial yaitu *nilai kebebasan* (seperti yang dijelaskan di atas) dan *nilai keadilan*.<sup>22</sup> Maka selain adil terhadap faktor-faktor produksi, pemerintah juga harus menjamin orang-orang yang tidak mampu ikut memberikan kontribusi terhadap proses produksi karena cacat baik fisik maupun mental. Dengan kata lain pemerintah menjamin kebutuhan pokok

---

<sup>21</sup> M. Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, (Leicester, The Islamic Foundation, 1995), hal. 110 dan 140.

<sup>22</sup> Nik Mustapha Hj. Nik Hassan, *The Implementation Of Justice in Economic And Business, dalam Islam And Justice*, Ed. Hj. Ghazali, (Malaysia; Institute Of Islamic Understanding, 1993), hal. 55.

mereka meskipun dengan cara mengambil sebagian dari kekayaan orang-orang kaya jika diperlukan.<sup>23</sup>

Islam juga menghendaki agar kelebihan harta seseorang disalurkan kepada masyarakat untuk mencukupi orang-orang yang kekurangan sehingga kekayaan negara dapat terus beredar di kalangan masyarakat. Maka pemerintah memastikan peredaran harta secara berkesinambungan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya penimbunan/konsentrasi dalam masyarakat. Jika ternyata ada penimbunan, pemerintah berhak dan berkuasa untuk mengembalikan keseimbangan. Tindakan tersebut diperlukan karena Islam menolak ketidakadilan dan mengancam siapa pun yang melakukannya dengan saksi yang cukup berat.<sup>24</sup>

Selanjutnya untuk menerapkan keadilan dalam distribusi, seharusnya pemerintah harus memperhatikan : (1) bahwa tidak ada pemusatan kekayaan di tangan orang-orang tertentu dari anggota masyarakat, (2) masing-masing dari setiap faktor produksi mendapat bagiannya dengan adil dari proses produksi.<sup>25</sup> Dengan demikian Islam berusaha mengurangi kesenjangan masyarakat dan menghilangkan perbudakan tenaga kerja (*wage slavery*) dengan memberikan gaji sesuai dengan jenis pekerjaan dan kontribusinya terhadap proses produksi.

---

<sup>23</sup> Abul Khair Mohammad Jalaluddin, *The Role Of Government in Islamic Economic*, (Kuala Lumpur; Zafar. Sdn. Bhd., 1991), hal.59.

<sup>24</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) hal. 88.

<sup>25</sup> Abul Khair Mohammad Jalaluddin, *Op. Cit.*, hal. 60.

Terlepas dari persoalan di atas, sesungguhnya al-Qur'an menerima perbedaan-perbedaan dalam kapasitas, keterampilan dan peringkat di antara orang-orang dan karenanya menerima suatu derajat ketidakmerataan inheren tertentu. Akan tetapi, semua persetujuan ini dikualifikasi/disyaratkan dan dibatasi sedemikian rupa hingga nilai penting dari pemerataan dan keadilan sosial tidak terkikis. Sebagai contoh, perusahaan individual dikualifikasi oleh legitimasi tujuan, yaitu haruslah sebuah perusahaan yang jujur.

Walaupun kapasitas bahkan yang tidak merata karena perbedaan-perbedaan inheren diakui, ketidakmerataan dalam income dan kekayaan yang timbul dari perbedaan-perbedaan ini di jembatani dengan banyak perintah. Artinya surplus yang tersisa setelah memenuhi semua kebutuhan yang legitimate harus didistribusikan di antara mereka yang kekurangan. Menurut sebuah hadist Nabi saw mengakui demikian bahwa banyak jenis komoditas sehingga para sahabatnya menganggap bahwa, "orang tidak punya berhak atas kekayaan surplusnya", dan al-Qur'an juga mencela motif penikmatan properti pribadi untuk tujuan-tujuan yang individualistik semata.

Jika kita melihat peranan kepemilikan kekayaan/aset dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Kepuasan murni yang diperoleh dari penguasaan kekayaan pribadi akan menghasilkan manusia yang mementingkan diri sendiri. Dalam hubungan dengan ini, al-Qur'an mengingatkan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu....”<sup>26</sup>

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan yaitu: sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ini sangat bertentangan dengan konsep yang ada dalam ekonomi kapitalis. Prinsip ini menyebar ke seluruh sistem distribusi, al-Qur'an menjelaskan: “Apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu.”<sup>27</sup> Oleh sebab itu ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.<sup>28</sup>

Padahal menurut hemat penulis, jika kita mau jujur sesungguhnya ketidakmerataan income yang mencolok pada level nasional dan regional di negara-negara Muslim nampak *tidak Islami*, karena bertentangan dengan prinsip Islam yang memberikan penekanan sangat besar pada pemerataan dan keadilan sosial. Lebih lanjut keadilan distributif bukanlah sekedar sebuah

<sup>26</sup> QS; an-Nisaa' : 29.

<sup>27</sup> QS; al-Hasyr : 7.

<sup>28</sup> Metwally, terj. Husein Sawit, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT.Bangkit Daya Insana, 1995), hal. 4-5.

konsep teoritis yang sempit dalam Islam; ia mengimplikasikan pemerataan pada semua lingkup kehidupan.

Padahal dalam Islam terdapat fleksibilitas yang cukup dalam kerangka kerja kebijakan fundamentalnya untuk menangani problem ketidakmerataan dan ketidakadilan. Lebih lanjut kerangka kerja institusional dan kebijakan Islam untuk mencapai sasaran dasar tersebut (ketidakmerataan) adalah: a) pendidikan moral dan b) legislasi, perpajakan dan intervensi negara. Walaupun (a) menekankan tindakan-tindakan sukarela yang *moral-oriented*, perintah-perintah agama yang jika adanya kegagalan untuk mematuhi akan membuat seseorang menjadi tidak relegius. Implikasinya kewajiban-kewajiban relegius di bawah (a) sesungguhnya lebih mengikat daripada yang nampak pada pandangan pertama. Kewajiban-kewajiban legal di bawah (b) sudah jelas dengan sendirinya, tetapi peran negara dalam menjamin keadilan distributif sangat luas. Ukuran-ukuran yang menonjol dari kerangka kerja institusional dan operasional Islam dibawakan dengan sangat jelas oleh pernyataan berikut: “Untuk membangun keadilan ekonomi, Islam tidak bersandar pada hukum semata, tapi nilai penting yang besar dilekatkan pada tujuan mereformasi bathin manusia melalui iman, do’a, pendidikan dan pelatihan moral ini, dalam rangka

mengubah prefensi dan cara berfikir, dan menanamkan dalam dirinya suatu rasa moral yang kuat sehingga menjaganya agar selalu adil”.<sup>29</sup>

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, maka program redistribusi dalam Islam terdiri dari tiga bagian. *Pertama*, ajaran Islam mengimplikasikan pemberian bantuan untuk menemukan pekerjaan yang memberikan hasil bagi para pengangguran dan bayaran yang adil bagi mereka yang sudah bekerja. *Kedua*, menitikberatkan pembayaran zakat pada redistribusi pendapatan dari si kaya kepada miskin, karena ketidakmampuan atau cacat (fisik/mental) pribadi dan tidak mampu mendapatkan standar hidup yang bisa diandalkan dari usaha mereka sendiri. *Ketiga*, pembagian kekayaan hak milik orang yang meninggal dan warisan, yang sejalan dengan ukuran yang diberikan; bagi sejumlah individu dalam rangka megalakkan dan mempercepat distribusi kekayaan dalam masyarakat.<sup>30</sup> Hal ini disebabkan persamaan/keadilan merupakan prinsip yang dibangun dalam Islam. Pilar-pilar pemerataan dan keadilan sosial Islam adalah:<sup>31</sup>

- a. Supremasi keuntungan sosial atas manfaat/keuntungan pribadi.
- b. Pemenuhan kebutuhan hidup minimum dasar publik.

<sup>29</sup> Lebih jelasnya baca dalam Mohamad Arief, *Monetary and Fiscal Economics of Islam* dalam tulisan Mahfooz Ahmed, *Distributive Justice And Fiscal And Monetary Economics In Islam*, hal. 321.

<sup>30</sup> M. R. Chapra, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>31</sup> Mohamad Arief (Ed.), *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, yang ditulis oleh Mahfooz Ahmed, *Distributive Justice And Fiscal And Monetary Economics In Islam*, disampaikan pada Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh International Centre for

c. Pencelaan konsentrasi kekayaan dan eksploitasi; dan

d. Penekanan pada upaya kerja dan pelarangan bunga.

Maka implementasi dari sebuah bentuk distribusi yang adil seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidiin mengikuti praktek Nabi Saw menganggap distribusi sebagai ganjaran/upah yang merata. Ini merupakan indikasi yang jelas di mana Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan serta tidak menyukai penumpukan kekayaan pada sekelompok orang. Umar ibn Khattab seperti dikutip mengatakan bahwa jika dia hidup untuk beberapa tahun dia akan mendistribusikan dana yang dimilikinya agar antara orang miskin *sama* seperti orang kaya.<sup>32</sup>

Permasalahan itu dikarenakan Islam bersandar pada keadilan *horizontal* dan *vertikal*. Lebih jauh lagi keadilan dan kebaikan merupakan dua prinsip utama distribusi dalam Islam. Untuk mewujudkannya, sebagai bagian dari faktor produksi, pemerintah harus membuat kepastian bahwa porsi pendapatan

---

Research in Islamic Economics King Abdul Aziz Jeddah di Saudi Arabia, tanggal 7-12 Oktober 1978, hal. 318.

<sup>32</sup> Ziauddin Ahmad, Munawar Iqbal, M. Fahim Khan, *Fiscal Policy and Resource Allocation In Islam*, (Jeddah; International Centre for Research In Islamic Economics, Insitute of Policy Studies, 1983), hal. 103. "Umar" sebagai Khalifah kedua menjelaskan keadilan redistributif dalam Islam, yang menekankan dalam salah satu risalah kemasyarakatannya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal kekayaan masyarakat, sehingga tidak seorangpun termasuk dirinya sekalipun bisa menikmati hak yang lebih besar daripada orang lain. Selanjutnya Khalifah Ali dijelaskan sangat menitikberatkan bahwa "Tuhan mewajibkan kepada orang kaya untuk memberikan si miskin sesuatu yang layak bagi mereka; bila si miskin telanjang dan kelaparan atau dalam kesulitan. Sementara para hakim memiliki pendapat yang teguh, bahwa sudah menjadi tugas masyarakat muslim umumnya dan si kaya khususnya untuk memperhatikan kebutuhan dasar si miskin dan jika mereka tidak memenuhi tanggungjawab tersebut, negara bisa dan harus memaksa. Liha dalam M.Umer Chapra, *The Economic System of Islam a Discussion of its Goals and Natures*, (t.t.t, The Islamic Quarterly Vol. XIV, no. 1.2.3., 1970), hal. 16.

umum harus di berikan bagi siapa yang tidak bisa menyumbangkan bagi proses produksi yang wajar, disebabkan rintangan yang bersifat fisik dan mental. Dengan kata lain, pemerintah harus memuaskan kebutuhan dasar mereka dengan mendukung keuangan oleh orang-orang kaya jika diperlukan. Pada bagian lain, pemerintah Islam harus mengawasi dua hal dalam proses produksi yaitu.<sup>33</sup>

- 1). Tidak ada penumpukan kekayaan pada sekelompok anggota masyarakat, dan
- 2). Masing-masing dan setiap faktor produksi mendapatkan pembagian yang adil dari proses produksi.

Contohnya, Umar dalam masalah ini mengikuti Nabi untuk memberikan setengah bagian bagi yang sudah menikah. Sebab beliau beranggapan bahwa keadilan dan persamaan tidak dibatasi bagi orang-orang Muslim saja, namun bagi orang non-Muslim juga. Tindakan ini (mendistribusikan kekayaan) banyak dilakukan pada masa lalu dalam sejarah Islam. Keputusan yang sangat penting dilakukan oleh Khalifah Umar adalah tidak mendistribusikan harta al-Fa'i kepada para sahabat. Ini dilakukan untuk mencegah terakumulasinya kekayaan pada sedikit orang, tindakan ini oleh para sarjana diilustrasikan sebagai kebijaksanaan yang sangat besar bagi orang-orang

---

<sup>33</sup> Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*, (Malaysia; Fak. Ekonomi, International Islamic University, 1991), hal. 59-60.

Islam (baca: hasil taklukan tersebut menjadi milik orang-orang Islam secara keseluruhan).<sup>34</sup>

Dalam Syari'at al-Qur'an dan hadist, ada banyak perintah untuk mengecek konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Hal itu terimplementasikan dengan adanya pengecekan tentang perusahaan dan properti individual seperti disebutkan bahwa pengutukan terhadap penimbunan (QS; at-Taubat: 34-35), dorongan terhadap amal, dan zakat yang merupakan langkah-langkah dalam menjaga konsentrasi kekayaan tetap dalam kontrol.<sup>35</sup> Zakat yang bersifat progresif insidensinya dan fleksibel sejauh menyangkut pemasukan/penyertaan berbagai bentuk kekayaan. Penggunaan zakat secara spesifik dan pajak-pajak negara lainnya lebih bersifat redistributif lagi dampaknya. Menurut sebuah Hadist, Umar dilaporkan pernah mengatakan, "Seandainya aku tahu sebelumnya apa yang akhirnya ku ketahui kemudian, aku pastilah akan mengambil kekayaan surplus dari yang kaya dan mendistribusikannya di antara para imigran miskin". Ini diperkuat oleh diskursus al-Qur'an yang mengatakan bahwa: "Merupakan suatu pahala besarlah memberikan kekayaan surplus kepada kaum fakir, yatim piatu dan orang melarat, pada saat yang bersamaan perlakuan buruk terhadap kaum miskin dan kecintaan yang berlimpahan terhadap kekayaan di cela (QS; al-Ankabut: 15-21).

<sup>34</sup> Ziauddin Ahmad, Munaawar Iqbal, M. Fahim Khan, *Op. Cit.*, hal. 104.

<sup>35</sup> Mahfooz Ahmed, *Op. Cit.*, hal. 320.

Persoalan lebih lanjut adalah adanya kesenjangan/gap antara persepsi sosial tentang distribusi pendapatan yang “ideal” dan “aktual” dalam sistem ekonomi mungkin akan bergantung pada beberapa hal: (1) kedudukan harta/kekayaan dalam sistem nilai, (2) cara hubungan antara faktor yang dibangun dalam bidang produksi, dan (3) lembaga-lembaga yang dipromosikan untuk tujuan redistribusi. Ketiga faktor ini saling berhubungan dan saling memperkuat dalam sebuah hubungan melingkar. Selanjutnya kita akan menguji posisi Islam secara singkat dalam masalah-masalah ini, sehingga dapat ditunjukkan bahwa struktur ekonomi Islam hampir secara otomatis meminimalkan kesenjangan antara yang “ideal” dan “aktual”.<sup>36</sup>

#### a. Sikap terhadap Harta

Konsep amanah<sup>37</sup> memberikan orientasi baru secara menyeluruh bagi sikap seseorang dalam mencari harta. Sekali orang setuju dengan ide bahwa secara moral ia memang memiliki sedikit saja hak atas kelebihan dari keperluannya, “menerima bahwa cara-cara untuk mencapainya seharusnya murni dan jujur, dan bahwa jika ada konflik

<sup>36</sup> Munawar Iqbal, (Ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Islamabad & Leicester, International Institute of Islamic Economics and The Islamic Foundation, Cet. I, 1986), hal. 45.

<sup>37</sup> **Amanah** merupakan konsep fundamental dalam Islam, dimana nafsu material manusia disalurkan ke dalam usaha untuk mencapai ketinggian spritual. Sebab al-Qur'an menyatakan, “Carilah negeri Akhirat dengan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, dan janganlah melupakan bagianmu di dunia ini”. (QS; 28: 77). Selanjutnya amanah mendasari seluruh filosofi sosio-ekonomi Islam, yang meliputi aspek individu sampai negara. Amanah merupakan kewajiban moral dan bukti ketinggian kualitas manusia, bahkan sebagai unsur penting yang meliputi hubungan manusia dengan sang Penciptanya. Maka membumikan konsep amanah sebagai salah satu alternatif dalam mencapai keadilan distribusi pendapatan sangatlah

antara kekayaan dan kebajikan, ia harus menerima hasil yang dapat ia peroleh secara benar meskipun mungkin sedikit".<sup>38</sup>

Maka konsep-konsep Barat yang *atomistik* dan *rasionalistik* pada pokoknya didasarkan pada pandangan manusia yang dikotomis, yang menempatkannya pada posisi berhadapan dengan masyarakat. Sebaliknya Islam menekankan kemampuan mengembangkan diri sendiri di mana semua kegiatannya, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik dilebur bersama untuk mencapai keseimbangan antara keperluan personal dan kewajiban tambahan.

Oleh karena itu, kepentingan diri sendiri tidak dapat menjadi satu-satunya motivasi/upaya, dan kekayaan tidak dapat menjadi tujuan utama. Godaan untuk menumpuk kekayaan secara curang, yang mendorong ketimpangan pendapatan dewasa ini menyebabkan kita menghargai unsur penyembuhan yang ditawarkan Islam. Hal itu disebabkan karena hak kepemilikan dalam Islam membawa kewajiban-kewajiban tertentu, jika kewajiban ini tidak diberlakukan, negara bisa mengintervensi dalam rangka menciptakan keadilan sosial.<sup>39</sup>

---

diperlukan. Lebih jelasnya baca dalam Munawar Iqbal *dalam Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* pada hal. 41-42.

<sup>38</sup> QS; al-Maidah : 103.

<sup>39</sup> Ziauddin Ahmad, *Islam, Poverty and Income Distribution*, (Leicester, The Islamic Foundation, 1991), hal. 96.

## b. Hubungan Antarfaktor

Pengaruh amanah terhadap hubungan antarfaktor – termasuk penentuan adilnya dalam hasil produktivitas gabungannya – merupakan konsekuensi yang besar bagi keadilan distribusi. Hal ini bisa mempunyai efek yang menonjol pada pendapatan personal, karena dalam perekonomian secara keseluruhan, tugas penciptaan pendapatan dan tugas distribusi pendapatan secara simultan disempurnakan.

Amanah juga menuntun kepada *al-'adl*, yaitu keadilan sosial, di mana aturan permainan yang jujur dalam ekonomi merupakan bagian yang integral. Jadi prinsip penentuan keuntungan/imbalan bagi masing-masing faktor ekonomi adalah “Berikan kepada masing-masing sesuai dengan haknya”, yaitu sesuai dengan sumbangannya kepada total output. Karena itu, penting sekali agar hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi direncanakan sedemikian rupa, sehingga sulit terkena unsur *gharar*, eksploitasi.<sup>40</sup> Karena hasil dari bisnis modern dipengaruhi oleh tingginya tingkat ketidakpastian. Oleh karena itu kekuatan pasar tidak mampu mencapai keadilan pembagian produk penghasilan di antara faktor-faktor ekonomi yang berperan. Bahkan sekalipun “secara ajaib” pasar dapat menyodorkan tingkat harga faktor ekonomi dalam kaitannya dengan produk-produk marjinalnya, tetapi harga ini tidak

---

<sup>40</sup> Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, *Op. Cit.*, hal. 46.

dapat persis dengan kriteria kontribusi. Karena produk penghasilan marginal dari sebuah faktor bukan merupakan sebuah fungsi dari apa yang dikontribusikannya kepada seluruh output, tetapi dari sedikitnya hubungan dengan faktor lain.

Dalam keadaan ini, harga-harga faktor yang ditetapkan sebelumnya, agaknya tidak disukai Islam sebagai determinan akhir dari andil faktor. Alasan *pertama*, Islam secara eksplisit melarang pinjaman dengan bunga dalam segala bentuknya. *Kedua*, hasil dari upaya produktif tidak dapat dipastikan, dengan demikian, bunga adalah unsur *gharar*.<sup>41</sup> Dalam hal persewaan tanah pertanian, pandangan yang dominan nampaknya adalah bahwa Islam *lebih menyukai* cara bagi hasil melalui kerjasama antara pemilik tanah dan menyewa. Sewa dari sejumlah uang yang ditaruhkan di muka akan beresiko mengandung *gharar*. Di atas dasar yang sama dengan *mudharabah*, pola pembagian keuntungan banyak dipopulerkan oleh Islam.

Kesimpulan yang jelas adalah bahwa pemikiran utama mengenai distribusi pendapatan dalam Islam memang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini menurut Ibn Hazm dan pemikir lain, bisa termasuk keperluan pangan, sandang untuk musim panas dan dingin serta akomodasi yang layak.

---

<sup>41</sup> Hal ini dikarenakan struktur pasar Islam tanpa *bunga* dan dengan *keadilan distributif* sebagai sasaran fundamentalnya cukup berbeda dari struktur di bawah produksi kapitalistik. Artinya dalam kerangka-kerja pasar Islam, maksimasi laba bukanlah sebuah motif penting dari perusahaan swasta, sebab persaingan lebih di dukung atas monopoli, tetapi haruslah jujur dan tanpa eksploitasi. Dalam bentuk ini, sistem pasar melayani sasaran keadilan sosial dan ekonomi dengan efisiensi dalam alokasinya. Baca dalam Mohamad Arief, *Monetary and Fiscal*

Dapat ditambahkan bahwa segala konsep tentang kebutuhan-kebutuhan minimum harus fleksibel. Jangkauan dan standarnya di dalam masyarakat tertentu harus diartikan dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat capaian perkembangan ekonomi. Pada prinsipnya, konsep tingkat pendapatan adalah dasar bagi ajaran Islam, meski posisi mengenai plafon (batas atas) pendapatan memang sangat tidak jelas. Dengan demikian dalam Islam, kelebihan harta di atas kebutuhan-kebutuhan yang sah dianggap sebagai *amanah* dan sebagai *ujian* bagi pemegangnya (QS. 64:15). Konsep *amanah* inilah yang membedakan Islam dari kapitalisme<sup>42</sup> tentang gagasan pemilikan pribadi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu pembumian konsep *amanah* sebagai unsur yang sangat penting dalam distribusi pendapatan adalah mutlak dilakukan, jika distribusi tersebut ingin dikatakan adil.

Pada akhirnya, penulis beranggapan bahwa walaupun keadilan distributif semakin kuat, artinya jika seorang muslim mendapatkan sarana yang

---

*Economics of Islam* dalam tulisan Mahfooz Ahmed, *Distributive Justice And Fiscal And Monetary Economics In Islam*, hal. 320.

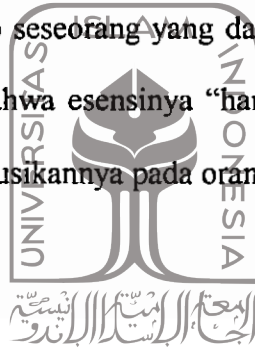
<sup>42</sup> Analisis yang penulis lakukan ini menggunakan perspektif Islam, sebab mengacu pada *norma* dan *etika* yang dimiliki oleh Islam. Lebih jauh lagi jika mengacu pada uraian pada bab III diatas, model/prinsip distribusi dalam ekonomi kapitalis sangatlah tidak adil, sebab dalam sistem ekonomi tersebut mengacu pada *supply* dan *demand* serta *persaingan bebas* sehingga tidak perlu melakukan pembagian pendapatan, lebih jauh lagi dalam ekonomi tersebut banyak mengandung unsur eksploitasi terhadap manusia, terutama dalam mendapatkan kekayaan, contohnya dengan mengeksploitasi buruh melalui rendahnya tingkat upah, sebaliknya dalam Islam sebelum adanya kontrak harus melakukan transaksi yaitu '*an-taradhin* (suka sama suka/saling merelakan), tentunya kompensasi tersebut dibayar pada saat keringatnya belum kering. Oleh karena itu, ajaran Islam menjelaskan bahwa tenaga kerja seharusnya dipastikan tingkat upahnya, dalam rangka melindungi martabat manusia, maka negara diharapkan mengintervensi kapanpun kepemilikan faktor produksi, untuk melihat pesta eksploitasi terhadap pekerja dalam proses produksi sehingga dengan adanya intervensi pemerintah diharapkan akan tercipta keadilan distribusi secara merata.

sesuai dengan haknya dan dari pendapatannya sendiri; sementara kekayaannya juga memenuhi kewajiban terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membayar zakat dan kontribusi lainnya yang diwajibkan, tidak ada salahnya memiliki kekayaan lebih daripada kaum muslim yang lain. Sebab dalam kenyataannya, ajaran Islam mengajarkan tentang halal dan haram dalam hal perolehan kekayaan, norma keadilan bagi karyawan dan konsumen tetap diaplikasikan, ketentuan redistribusi pendapatan dan kekayaan diimplementasikan dan hukum waris dalam Islam ditegakkan, maka konsekwensinya tidak akan ada lagi ketidaksamaan/ketidakadilan pendapatan dan kekayaan yang mencolok dalam masyarakat muslim.

Asumsi ini disebabkan konsep persamaan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsep keadilan ekonomi tidak menuntut agar setiap orang diberi penghargaan (*reward*) secara sama, tanpa mempertimbangkan kontribusinya terhadap masyarakat. Islam mentolerir beberapa ketidaksetaraan pendapatan (seperti di jelaskan di atas) karena semua manusia tidak sama dalam hal karakter, kapabilitas dan pelayanannya terhadap masyarakat. Karena itu keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah menjamin standar hidup yang manusiawi bagi semua anggota melalui institusi zakat dan sumbangan wajib/tidak wajib lainnya, memungkinkan turunan perolehan yang sesuai dengan perbedaan nilai kontribusi atau jasa yang diberikan, maka tiap individu akan menerima pendapatan yang berkaitan

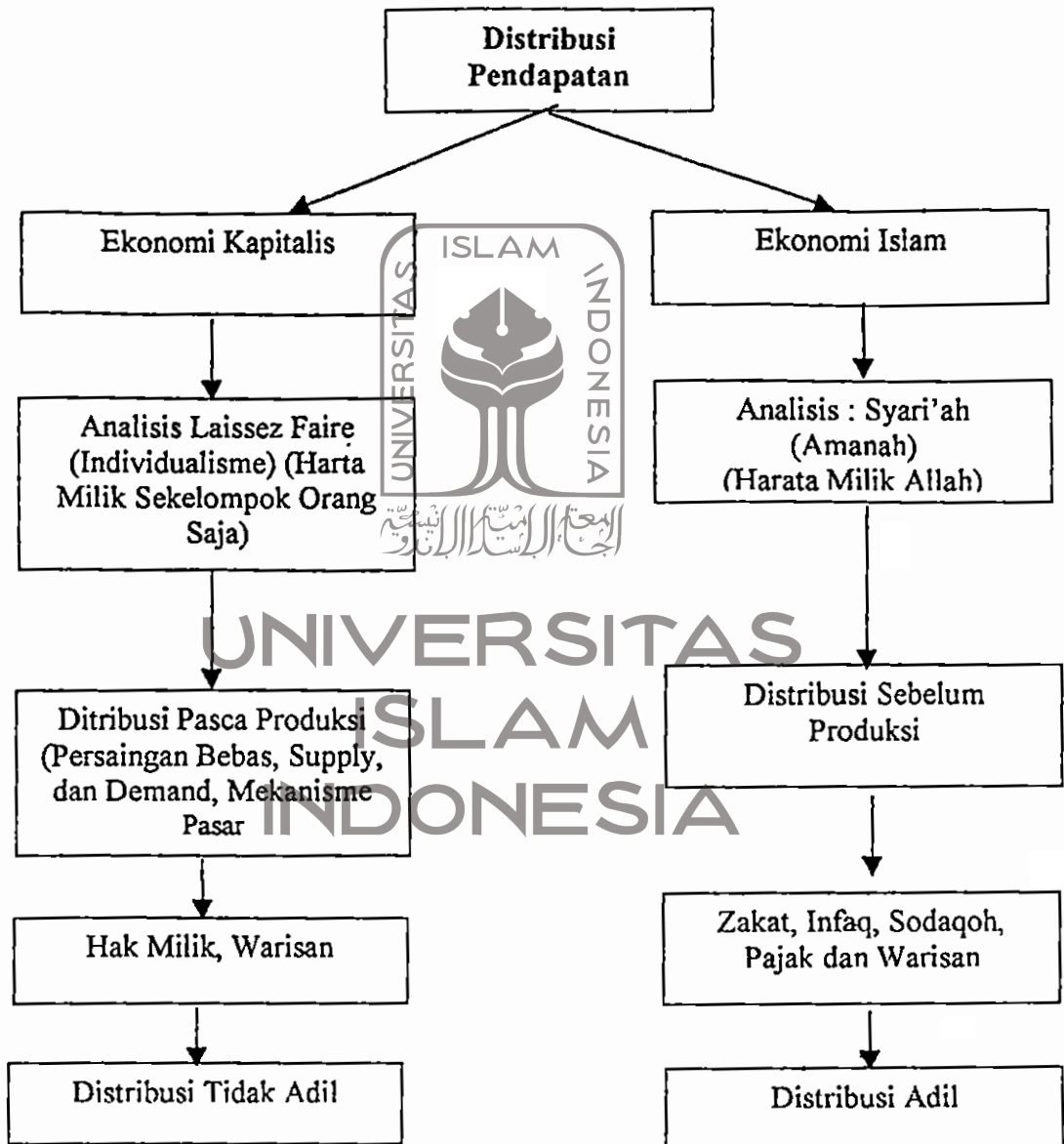
dengan nilai sosial, sebanding dengan layanan yang ia berikan kepada masyarakat.

Maka berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis menemukan “paradigma baru” yang ditawarkan Islam dan tentunya akan lebih relevan dalam menjawab persoalan distribusi pendapatan ini agar penerapannya benar-benar adil serta menguntungkan semua lapisan masyarakat yaitu *paradigma amanah*, sebab seseorang yang dalam dirinya merasa bertanggung jawab dan beranggapan bahwa esensinya “harta” milik Allah niscaya mereka akan senantiasa mendistribusikannya pada orang-orang yang memerlukannya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Diskripsi tersebut dapat dilihat pada *skema* di bawah ini:



Dari skema di atas, dijelaskan bahwa sistem ekonomi kapitalis menganggap harta sebagai milik individu sehingga pendistribusiannya pun dianggap sebagai masalah yang “tidak penting” (dengan mendahulukan produksi) implikasinya dalam ekonomi kapitalis *gagal* dalam pemerataan, walaupun *makmur* dalam pertumbuhan. Lebih lanjut dalam sistem ekonomi kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi, yaitu setelah mereka menghasilkan barang untuk suatu proyek. Pandangan mereka terfokus kepada uang atau harga. Kaitannya dengan distribusi hasil produksi yaitu:<sup>43</sup>

1. Upah atau gaji untuk para pekerja, sebab yang biasa terjadi adalah para produsen memeras tenaga para buruh tanpa memberi upah yang seimbang.
2. Keuntungan (bunga) sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek.
3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu.
4. Laba bagi para manager yang mengelola, dan mengurus pelaksanaan proyek dan juga sekaligus sebagai penanggungjawabnya.

Dari sini kita dapat menemukan bahwa distribusi pendapatan dalam ekonomi Kapitalisme bersifat *tidak adil*, hal ini menurut penulis bisa disebabkan karena pada dasarnya asumsi dan sistemnya memang berbeda dalam mengartikan dan mengimplementasikan makna “harta” sebagai amanat Allah.

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam. *Op. Cit.*, hal. 201.

Sementara dalam ekonomi Islam, jelas sekali menerapkan *filsafat* dan *tatanan* yang **berbeda** dari kedua sistem tersebut (Kapitalisme dan Sosialisme), sebab Islam memfokuskan perhatiannya pada distribusi sebelum membahas sektor produksi, namun bukan berarti menafikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Islam juga mengatur tentang pemberian gaji kepada pegawai dan buruh jika mereka melaksanakan tugasnya dengan sempurna, seperti juga ajaran Islam yang melarang pemakaian harta yang berasal dari riba. Dan dalam hal pengembangan kepemilikan dan desentralisasi pembuatan keputusan tampak lebih sesuai dengan martabat, kebebasan dan inisiatif yang dikaitkan dengan konsep *kekhalifahan*, selanjutnya pengembangan ini harus diwujudkan baik di desa ataupun kota, dalam pertanian, industri dan perdagangan.

Jadi pada dasarnya harta merupakan titipan Tuhan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, namun sesungguhnya dalam mengelola dan memanfaatkannya harus mengacu pada aturan-aturan yang telah diimplementasikan oleh Allah dalam wahyu/kitab-Nya. Di samping itu, karena semua sumber daya, menurut al-Qur'an merupakan berkah Tuhan terhadap semua umat manusia, tidak ada alasan bagi sumber daya tersebut untuk tetap terkonsentrasi pada segelintir orang saja.

Misalnya dengan zakat, yang jika dilihat kasus di Indonesia persoalan ini sangat diperhatikan. Hal itu terbukti dengan adanya Undang-Undang zakat, yang menurut hemat penulis merupakan indikasi yang jelas bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia yang notabenehnya Muslim ingin menerapkan

model/sistem Islam (dalam hal ini zakat) sehingga setiap orang yang memiliki kekayaan/harta yang dimiliki oleh orang yang mampu dan pada akhirnya akan menciptakan keadilan yang kondusif bagi kemakmuran bangsa secara keseluruhan.

Sebab zakat sebagai salah satu kewajiban kaum Muslimin mengandung *sisi vertikal* yang masuk katagori ibadah maliyah, di samping itu juga zakat memiliki nuansa muamalah atau *sisi horizontal* yang tercermin dari terjadinya suatu proses untuk membantu kehidupan sesama umat dalam komunitasnya dengan menafkahkan sebagian harta bendanya untuk dialokasikan kepada yang berhak. Secara ekonomi, zakat mengandung aspek distributif, alokatif dan juga aspek stabilisasi seperti halnya kebijakan fiskal di Indonesia yang tercermin dalam APBN yang merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi.<sup>44</sup>

Potensi ini dapat kita lihat pada kemampuan membayar pajak masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat. Misalnya pada RAPBN 1998/1999 pos penerimaan pajak penghasilan mencapai Rp 80,415 triliun. Jika diasumsikan dari jumlah tersebut, kontribusi umat Islam sebesar 30%, maka nilai pajak yang dibayar umat Islam sebesar Rp 24,12 triliun. Dengan menganggap tax rate rata-rata 15%, maka seandainya zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari kekayaannya, jika kita menyadarinya bahwa potensi zakat

---

<sup>44</sup> Edi Suandi Hamid, "Zakat, Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Ekonomi", *Harian Kedaulatan Rakyat*, (23 Desember 1999) hal. 2.

dari umat yang membayar pajak penghasilan tersebut dalam tahun anggaran 1998/1999 adalah Rp 4 triliun lebih.<sup>45</sup>

Potensi Rp 4 triliun tersebut baru dari pajak penghasilan, padahal yang termasuk golongan dalam wajib pajak lebih luas dari sekedar mereka yang membayar pajak penghasilan tersebut. Jadi dapat dibayangkan bahwa potensi zakat umat Islam ini jika dilaksanakan secara baik dan benar serta dikelola dengan tepat akan membawa dampak ekonomi yang sangat berarti, khususnya dalam menggairahkan perekonomian dan membantu kehidupan umat yang tertinggal. Demikian juga penerapan wakaf, infaq, sadaqah dan warisan yang secara tidak langsung berimplikasi terhadap “kemakmuran” masyarakat sehingga distribusi pendapatan dari orang yang telah meninggal dunia akan terus diperjuangkan dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan.

Lebih jauh lagi dalam ekonomi Islam, karena mengacu pada harta adalah milik Allah,<sup>46</sup> maka secara tidak langsung setiap orang berhak memilikinya (Islam mengakui kepemilikan individu (dalam batas-batas tertentu, termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi) juga kolektif) yang tentunya harus didistribusikan pada orang-orang yang berhak, baik melalui zakat, infaq, sadaqah (sumbangan yang wajib dan tidak wajib lainnya).

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>46</sup> Semua ini tercermin dalam firman Allah: “Semua benda adalah milik Yang Maha Kuasa” (QS; 31: 26, 42:2), yang diciptakanNya dengan tujuan keadilan (QS; 28: 76,84). Ia menyerahkan bumi dan seluruh isinya kepada manusia, makhluk yang dianugrahi kemampuan mengelolanya. Manusia bersedia menerima penyerahan ini sebagai amanahNya (QS; 33:72). Ini berarti Tuhan menyepakati tentang adanya “kemauan bebas” bagi manusia yang menurut Maulana Jalal-al Din Rumi merupakan esensi dan arti gagasan amanah.

Sebab dalam ekonomi Islam pendistribusian sangat penting namun tanpa menafikan faktor produksi, sehingga implikasinya kekayaan bisa terdistribusi secara merata/adil. Karena keadilan distribusi adalah salah satu unsur yang sangat penting dari visi Islam tentang keadilan sosial ekonomi.

Dengan demikian, Islam menekankan keadilan distributif dan memasukkannya sebagai suatu program dan sebuah sistem, bahwa perlu adanya distribusi pendapatan dan kekayaan ulang, sehingga setiap individu mendapatkan jaminan standar hidup manusiawi dan wajar serta selaras dengan dijunjungnya martabat manusia yang melekat dalam ajaran Islam (baca: Khalifah Tuhan di bumi).<sup>47</sup>

Maka menurut penulis, pembumih/ kontekstualisasi konsep Syari'ah (dalam hal ini *Amanah*) sebagai alternatif terbaik yang ditawarkan oleh model ekonomi Islam sangat signifikan dalam rangka menegakkan keadilan distributif bagi masyarakat yang pada gilirannya setiap masyarakat dapat menikmati "harta" Allah secara proporsional.

---

<sup>47</sup> M.Umer Chapra, *The Economic System of Islam a Discussion of its Goals and Natures*, ( The Islamic Quarterly Vol. XIV, No. 1.2.3., 1970), hal. 15.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Munculnya sistem ekonomi (Kapitalisme dan Sosialisme) ditengah masyarakat masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, namun kehadiran ekonomi Islam yang mempunyai nuansa tersendiri pada gilirannya diharapkan mampu menghapus ketidakadilan dan eksploitasi terhadap masyarakat.
2. Unsur terpenting dalam ekonomi adalah distribusi pendapatan, dalam pandangan ekonomi Kapitalisme cenderung tidak merata, sebab pertumbuhan dianggap sebagai *tujuan*, artinya yang terpenting adalah kemakmuran individual bukan kemakmuran masyarakat, karena konsep *laissez faire* akan selalu berperan dalam segala aspek model/kebijakan ekonomi Kapitalisme, dan dalam ekonomi Islam dianggap sebagai *akibat*, ini dikarenakan asumsi dasar dalam ekonomi Islam adalah “harta milik Allah” yang harus ditransformasikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
3. Implikasi signifikan distribusi pendapatan yang diterapkan dalam ekonomi Kapitalisme ternyata banyak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, karena kepemilikan pribadi menjadi sebab

utamanya. Sebaliknya dalam ekonomi Islam, dengan adanya penerapan konsep amanah dalam diri setiap orang yang berarti adanya kesadaran bahwa pada dasarnya harta adalah milik Allah.

## B. SARAN

Dari uraian di atas, penulis menemukan berbagai hal yang perlu disempurnakan yang tercermin dalam saran-saran di bawah ini:

1. Sudah saatnya para ilmuwan dan ekonom Muslim menyadari bahwa hadirnya ilmu ekonomi Islam sangat dibutuhkan di tengah-tengah ketidakadilan ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme, sehingga masyarakat menjadi “mengerti” dan “tidak apriori” dengan keberadaan Bank Syariah, BMT, Asuransi Takaful dan sebagainya. Lebih lanjut umat Islam perlu mensosialisasikan eksistensi ekonomi Islam sebagai sistem terbaik
2. Berangkat dari realitas yang ada, keberadaan ekonomi Islam sebagai sistem terbaik harus bisa dibuktikan secara *positif/empirik* (sesuai dengan model, kebijakan yang ada dalam ekonomi konvensional), sehingga eksistensinya diakui dan lebih jauh lagi *universalitas* Islam sebagai agama dunia bisa dibuktikan dengan menerapkan kebijakan yang ada dalam ekonomi Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan pengkajian terhadap ekonomi Islam khususnya, sehingga implementasinya dapat dilakukan secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Akhmad, Syaikh Mahmud, *Economic of Islam (Comparative Study)*, Edisi I, Lahore-Pakistan: Ashraf Press, 1947
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- \_\_\_\_\_, *Nidzom Al-Islam*, Beirut-Libanon: Dar 'al-Ummah, 1953
- Abdul Muhsin Sulaiman, Thahir, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, terj. Anshari Umar Sitanggal, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985
- Ahmad Muhammad, Al-'Assal dan Abdul Karim, Ahmad, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Imam Saefuddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Anshari Umar Sitanggal, Hj. Abu Ahmadi, *Sistem, Ekonomi Islâm; Prinsip-prinsip Dan Tujuan-tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980
- Adnan, Muhammad Akhyar, *"Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Islam"*, Surakarta: MSI-UII, LP-UII bekerjasama dengan STAIN Surakarta, 1998
- \_\_\_\_\_, "Sistem Ekonomi Islam Memiliki Beberapa Ciri", *Kabar Kampus*, 29 Desember 1999
- Akhmad, Amrullah, *Islamisasi Ekonomi; Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Yogyakarta: PLP2M, 1985
- Arief, Mohammad, *"Toward a Definition of Islamic"*, t.t, Journal of Research in Islamic Economics, 1985

- \_\_\_\_\_ (Ed.), *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic King Abdul Aziz Jeddah, 1978
- Akhmad, Khurshid, *Studies In Islamic Economics*, Jeddah dan Inggris: International Centre for Research in Islamic Economics dan The Islamic Foundation, 1976
- Arsyad, Lincohn, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1997
- Akhmad, Ziauddin, Iqbal, Munawar, Khan, M. Fahin, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, Institute of Policy Studies, 1983
- Akhmad, Ziauddin, *Islam, Poverty and Income Distribution*, Leicester: The Islamic Foundation, 1991
- Andre, Zimbalist, J. Sherm Howard, Brow, Stuart, *Comparing Economic System A Political Economic Approach*, 2 Edisi, Sandiago: Harcourt Brace Javanovandi, 1989
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, Jakarta: Erlangga Press, 1987
- Basuki, Hendro, "Ekonomi Amerika dalam Pembinaan", *Suara Merdeka*, No. XLI/14/VI/24 Februari 1993
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Cet. III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Bellante, Don and Jackson, Marx (Ed.), *Ekonomi Ketenagakerjaan; Pasar Tenaga Kerja dan Distribusi Pendapatan*, Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1983
- Boulding, E. Kenneth, *Economic Analysis*, Edisi Ketiga, New York: Harpen and Brothers, 1955

- Bladgett, H. Ralph, *Comparative Economic System*, New York: The Macmillan Company, 1949
- Baqir al-Shadr, Muhammad, *Iqtisaduna*, Beirut-Libanon: Dar'al-Fikr, 1968
- Boediono, *Pertumbuhan Ekonomi*, Bagian 2, Yogyakarta: BPFE, 1985
- Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode*, Yogyakarta: FK-FKIP, 1987
- Chapra, M. Umer, *The Economic System of Islam a Discussion of its Goals and Natures*, t.t.t, The Islamic Quartley Vol. I. XIV, No. 1.2.3., 1970
- \_\_\_\_\_, *Toward a Just Monetary System*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Clinton, Hillary, *It Takes a Village*, Cet. I, alih bahasa Widodo, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996
- C. Bogdan, Robert and Knopp Biklen, Sari, *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory until Methods*, Boston: Alhan and Bacon, 1982
- Colman, David and Nixson, Fred, *Economic of Change in Less Developed Countries*, New York: 1994
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga Press, 1996
- Devos, Rich, *Compassionate Capitalisme, (Kapitalisme Dengan Kepedulian Sosial)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Ellis Hoyt, Elizabeth, *The Income of Society; An Introduction To Economics*, New York: The Ronald Company Press, 1950
- Gilarso. T., *Pengantar Ilmu Ekonomi; Bagian Makro*, Yogyakarta: Kanisius. 1992

- Hamid, Edi Suandi, *Kurikulum dan Silabi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LP3EI-UII, 1998
- \_\_\_\_\_, "Zakat; Instrumen Fiscal di Tengah Krisis Ekonomi", *Harian Kedaulatan Rakyat*, 23 Desember 1999
- Hasanuzzaman, S. M., "Definition of Islamic Economics, t.t.t., Journal of Reseach in Islamic Economics, 1985
- Haidar Naqvi, Syed Nawab, *Ekonomi dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1985
- Harvei Dod, James, Hasek, C.W., *Economic Principles and Application*, New York: Publishing Company, 1948
- Heirlboner, L. Robert, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1982
- Ishak, Efendi, "Demokrasi Untuk Rakyat" *BERNAS*, 12 Juli 1997
- Iqbal, Munawar (Ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, Cet. I, Islamabad and Leicester: International Institute of Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1986
- Koesoema, Warih Bambang dan Nugroho, Yanuar, *Paradigma Pemilu 1999; Titik Tolak Penyelesaian Krisis Ekonomi dan Politik Indonesia*, Yogyakarta: MM bekerjasama dengan ISEI, 1994
- Latief, Dochak, "Perspektif Ekonomi Islam", *Kumpulan Makalah*, Yogyakarta: FE UII, bekerjasama dengan SBI dan ICMI, 1994
- Misanam, Munrokhim, *Diskusi Panel: Paradigma Ekonomi Islam; Upaya Menyiapkan Konsep Ekonomi Islam Alternatif Merespon Era Globalisasi*, Yogyakarta: MM bekerjasama dengan P3EI, 1998

- Muchsin, Djauhari, *Studi Perbandingan tentang Sistem Ekonomi; Sebuah Rangkuman*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII, 1985
- Mohamed Haneef, Moh. Aslam, *The Islamic World View, And Islamic Economics*, Malaysia: International Islamic University ; Malaysia Press, 1997
- Minhaji, Akh., *Haruskah Islam Belajar Kepada Kristen*, Yogyakarta: Fak. Ekonomi UII, 1999
- Meidawati, Neni, *Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan*, Vol. 2, No. 2, Yogyakarta: FE UII, 1998
- Metwally, terj. Husein Sawit, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995
- Musthapa, Nik, Hj. Nik Hassan (Ed.) Hj. Ghazali, *Implementation Justice In Economic and Business*, Malaysia: Institute of Islamic Understanding, 1993
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Natangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, ..
- Mohamad Jalaluddin, Abul Khair, *The Role of Government in Islamic Economics*, Kuala Lumpur: Zafar, Sdn. Bhd, 1991
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik; Upaya Membingkai Peradaban*, Cirebon: Pustaka DINAMIKA, 1992
- Nomani, Farhad and Rehnema, Ali, *Islamic Economics System*, Malaysia: Business Information Press, 1995
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. Keempat, Jakarta: Mizan, 1996
- Rusli Karim, Muhammad (Ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana bekerjasama dengan P3EI UII, 1992

- Republika, "*Perlunya Sistem Ekonomi Islam*", 24 Desember 1999
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- \_\_\_\_\_, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- \_\_\_\_\_, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Biru, 1995
- Rahardjo, M., Dawam (Ed.), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, Jakarta: LP3ES, 1987
- \_\_\_\_\_, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987
- Rosser J. Barkley, Rosser, Marina, Jr., *Comparative Economics in A Transforming World Economy*, New York: Times Mirror Higher Education Group, 1996
- Soul, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*, Yogyakarta: Kanisius, 1984
- Samuelson, A. Paul, Nordbans, D. William, *Mikro Ekonomi*, Edisi Keempat Belas, Jakarta: Erlangga Press, 1993
- Sawit, M. Husein, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Perluakah Berbeda*, Yogyakarta: UII Press, 1997
- Sjahrir, *Persoalan Ekonomi Indonesia, Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran*, Cet. V, Jakarta: Sinar Harapan, 1995
- Shiddiqi, M. Nejatullah, *History of Islamic Economics Thought*, Jeddah: Islamic Research Training Institute, 1992
- \_\_\_\_\_, *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Tinjauan Penulisan Semasa*, terj. Amin Abdullah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan, 1989

- Sulaiman, Nyang, *The Islamic State and Economics Development; a Theoretical Analysis*, t.t.t, Islamic Culture, 1976
- Suandi Hamid, Edi, *Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis Resrukrisasi Industri dan Antisipasi Pelaku Ekonomi*, Yogyakarta: Mm bekerjasama dengan ISEI cab. Yogyakarta, 1999
- Sasono, Adi, *Liberalisasi Ekonomi; Pemerataan dan Kemiskinan*, (Ed.) Luqman Soetrisno dan Faraz Umay, Yogyakarta: PPK UGM dan Tiara Wacana, 1995
- Sadeq, A. H. M., *Islamic Economic; Some Selected Issues*, Lahore-Pakistan: Islamic Publication, 1989
- Sokirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Wijaya, Faried, *Seri Pengantar Ekonomika-Ekonomika Mikro*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE, 1992
- Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme; Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Bandung: Remaja Karya, 1986
- Yuliadi, Imamuddin, "Metodologi Ekonomi Islam", *Utilitas*, No. 9/Th Ke-7/1999
- Yusanto, Ismail, *Islam Ideologi – Refleksi Cendekiawan Muslim*, Cet. I, Bangil, Alizah, 1998
- Zadjuli, Imam Suroso, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surabaya: Fak. Ekonomi Universitas Airlangga, 1999
- Zadjuli, Imam Suroso, *Indonesian International Currency System*, Surabaya: Fak. Ekonomi Universitas Airlangga, 1999

## Lampiran Tabel

**Tabel I**  
**Zakat: Jenis Harta, Nisab, Haul dan Kadar Zakat**

No.	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A.	Zakat Harta:				
I.	Emas, Perak, dan Uang:				
	1. Emas Murni	96 gram emas	1 tahun	2.50%	
	2. Perhiasan wanita, peralatan & perabotan dari emas	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	
	3. Perak	672 gram	1 tahun	2.50%	
	4. Perhiasan wanita, peralatan & perabotan dari perak	Senilai 672 gram perak	1 tahun	2.50%	
	5. Logam mulia selain emas, perak, seperti platina	Senilai 96 gram emas	1 tahun	2.50%	
	6. Batu permata seperti intan berlian	Senilai 96 gram emas	1 tahun	2.50%	
II.	Perusahaan/Pendapatan/Perdagangan				
	1. Industri, seperti tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe/ tahu, batik, ukir-ukiran	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya
	2. Industri pariwisata, seperti Hotel, Cottage, penginapan, villa, restoran, bioskop, kolam renang	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	
	3. Perdagangan, seperti ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, pertokoan, warung, depot/kios, percetakan, penerbitan	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	
	4. Jasa, seperti notaris, akuntan, travel biro, iro reklame, designer, salon, transportasi laut, darat dan udara	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	
	5. Real estate, seperti perumahan, penyewaan rumah/tanah	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	
	6. Pendapatan, seperti gaji, honorarium, komisi, penghasilan dokter	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	Cara menghitungnya penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerima
	7. Usaha-usaha pertanian, perkebunan, perikanan, seperti tambak, kebun teh/karet/kopi, peternakan ayam, bebek, kelinci dan sebagainya.	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	
	8. Uang simpanan, seperti tabanas, deposito, uang tunai	Senilai 96 gram emas murni	1 tahun	2.50%	



1	2		4	5	6
IV.	Tumbuh-tumbuhan:				
	1. Padi	1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	* Jika airnya susah 5% Jika airnya mudah 10%
	2. Biji-bijian, seperti jagung dan kedelai	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	
	3. Umbi-umbian, seperti ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	
	4. Buah-buahan, seperti kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nenas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	
	5. Tanaman hias, seperti anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	
	6. Rumput-rumputan, seperti serei (minyak serri), bambu, tebu	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	
	7. Daun-daunan, seperti teh, tembakau, vanili	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	
	8. Kacang-kacangan, seperti kacang hijau, kedelai, kacang tanah	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	
	9. Sayur-sayuran, seperti bawang, mentimun, kol, bit, wortel, petai, bayam, sawi, cabai	Senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras	tiap panen	5% atau 10%*	
B.	Zakat Fitrah:				
	Beras, sagu, jagung, singkong/gaplek	Mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri	tiap akhir Ramadhan	2.50 kg atau 3.5 liter	Dikeluarkan pd. bulan Ramadhan. Biasa dibayarkan dengan uang seharga barang tsb. Dilakukan di daerah yg berlaku makanan pokoknya